



LAPORAN PENELITIAN SMERU

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2022

Ridho Al Izzati, Sri Murniati, Rika Kumala Dewi

LAPORAN PENELITIAN SMERU

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2022

Ridho Al Izzati

Sri Murniati

Rika Kumala Dewi

The SMERU Research Institute

Desember 2022

Indeks Pembangunan Pemuda 2022

Penulis: Ridho Al Izzati, Sri Murniati, Rika Kumala Dewi

Foto Sampul: SMERU

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Tim Peneliti

Peneliti SMERU

Ridho Al Izzati

Sri Murniati

Rika Kumala Dewi

Penasihat

Asep Suryahadi

Nina Toyamah

Athia Yumna

Daftar Isi

Daftar Isi | i

Daftar Gambar | iii

Daftar Lampiran | iv

Daftar Singkatan dan Akronim | v

Rangkuman Eksekutif | vi

I. Pendahuluan | 1

1.1 Menyiapkan Pemuda, Menyiapkan Masa Depan | 1

1.2 Demografi dan Sebaran Pemuda di Indonesia | 2

1.3 Mengukur Capaian Pembangunan Pemuda | 2

1.4 Sistematika Laporan | 4

II. Dinamika Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia Periode 2015-2021 | 5

2.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2021 | 5

2.2 Krisis Pandemi COVID-19 Memperlambat Capaian Pembangunan Pemuda | 8

2.3 Pemulihan Capaian Pembangunan Pemuda Tidak Seragam | 9

2.4 Pemulihan Capaian Pemuda Bervariasi Antar Provinsi | 11

III. Profil Indeks Pembangunan Pemuda 34 Provinsi | 12

3.1 Provinsi Aceh | 12

3.2 Provinsi Sumatra Utara | 14

3.3 Provinsi Sumatra Barat | 16

3.4 Provinsi Riau | 18

3.5 Provinsi Jambi | 20

3.6 Provinsi Sumatra Selatan | 22

3.7 Provinsi Bengkulu | 24

3.8 Provinsi Lampung | 26

3.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 28

3.10 Provinsi Kepulauan Riau | 30

3.11 Provinsi DKI Jakarta | 32

3.12 Provinsi Jawa Barat | 34

3.13 Provinsi Jawa Tengah | 36

3.14 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 38

3.15 Provinsi Jawa Timur | 40

3.16 Provinsi Banten | 42

3.17 Provinsi Bali | 44

3.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat | 46

3.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur | 48

3.20 Provinsi Kalimantan Barat | 50

3.21 Provinsi Kalimantan Tengah | 52

3.22 Provinsi Kalimantan Selatan | 54

3.23 Provinsi Kalimantan Timur | 56

3.24 Provinsi Kalimantan Utara | 58

3.25 Provinsi Sulawesi Utara | 60

3.26	Provinsi Sulawesi Tengah	62
3.27	Provinsi Sulawesi Selatan	64
3.28	Provinsi Sulawesi Tenggara	66
3.29	Provinsi Gorontalo	68
3.30	Provinsi Sulawesi Barat	70
3.31	Provinsi Maluku	72
3.32	Provinsi Maluku Utara	74
3.33	Provinsi Papua Barat	76
3.34	Provinsi Papua	78
IV.	Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan	80
4.1	Tahap 1 Mengalisis situasi pemuda melalui IPP	81
4.2	Tahap 2 Menganalisis akar masalah	81
4.3	Tahap 3 Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan	85
4.4	Tahap 4 Pemantauan dan evaluasi	88
V.	Penutup	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Arah Ke Depan	91
	Daftar Acuan	92
	Lampiran	93

Daftar Gambar

- Gambar 1. Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia | 3
- Gambar 2. Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP | 4
- Gambar 3. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional 2015-2021 | 5
- Gambar 4. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator IPP (%) | 9
- Gambar 5. Pemulihan Indikator Capaian Pembangunan Pemuda Nasional (% terhadap 2019) | 10
- Gambar 6. Ketidakseragaman Pemulihan Indikator Pemuda Provinsi | 11
- Gambar 7. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Aceh pada 2021 | 12
- Gambar 8. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Utara pada 2021 | 14
- Gambar 9. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Barat pada 2021 | 16
- Gambar 10. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Riau pada 2021 | 18
- Gambar 11. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi pada 2021 | 20
- Gambar 12. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Selatan pada 2021 | 22
- Gambar 13. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu pada 2021 | 24
- Gambar 14. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung pada 2021 | 26
- Gambar 15. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bangka Belitung pada 2021 | 28
- Gambar 16. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada 2021 | 30
- Gambar 17. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta pada 2021 | 32
- Gambar 18. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada 2021 | 34
- Gambar 19. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah pada 2021 | 36
- Gambar 20. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DI Yogyakarta pada 2021 | 38
- Gambar 21. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur pada 2021 | 40
- Gambar 22. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Banten pada 2021 | 42
- Gambar 23. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bali pada 2021 | 44
- Gambar 24. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2021 | 46
- Gambar 25. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2021 | 48
- Gambar 26. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Barat pada 2021 | 50
- Gambar 27. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 | 52
- Gambar 28. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan pada 2021 | 54
- Gambar 29. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Timur pada 2021 | 56
- Gambar 30. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 | 58
- Gambar 31. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara pada 2021 | 60
- Gambar 32. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah pada 2021 | 62
- Gambar 33. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan pada 2021 | 65
- Gambar 34. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2021 | 67
- Gambar 35. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo pada 2021 | 68
- Gambar 36. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat pada 2021 | 70
- Gambar 37. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku pada 2021 | 72
- Gambar 38. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Utara pada 2021 | 74
- Gambar 39. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Barat pada 2021 | 76
- Gambar 40. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua pada 2021 | 78
- Gambar 41. Diagram Alur Proses Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan dalam Konteks Pembangunan Pemuda | 81

- Gambar 42. Ilustrasi analisis akar masalah pengembangan kewirausahaan pemuda pada domain partisipasi dan kesempatan kerja | 83
- Gambar 43. Pemetaan Akar Masalah Pembangunan Pemuda, Studi Kasus di Jawa Barat | 84
- Gambar 44. Kerangka Berfikir Logis Perencanaan Kebijakan | 86

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Tabel A1. Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (dalam ribuan jiwa Tahun 2021 | 94
- Lampiran 2. Metodologi Penghitungan IPP | 95
- Lampiran 3. Tabel A2. Indikator Penyusun IPP per Provinsi dalam Periode 2019 – 2021 | 96
- Lampiran 4. Tabel A3. Nilai Transformasi Indikator Penyusun IPP | 101
- Lampiran 5. Tabel A4. Perkembangan Nilai Indeks Domain 2019-2021 | 106
- Lampiran 6. Tabel A5. Perkembangan Nilai IPP periode 2019-2021 | 107

Daftar Singkatan dan Akronim

BPS	Badan Pusat Statistik
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Sakernas	Survei Tenaga Kerja Nasional
MSBP	Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
APK	Angka Partisipasi Kasar
PT	Perguruan Tinggi
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
COVID	<i>Coronavirus Diseases</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
UU	Undang-Undang

Rangkuman Eksekutif

Pada tahun 2021, total populasi pemuda Indonesia usia 16-30 tahun mencapai angka 64,9 juta dengan komposisi 32,8 juta merupakan pemuda laki-laki dan 32,1 juta merupakan pemuda perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara nasional mengalami perbaikan, meningkat dari 51 pada tahun 2020 menjadi 53,33 pada tahun 2021. Perbaikan IPP didorong oleh perbaikan pada domain dan indikator pembentuknya.

Peningkatan IPP 2021 didorong oleh peningkatan nilai indeks pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi. Namun, domain Pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja stagnan, sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan. Dinamika tahun 2021 tidak terlepas dari krisis pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020.

Krisis pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 telah berdampak pada perlambatan dan penurunan capaian pemuda pada tahun tersebut. Pandemi menurunkan (atau berdampak negatif) terhadap domain lapangan dan kesempatan kerja dan terhadap domain partisipasi dan kepemimpinan. Sedangkan, pandemi tidak menurunkan capaian indeks domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan tapi sedikit meningkatkan capaian domain gender dan diskriminasi.

Secara umum, IPP telah kembali ke tren sebelum krisis pandemi COVID-19 dengan nilai yang lebih besar 1% dibandingkan kondisi 2019 (sebelum krisis). Dari lima domain, dua domain belum kembali ke tren yakni domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Dari total 15 indikator, 8 diantaranya telah kembali bahkan memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum krisis. Namun, sebanyak 7 indikator lainnya masih terkoreksi cukup dalam yang belum pulih kembali ke tren sebelum krisis.

Dari 34 provinsi, sebanyak 18 provinsi mengalami peningkatan IPP di tahun 2021 (kembali ke tren sebelum krisis) sedangkan sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan yang berarti belum pulih ke kondisi sebelum krisis pandemi. Tiga provinsi dengan peningkatan IPP terbesar yakni Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan tiga provinsi dengan penurunan IPP terbesar yakni Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sumatra Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.

IPP memiliki peran strategis dalam membangun kepedulian (*awareness*) tidak hanya pengambil kebijakan tapi juga masyarakat luas terkait capaian pembangunan kepemudaan. Namun, IPP hanya dapat memberikan gambaran capaian pemuda terbatas pada aspek *what* (apa situasinya), aspek *where* (dinamika ketimpangan pembangunan pemuda antar wilayah), dan aspek *when* (sejauh mana situasi pemuda telah berhasil berkembang waktu ke waktu. Namun, IPP juga memerlukan aspek *why* (faktor yang menyebabkan munculnya situasi pemuda tertentu) dan *how* (petunjuk kebijakan atau strategi pembangunan kepemudaan yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi pemuda). Proses ini diperlukan terutama oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan terkait pemuda di Indonesia.

I. Pendahuluan

1.1 Menyiapkan Pemuda, Menyiapkan Masa Depan

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan memengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Mengapa pemuda itu penting? Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan.

Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender.

Mengapa perlu memantau capaian pembangunan pemuda? Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa memantau pencapaian pengembangan pemuda menjadi penting. Pertama, memantau kemajuan pembangunan pemuda dapat membantu kita mengidentifikasi dimensi kepemudaan yang mungkin mengalami kendala, sehingga intervensi dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan dimensi tersebut. Kedua, memantau pembangunan pemuda dapat memberikan informasi berharga kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut akan membantu pembuat kebijakan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kaum muda dan membuat keputusan berbasis bukti untuk mendukung perkembangan mereka. Ketiga, memantau pencapaian pembangunan pemuda dapat membantu masyarakat memahami kondisi pemuda dan mengevaluasi dukungan (seperti kebijakan) yang telah diberikan kepada pemuda untuk perbaikan kebijakan ke depannya.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu indeks yang dapat memantau kemajuan pembangunan pemuda yakni Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP hadir sebagai *dashboard* (pedoman) yang dikembangkan sejak tahun 2016.

Pada tahun 2020, beberapa capaian pemuda mengalami penurunan atau perlambatan. Krisis yang muncul karena pandemi COVID-19 telah berdampak pada banyak sendi kehidupan masyarakat tak terkecuali pada indikator-indikator pembangunan pemuda.

IPP merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan terkait kepemudaan. IPP menyediakan informasi apa (*what*), kapan (*when*), dan di mana (*where*) pemuda dan kondisi capaian pemuda di Indonesia. Namun, pengambil kebijakan juga perlu melakukan analisis mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*) memahami IPP dan respon kebijakannya. Laporan IPP 2022 ini merupakan laporan tahunan yang

menyajikan dan menganalisis capaian pembangunan pemuda dalam kerangka indeks pembangunan pemuda.

1.2 Demografi dan Sebaran Pemuda di Indonesia

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai warga negara yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurut Statistik Pemuda Indonesia (BPS, 2021), pada tahun 2021 terdapat sebanyak 64,9 juta (atau sekitar 24% dari populasi nasional) pemuda berusia 16 sampai 30 tahun di Indonesia. Sebanyak 32,78 juta merupakan pemuda laki-laki dan sebanyak 32,14 juta merupakan pemuda perempuan.

Sebanyak 59% pemuda tinggal di wilayah perkotaan (perdesaan 41%). Berdasarkan wilayah, sebanyak 55% pemuda berada di Pulau Jawa. Sekitar 61% pemuda berstatus belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 37,7%, dan sisanya berstatus cerai hidup/mati (sekitar 1,3%). Sekitar 11% pemuda merupakan kepala rumah tangga, dan sementara itu sekitar 73% pemuda tinggal bersama keluarga.

Relatif terhadap total populasi, proporsi pemuda di setiap provinsi berkisar antara 21,7% di Provinsi Jawa Timur hingga 27,3% di Provinsi Papua (nasional 24%). Sedangkan secara distribusi, Jawa Barat menjadi tempat tinggal pemuda terbanyak di antara semua provinsi yakni sekitar 19% dan Kalimantan Utara yang terkecil yakni sekitar 0,3%.

1.3 Mengukur Capaian Pembangunan Pemuda

IPP disusun berdasarkan tiga kerangka yakni pertama kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan kerangka partisipasi dan diskriminasi (Gambar 1). Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks (Gambar 2).

a) Lapisan Pembangunan Individu

Komponen lapisan pembangunan individu mencakup mulai dari peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, hingga ketersediaan ruang publik yang aman. Dalam pengukuran IPP, indikator dari kerangka pembangunan individu ini dikelompokkan ke dalam dua domain yakni domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan.

Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Sedangkan Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Sesuai dengan metadata, sumber data dari dua domain ini berasal dari Survei Sosial-ekonomi Nasional atau Susenas (lebih lanjut lihat Lampiran 2).

b) Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berkaitan erat dengan peran pemuda di pasar tenaga kerja. Terdapat satu domain dalam lapisan ini yakni domain lapangan dan kesempatan kerja. Domain ini merepresentasikan produktivitas pemuda yang pada akhirnya mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan pemuda. Domain ini memiliki dua indikator yakni persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Dua indikator tersebut berasal dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas.

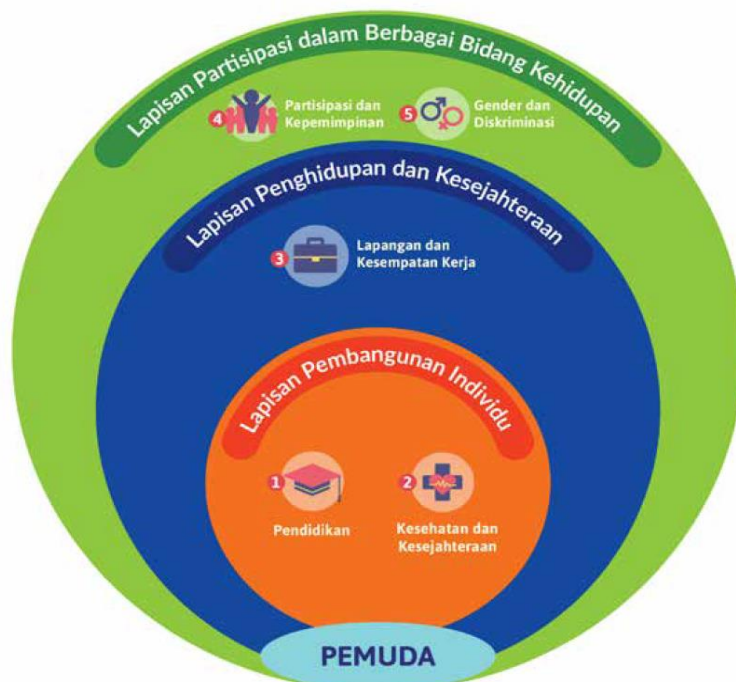
c) Lapisan Partisipasi, Kepemimpinan, dan Diskriminasi

Kerangka ini mencakup peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Kerangka ini direpresentasikan dalam dua domain. Pertama, manifestasi peran pemuda tecermin pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Kedua, domain gender dan diskriminasi bertujuan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal.

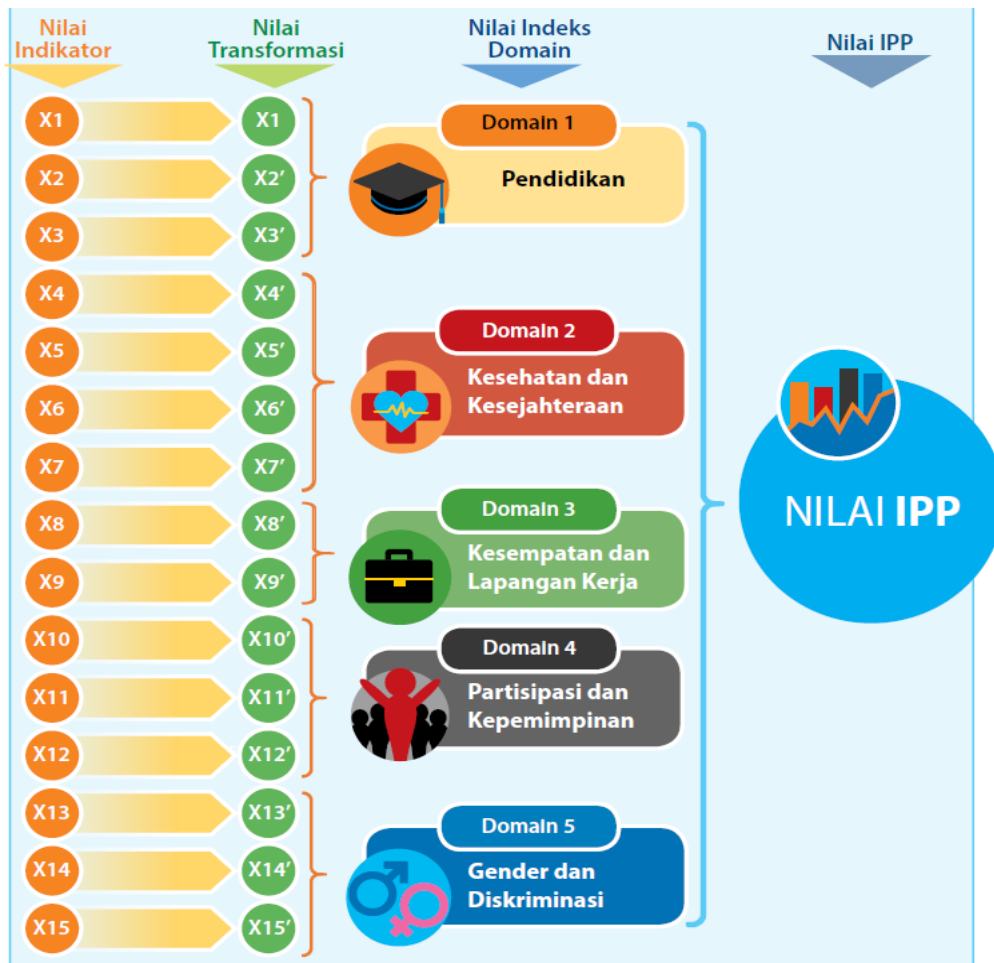
Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP).

Domain gender dan pendidikan juga terdiri dari tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat sma ke atas (keduanya berasal dari data Susenas), dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (berasal dari data Sakernas).

Gambar 1. Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia



Gambar 2. Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

1.4 Sistematika Laporan

Laporan IPP 2022 ini terdiri dari lima bab. Bab 1 memberikan gambaran peran pemuda dan tantangan capaian pembangunan pemuda. Bab 2 membahas dinamika capaian pemuda secara nasional dan membahas dampak krisis pandemi COVID-19 terhadap capaian pemuda beserta pemulihannya. Bab 3 akan menyediakan deskripsi capaian pembangunan pemuda untuk 34 provinsi. Bab 4 menyediakan log-frame kebijakan pembangunan pemuda untuk menerjemahkan IPP menjadi sebuah kebijakan. Dan Bab 5 adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan arah ke depan.

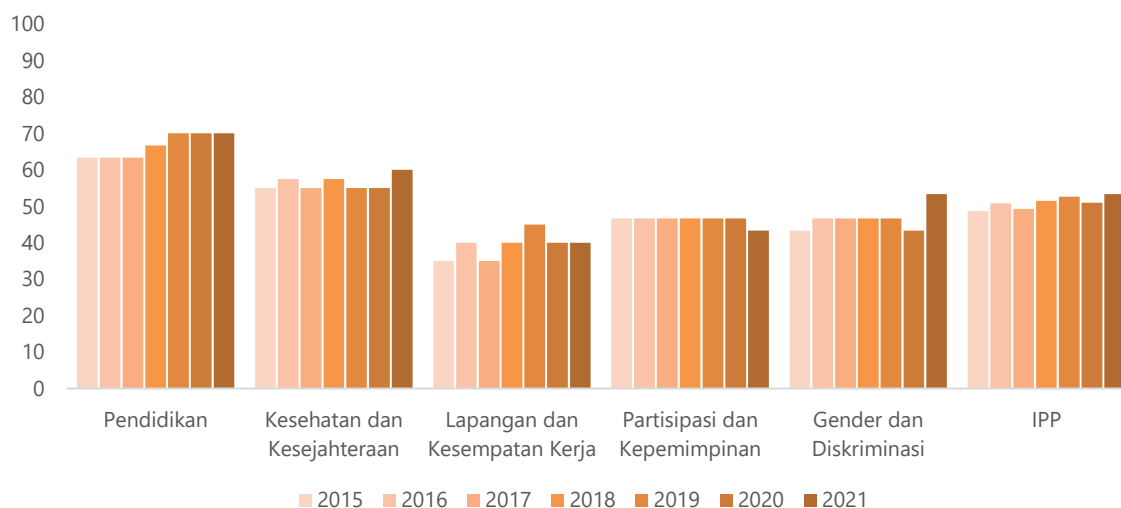
II. Dinamika Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia Periode 2015-2021

Bab ini akan membahas dinamika capaian pemuda Indonesia 2015-2021. Secara deskriptif, bab ini menampilkan dinamika capaian pemuda secara umum (IPP) dan untuk masing-masing domain IPP. Selanjutnya, bab ini juga akan menyajikan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap capaian pembangunan pemuda beserta pemulihannya.

2.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2021

Gambar 3 menunjukkan nilai IPP secara nasional dan dibagi berdasarkan domain untuk tahun 2020 dan 2021. Secara keseluruhan, nilai IPP Indonesia meningkat lebih dari dua poin dari 51 di 2020 menjadi 53.33 pada tahun 2021. Peningkatan IPP 2021 didorong oleh peningkatan nilai indeks pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi. Namun, domain Pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja stagnan, sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan.

Gambar 3. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional 2015-2021



2.1.1 Domain Pendidikan

Capaian domain pendidikan merupakan yang tertinggi dibandingkan capaian domain lainnya namun mengalami stagnasi sejak tahun 2019 (dengan nilai domain 70). Sejak 2019 hingga 2021, rata-rata lama sekolah pemuda telah meningkat dari 10,63 tahun menjadi 10,89 tahun, APK Sekolah Menengah meningkat dari 87,3% menjadi 88,93%, dan APK Perguruan Tinggi meningkat dari 30,28% menjadi 31,19%. Tidak hanya secara nasional, hampir semua provinsi juga mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, dan APK Perguruan Tinggi. Namun, nilai indeks yang stagnan lebih disebabkan

karena transformasi indikator menjadi nilai indeks belum mampu melebihi kuintil IPP yang lebih tinggi.

Selama tahun 2020 hingga 2021, krisis pandemi COVID-19 telah mendisrupsi sektor pendidikan. Akan tetapi, indikator pembentuk domain pendidikan justru mengalami perbaikan. Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi telah mendisrupsi kualitas pembelajaran sehingga menurunkan capaian kualitas belajar siswa meski dengan capaian akses yang membaik.

2.1.2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Capaian domain kesehatan dan kesejahteraan merupakan yang tertinggi kedua setelah domain pendidikan dan mengalami peningkatan nilai capaian indeks pada tahun 2021. Peningkatan capaian domain ini pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan pada tiga dari total empat indikator pembentuk domain.

Terjadi perbaikan pada indikator persentase pemuda korban kejahatan yang turun dari 1,14% pada tahun 2020 menjadi 0,85% pada tahun 2021. Persentase pemuda yang merokok juga mengalami sedikit penurunan dari 25,7% pada tahun 2020 menjadi 25,07% pada tahun 2021. Setelah sebelumnya mengalami peningkatan hingga mencapai 18,22% pada tahun 2020, indikator persentase remaja perempuan sedang hamil mengalami penurunan mencapai 16,97 pada tahun 2020. Perbaikan ada tiga indikator ini mendorong perbaikan capaian indeks dari 55 pada tahun 2020 menjadi 60 pada tahun 2021.

Namun, pada periode yang sama indikator angka kesakitan pemuda mengalami pemburukan yang menghambat peningkatan capaian domain lebih tinggi lagi. Angka kesakitan pemuda meningkat dari 8,58% pada tahun 2020 menjadi 10,23% pada tahun 2021. Banyak faktor yang berperan, salah satu yang dapat menjelaskan peningkatan angka kesakitan pemuda yakni faktor eskalasi pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang periode tersebut.

2.1.3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Capaian domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan yang terendah dibandingkan capaian domain lainnya dan nilainya turun sejak tahun 2019. Capaian domain ini telah meningkat mencapai 45 dari 35 pada tahun 2015. Pandemi COVID menyebabkan capaian domain turun menjadi 40 dan bertahan hingga 2021.

Domain ini dibentuk dari dua indikator yakni tingkat pengangguran pemuda dan persentase pemuda wirausaha kerah putih. Krisis pandemi COVID-19 yang dimulai tahun 2020 menghantam perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Aktivitas perekonomian nasional turun drastis dan pada saat yang sama tingkat pengangguran meningkat dari 13,03% di 2019 menjadi 15,23% di 2020. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran turun ke angka 14,42%. Di periode yang sama, persentase pemuda wirausaha kerah putih juga turun dari 0,47% di 2019 menjadi 0,44% di 2020 dan terus turun di 2021 mencapai 0,41%.

Pemulihan pasca krisis pandemi COVID-19 telah berjalan sejak awal tahun 2021. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah kembali tumbuh positif. Namun, pemulihan situasi

ketenagakerjaan tidak begitu baik. Meskipun membaik, namun dua indikator pembentuk domain lapangan dan kesempatan kerja ini belum kembali ke capaian sebelum krisis pandemi melanda.

2.1.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan cenderung stabil sejak tahun 2015 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Domain ini dibatasi oleh ketersediaan data yang tersedia untuk tiga tahun sekali (2015, 2018, dan 2021). Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan turun dari 46,67 dari periode 2018-2020 menjadi 43,33 pada tahun 2021. Penurunan capaian ini didorong oleh penurunan capaian di ketiga indikator pembentuk domain.

Indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan turun dari 81,36% pada tahun 2020 menjadi 70,49% pada tahun 2021. Sedangkan indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi juga mengalami penurunan dari 6,36% pada tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2021. Sementara itu persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat turun dari 6,72% pada tahun 2020 menjadi 5,40% pada tahun 2021.

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh reaksi alami individu yang menjaga jarak dan menghindari pertemuan selama pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial pada tahun 2020 dan 2021 juga turut andil dalam membatasi pergerakan individu selama pandemi.

2.1.5 Domain Gender dan Diskriminasi

Capaian domain gender dan diskriminasi merupakan domain dengan peningkatan tertinggi (naik sebesar 10 poin) dibandingkan domain lainnya. Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi, capaian domain gender dan diskriminasi meningkat secara signifikan pada tahun 2021 yakni dari 43,3 menjadi 53,3. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan capaian di semua indikator pada domain ini. Angka perkawinan usia anak turun dari 10,35% di 2020 menjadi 9,23% di 2021. Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi juga naik dari 39,37% di 2020 menjadi 41,11% di 2021. Setelah turun cukup besar dari 2019 ke 2020, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal telah kembali meningkat dari 22,31% di 2020 menjadi 24% di 2021.

Capaian angka perkawinan anak melebihi ekspektasi. Pandemi COVID-19 diduga berpotensi memperburuk indikator ini diindikasikan oleh beberapa fenomena. Salah satu fenomena yakni meningkatnya jumlah kompensasi izin menikah dari kantor urusan agama untuk pernikahan di bawah usia minimal perkawinan.

Sejalan dengan hal itu, pandemi COVID-19 telah mendisrupsi sektor pendidikan, namun capaian indikator akses pendidikan menengah dan tinggi pemuda perempuan cukup baik.

Secara nasional, pemulihan perekonomian secara umum telah berjalan cukup baik dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang telah positif sejak awal tahun 2021. Namun, indikator ketenagakerjaan belum sepenuhnya kembali ke situasi sebelum krisis pandemi,

salah satunya persentase pekerja sektor formal. Secara nasional, persentase pekerja sektor formal masih berada di angka 39% pada Agustus 2021. Namun, peningkatan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal relatif baik dibandingkan angka nasional dan laki-laki.

2.2 Krisis Pandemi COVID-19 Memperlambat Capaian Pembangunan Pemuda

Dampak krisis pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 dapat terlihat pada penurunan capaian beberapa indikator pemuda Indonesia pada tahun tersebut. Tidak berakhir di 2020, dampak pandemi COVID-19 masih tercatat pada capaian pembangunan pemuda pada tahun 2021. Gambar 1 menunjukkan dampak relatif pandemi terhadap 15 indikator, 5 indeks domain, dan IPP. Interpretasi dari Gambar 1 yakni seberapa besar capaian indikator dan indeks IPP (rata-rata capaian 2020 dan 2021) berbeda dari proyeksi *baseline* (Lampiran). Proyeksi *baseline* merupakan capaian IPP jika seandainya tidak terjadi pandemi COVID-19.

Gambar 1 menunjukkan bahwa angka IPP lebih rendah 2% dibandingkan proyeksi *baseline*. Pandemi berdampak negatif terhadap domain lapangan dan kesempatan kerja (-11%), domain partisipasi dan kepemimpinan (-7%). Sedangkan, indeks domain Pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan tidak berubah. Sebaliknya, domain gender dan diskriminasi meningkat 6%.

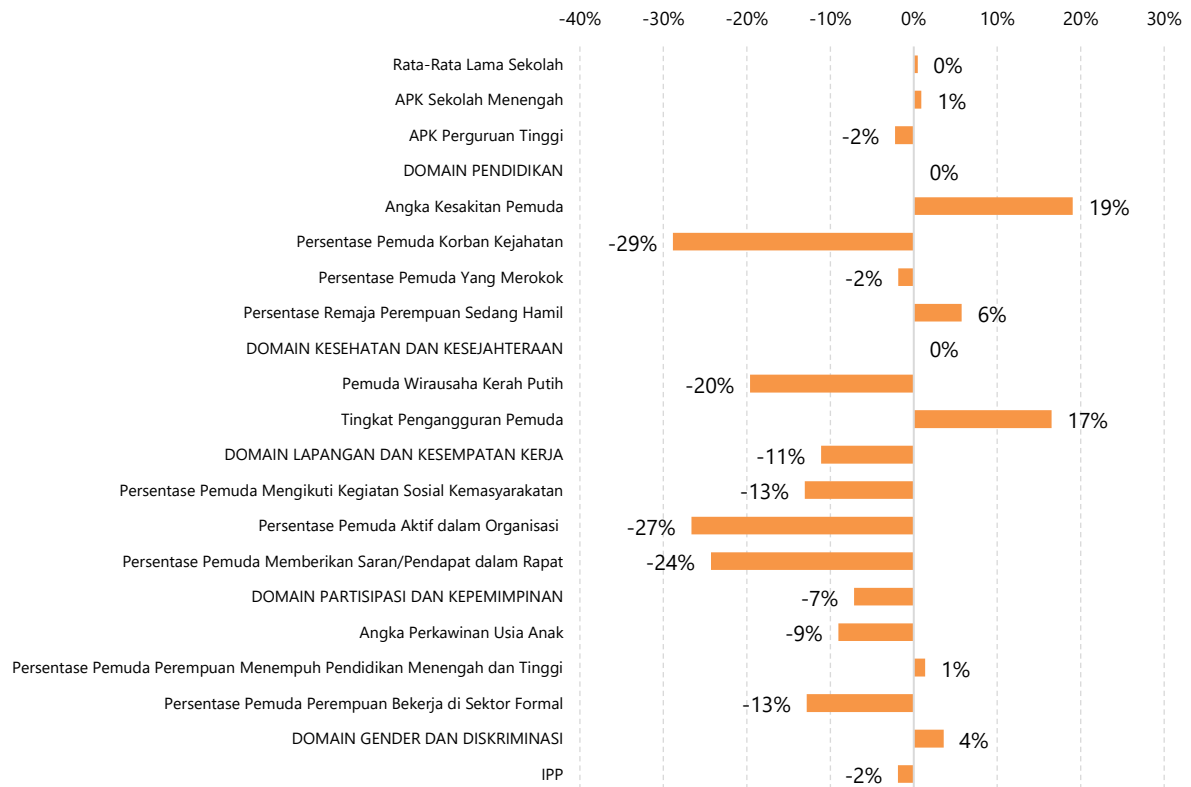
Jika dilihat lebih jauh ke dalam masing-masing indikator, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang bervariasi antar indikatornya. Beberapa indikator telah memburuk, sedangkan beberapa yang lain tidak terdampak bahkan mengalami perbaikan.

Pertama, dampak pandemi yang memperburuk capaian pembangunan pemuda. Dampak terbesar pandemi terhadap capaian pemuda (secara berurutan lima terbesar) yakni meningkatkan angka kesakitan pemuda (sebesar 19%), menurunkan persentase pemuda aktif dalam organisasi (-27%), menurunkan persentase pemuda memberikan saran dalam rapat (-24%), menurunkan persentase pemuda wirausaha kerah putih (-20%), dan meningkatkan tingkat pengangguran pemuda (17%).

Urutan selanjutnya dampak pandemi yang memperburuk capaian pembangunan pemuda yakni menurunkan persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (-13%), menurunkan persentase pemuda perempuan bekerja di sektor formal (-13%), meningkatkan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (6%), dan menurunkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi (-2%).

Kedua, beberapa indikator tidak terdampak selama pandemi yakni persentase pemuda korban kejahatan turun sebesar 29%, persentase pemuda yang merokok turun sebesar 2%, dan angka perkawinan anak turun sebesar 9%. Bahkan beberapa indikator mengalami perbaikan yakni indikator pemuda perempuan menempuh Pendidikan menengah dan atas dan indikator APK Sekolah Menengah masing-masing meningkat 1%. Sedangkan tidak indikator rata-rata lama sekolah tidak terdampak selama pandemi.

Gambar 4. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indikator IPP (%)



Catatan: Dampak pandemi COVID-19 terhadap indikator IPP dihitung dengan cara membandingkan capaian tahun 2020 dan 2021 dengan angka proyeksi indikator IPP. Angka proyeksi merupakan proyeksi capaian indikator IPP tanpa pandemi COVID-19 (counterfactual).

2.3 Pemulihan Capaian Pembangunan Pemuda Tidak Seragam

Meskipun pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung, namun secara umum beberapa indikator perekonomian utama telah mengalami pemulihan dibandingkan tahun 2020. Gambar 2 berikut menunjukkan pemulihan indikator capaian pembangunan pemuda secara nasional. Pemulihan indikator IPP dihitung dengan cara membandingkan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2019 yang merupakan kondisi sebelum krisis pandemi COVID-19. Angka nol atau besar dari nol (positif) menunjukkan bahwa capaian suatu indikator telah kembali ke tren capaian sebelum krisis atau bahkan melebihinya. Angka di bawah nol (negatif) menunjukkan capaian suatu indikator belum pulih dari capaian yang sudah baik sebelumnya.

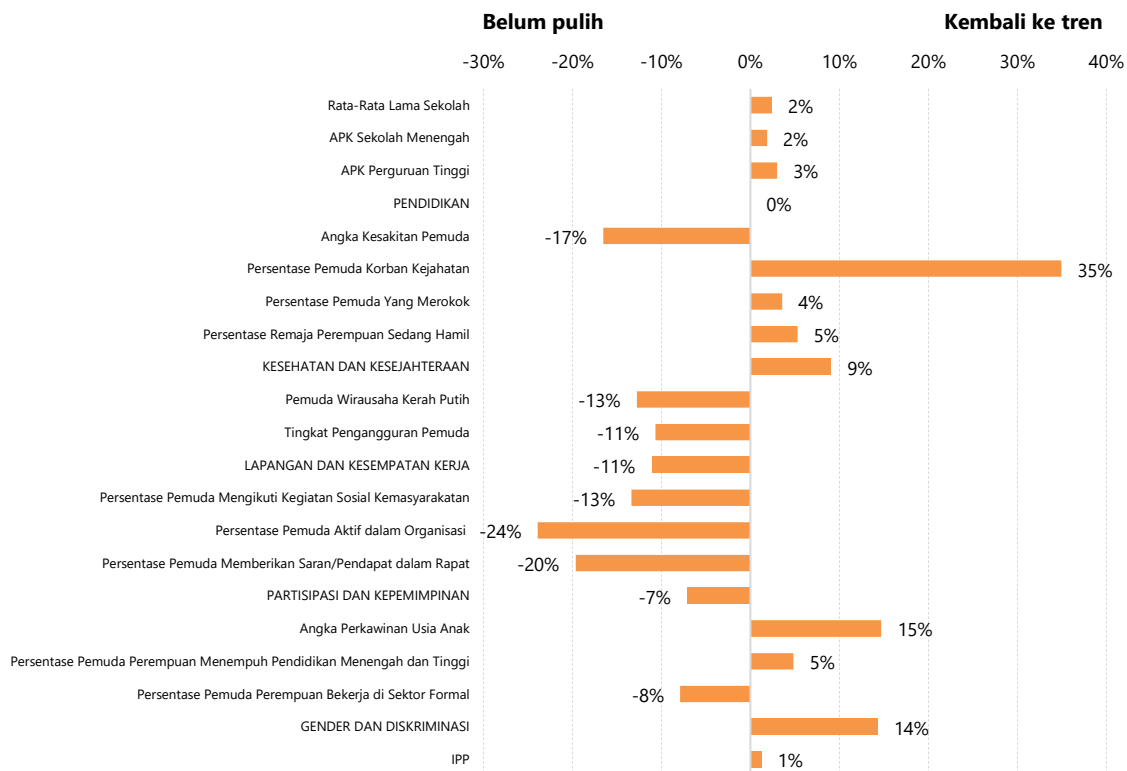
Secara umum, IPP telah kembali ke tren sebelum krisis pandemi COVID-19 dengan nilai yang lebih besar 1% dibandingkan kondisi 2019. Dari lima domain, dua domain belum kembali ke tren yakni domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Dari total 15 indikator, 8 diantaranya telah kembali bahkan memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum krisis. Sedangkan 7 indikator lainnya masih terkoreksi cukup dalam yang belum pulih kembali ke tren sebelum krisis (capaian indikator lengkap lihat pada Lampiran).

Indikator pada domain pendidikan telah pulih sepenuhnya dari krisis namun belum bisa menaikkan nilai indeks domain. Sedangkan secara rata-rata, domain kesehatan dan kesejahteraan juga telah pulih namun tidak pada semua indikator. Terdapat satu indikator yang capaiannya belum pulih pada domain kesehatan dan kesejahteraan yakni angka kesakitan pemuda (2019: 8,78%; 2021: 10,23%). Namun, tiga indikator lainnya pada domain yang sama telah menunjukkan perbaikan yang signifikan sehingga mampu mendorong indeks domain naik sebesar 9%.

Semua indikator pada domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan belum pulih ke kondisi sebelum krisis. Situasi ini membuat nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja lebih rendah 11% dan nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan lebih rendah 7% dibandingkan kondisi sebelum krisis.

Sedangkan pada domain gender dan diskriminasi, terdapat satu indikator yang belum pulih yakni persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Namun, dua indikator lain (angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) mengalami perbaikan sehingga indeks domain meningkat sebesar 14%.

Gambar 5. Pemulihan Indikator Capaian Pembangunan Pemuda Nasional (% terhadap 2019)



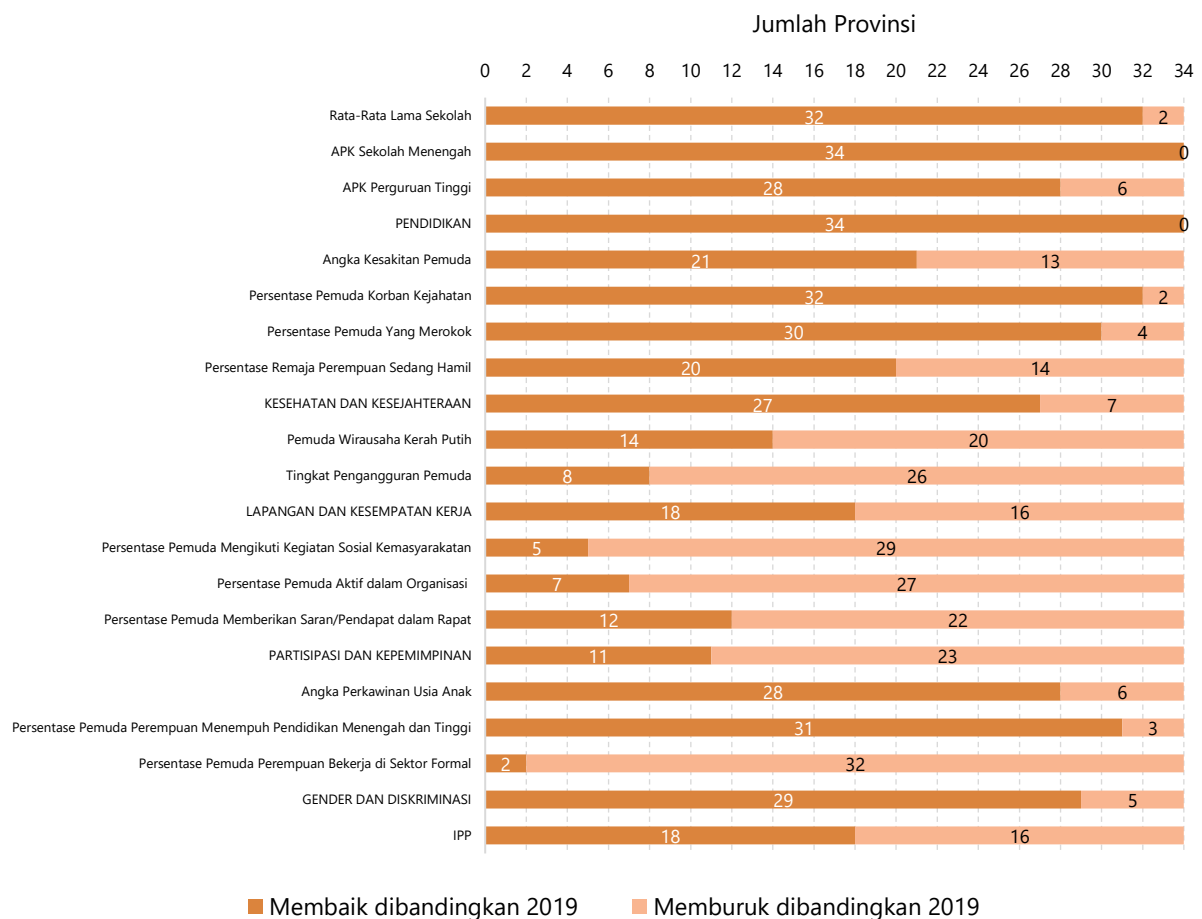
Catatan: Pemulihan indikator IPP dihitung dengan cara membandingkan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2019 yang merupakan kondisi sebelum krisis pandemi COVID-19. Angka nol atau besar dari nol (positif) menunjukkan bahwa capaian suatu indikator telah kembali ke tren capaian sebelum krisis atau bahkan melebihinya. Angka di bawah nol (negatif) menunjukkan capaian suatu indikator belum pulih dari capaian yang sudah baik sebelumnya. Indikator berikut ini dinormalisasi menjadi tren positif: angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, persentase remaja perempuan sedang hamil, tingkat pengangguran pemuda, dan angka perkawinan usia anak.

2.4 Pemulihan Capaian Pemuda Bervariasi Antar Provinsi

Dari 34 provinsi, sebanyak 18 provinsi mengalami peningkatan IPP di tahun 2021 sedangkan sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan. Tiga provinsi dengan peningkatan IPP terbesar yakni Provinsi Riau (naik 5.5 poin), Provinsi Jambi (naik 4.17 poin), dan Provinsi Sulawesi Selatan (naik 4 poin). Sedangkan tiga provinsi dengan penurunan IPP terbesar yakni Provinsi Kalimantan Utara (turun 4.17 poin), Provinsi Sumatra Barat (turun 4 poin), dan Provinsi Jawa Tengah (3 poin).

Gambar 3 menunjukkan jumlah provinsi yang mengalami perbaikan atau pemburukan indikator capaian pemuda dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis pandemi COVID-19. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan nilai capaian domain dan indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan dan domain lapangan dan kesempatan kerja. Selain itu, terkait isu ketenagakerjaan pemuda perempuan, hampir semua provinsi mengalami penurunan capaian indikator pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Gambar 6. Ketidakteragaman Pemulihan Indikator Pemuda Provinsi



III. Profil Indeks Pembangunan Pemuda 34 Provinsi

Bab ini menampilkan deskripsi statistik capaian Indeks Pembangunan Pemuda secara umum, domain, dan indikator pembentuk domain untuk 34 Provinsi di Indonesia. Pertama, bab ini melihat dinamika domain untuk tahun 2020 dan 2021. Kedua, kelima domain dan indikatornya untuk setiap provinsi akan dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional.

3.1 Provinsi Aceh

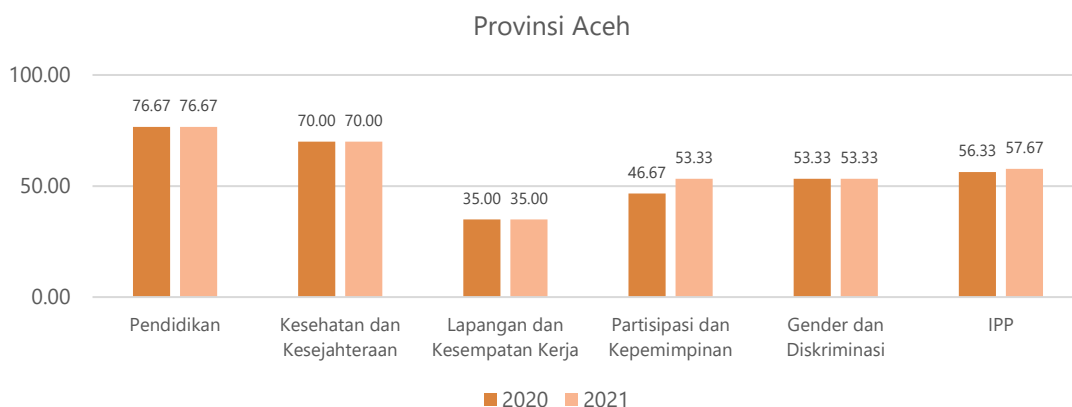
Terdapat sebanyak 1,4 juta pemuda di Provinsi Aceh pada tahun 2021. Nilai IPP Provinsi Aceh meningkat satu poin dari 56.3 di 2020 menjadi 57.7 di 2021. Peningkatan ini disumbang oleh satu-satunya peningkatan pada nilai domain Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda (naik dari 46,67 di 2020 menjadi 53,33 di 2021), sedangkan capaian domain yang lain nyaris tidak berubah. Perbaikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Provinsi Aceh didorong oleh peningkatan indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dari 8,44% di 2020 menjadi 13,56%.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian pembangunan pemuda di Provinsi Aceh relatif lebih baik pada domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, dan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Hal tersebut tercermin dari beberapa nilai transformasi indikator Provinsi Aceh yang berada di atas rata-rata nasional.

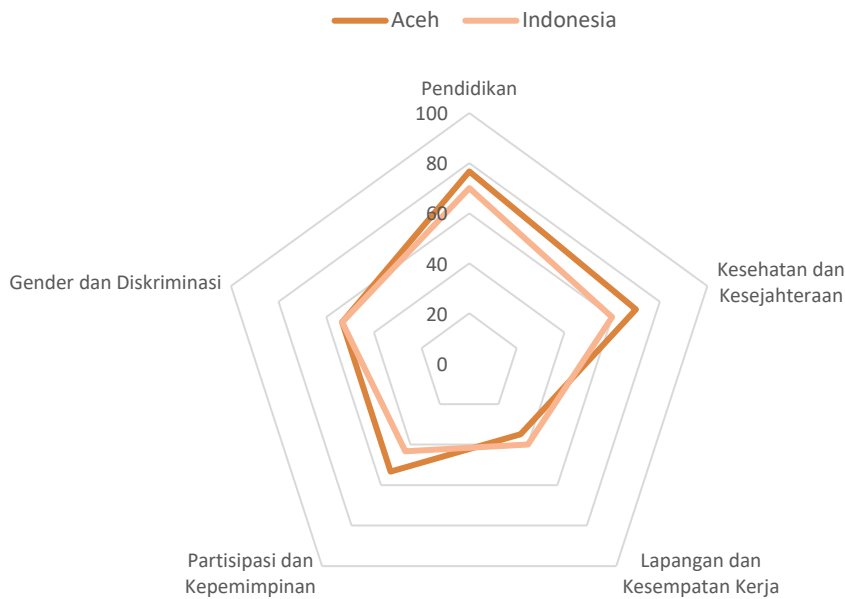
Capaian indikator pemuda yang terendah yang perlu mendapatkan perhatian yakni persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (2.6%). Selain itu, tantangan terbesar pembangunan pemuda di Provinsi Aceh yakni rendahnya capaian persentase pemuda wirausaha kerah putih (0.24%) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (15.7%).

Gambar 7. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Aceh pada 2021

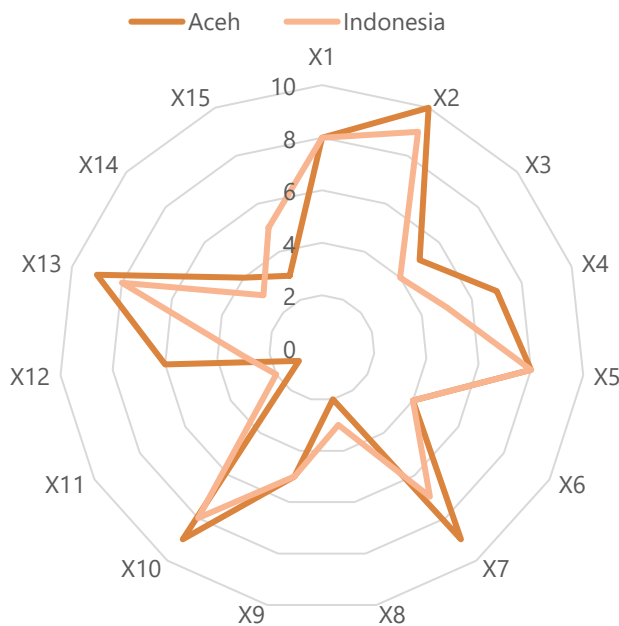
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Aceh 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Aceh dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Aceh dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.2 Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2021, terdapat sekitar 3,7 juta pemuda tinggal di Provinsi Sumatera Utara dengan komposisi perempuan sebanyak 1,8 juta dan laki-laki sebanyak 1,9 juta pemuda. Jumlah pemuda Sumatera Utara merupakan yang terbanyak pertama di antara provinsi di luar Pulau Jawa. Capaian pemuda Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan nilai IPP 52.5 dari 54.5 pada tahun 2020. Meskipun terdapat peningkatan pada capaian domain kesehatan dan kesejahteraan, penurunan IPP keseluruhan didorong oleh turunnya capaian domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda.

Meskipun indikator tingkat pengangguran sedikit turun pada 2021 (2020:13,93%; 2021:13,11%), penurunan capaian domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh turunnya persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,43% di 2020 menjadi 0,38% di 2021. Selain itu, penurunan indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih ini membuat capaiannya berada di bawah rata-rata nasional.

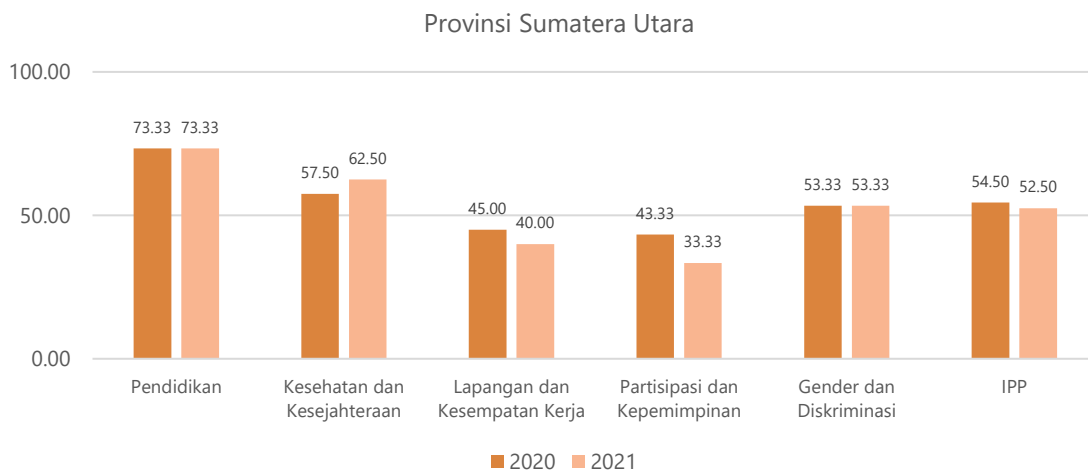
Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda merupakan yang terendah dibandingkan domain yang lain. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (4,12%) dan persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat (3,35%) di Provinsi Sumatera Utara berada di bawah rata-rata nasional dan telah menurun sejak tahun 2020.

Capaian indeks domain pendidikan dan domain gender dan diskriminasi tidak mengalami perubahan. Meskipun capaian indikator pembentuk kedua domain tersebut mengalami perbaikan, namun nilainya capaiannya belum bisa meningkatkan capaian desil indeks domain.

Perhatian lain juga diperlukan pada beberapa indikator lain yang berada di bawah rata-rata nasional yakni indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (20,94%; nasional:24%).

Gambar 8. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara pada 2021

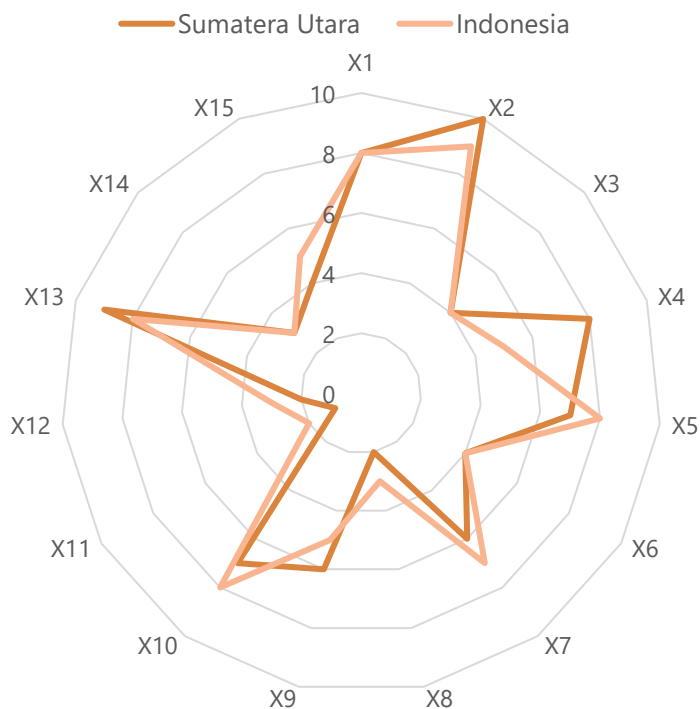
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatera Utara 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.3 Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki sebanyak 1,36 juta pemuda (690 ribu laki-laki dan 673 ribu perempuan). Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam provinsi yang mengalami penurunan capaian IPP dari 55,33 di tahun 2020 menjadi 51,33 di tahun 2021. Meskipun capaian domain gender dan diskriminasi meningkat, namun tiga domain yang lain mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan (turun 15 poin), lalu diikuti oleh domain lapangan dan kesempatan kerja (turun 5 poin) dan domain partisipasi dan kepemimpinan (turun 3 poin). Hal ini membuat nilai dari tiga domain tersebut menjadi berada di bawah rata-rata nasional.

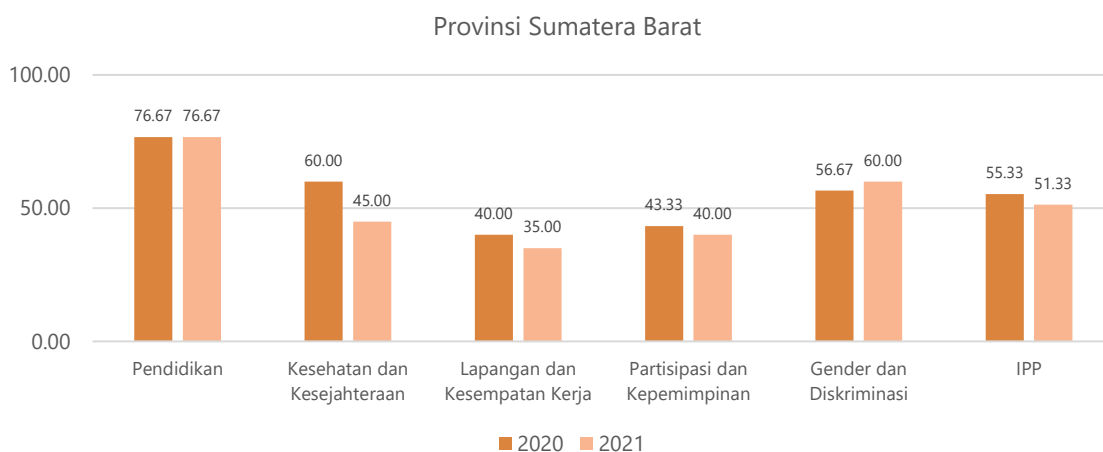
Meskipun terdapat sedikit perbaikan pada indikator pembentuk domain pendidikan, namun tidak terdapat perubahan capaian indeks pada domain ini karena belum mencapai tingkat desil yang lebih tinggi. Sedangkan peningkatan capaian pada domain gender dan diskriminasi didorong oleh perbaikan pada ketiga indikator pembentuknya.

Penurunan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan dikarenakan memburuknya salah satu indikator yakni meningkatnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil dari 5% di 2020 menjadi 35% di 2021. Peningkatan ini menjadi yang tertinggi kedua di antara semua provinsi pada tahun 2021. Penurunan pada capaian domain lapangan dan kesempatan kerja dikarenakan terjadi penurunan pada indikator pemuda wirausaha kerah putih (2020: 0,42%; 2021: 0,32%) dan peningkatan tingkat pengangguran pemuda pada tahun 2021 (2020: 14,85%; 2021: 15,28%). Sedangkan terkat domain partisipasi dan kepemimpinan, terdapat sedikit penurunan pada indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (2020: 4,68%; 2021: 3,34%) dan persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat (2020: 9,81; 2021: 7,49).

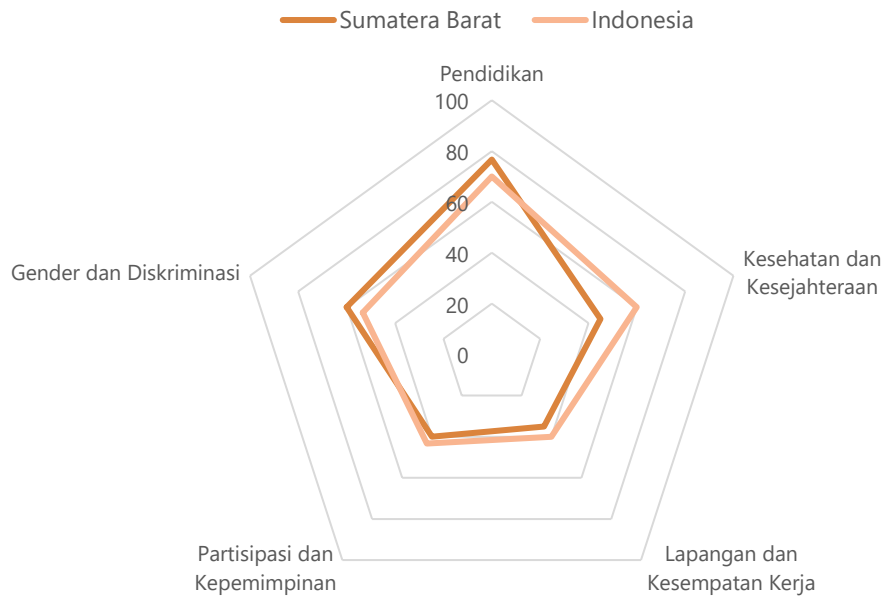
Perhatian lain juga diperlukan pada beberapa indikator lain yang berada di bawah rata-rata nasional yakni persentase pemuda korban kejahatan (1,43%; nasional 0,85%), persentase pemuda yang merokok (25,65%; nasional 25,07%), dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,61%; nasional 24%).

Gambar 9. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Barat pada 2021

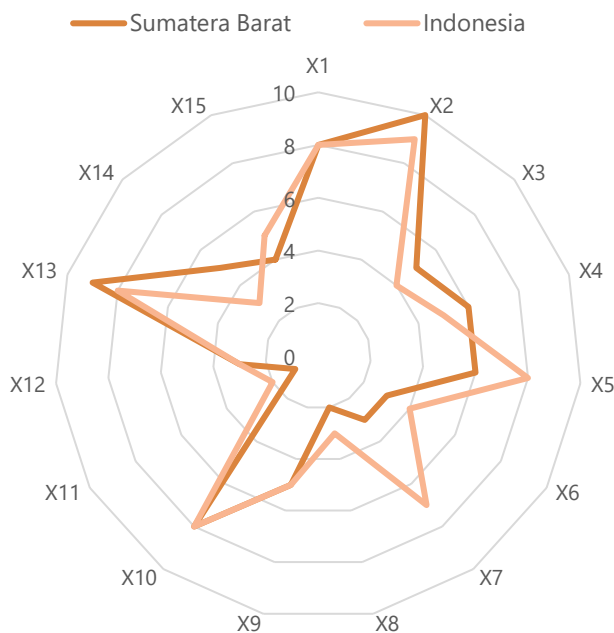
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatera Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.4 Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki sebanyak 1,7 juta total pemuda dengan komposisi 877 ribu laki-laki dan 845 ribu perempuan. Capaian pemuda Provinsi Riau mengalami peningkatan dengan nilai IPP meningkat lebih dari lima poin dari 50,67 di 2020 menjadi 56,17 di 2021.

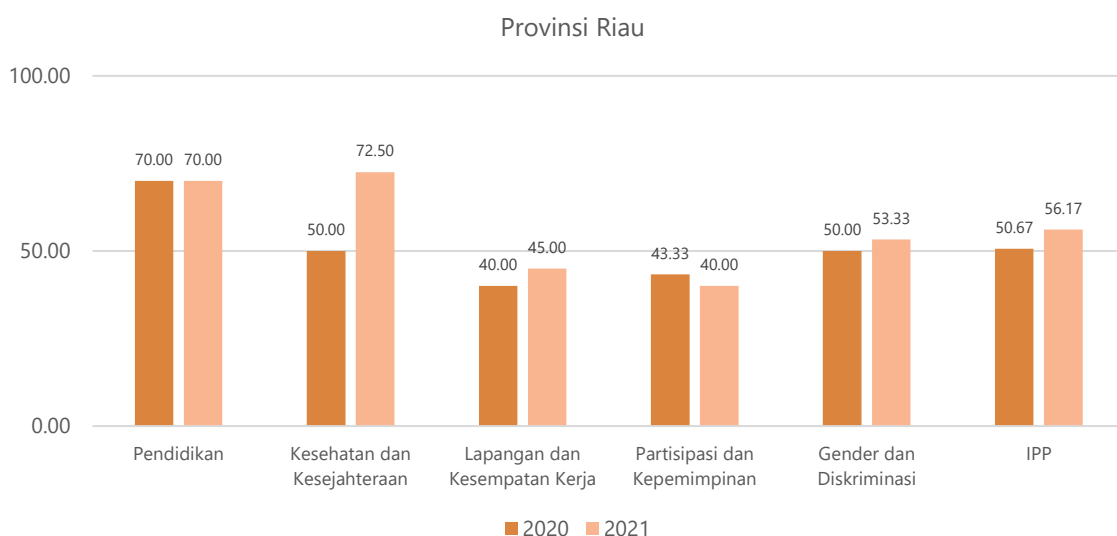
Perbaikan ini sangat besar didorong oleh peningkatan domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda yang naik signifikan dari 50 di 2020 menjadi 72.5 di 2021. Pada saat yang sama, peningkatan juga terjadi pada domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain gender dan diskriminasi. Namun, terdapat penurunan pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda dan stagnasi pada domain pendidikan.

Perbaikan domain kesehatan dan kesejahteraan didorong paling besar oleh turunnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil hingga mencapai 0% pada 2021. Jika tidak diperhatikan dan dijaga, capaian yang bagus ini bisa berubah kapan saja (meningkat) mengingat sifat dari indikator ini sangat fluktuatif tergantung dari situasi demografi seperti perkawinan usia anak. Sedangkan perbaikan pada domain lapangan dan kesempatan kerja didorong oleh turunnya tingkat pengangguran pemuda dari 12,76% di 2020 menjadi 10,81% di 2021.

Secara umum, capaian pemuda Provinsi Riau diberbagai domain relatif sama atau lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, terdapat beberapa tantangan terbesar capaian pemuda Provinsi Riau yakni pada indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang berada di bawah rata-rata nasional dan cenderung turun sejak 2020 (2,63%; nasional 4,84%). Tantangan selanjutnya yakni rendahnya persentase pemuda wirausaha kerah putih pada domain lapangan dan kesempatan kerja (0,35%; nasional 0,41%). Indikator lain yang perlu mendapat perhatian yakni persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang juga berada di bawah rata-rata nasional (20,97%; nasional 24%).

Gambar 10. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Riau pada 2021

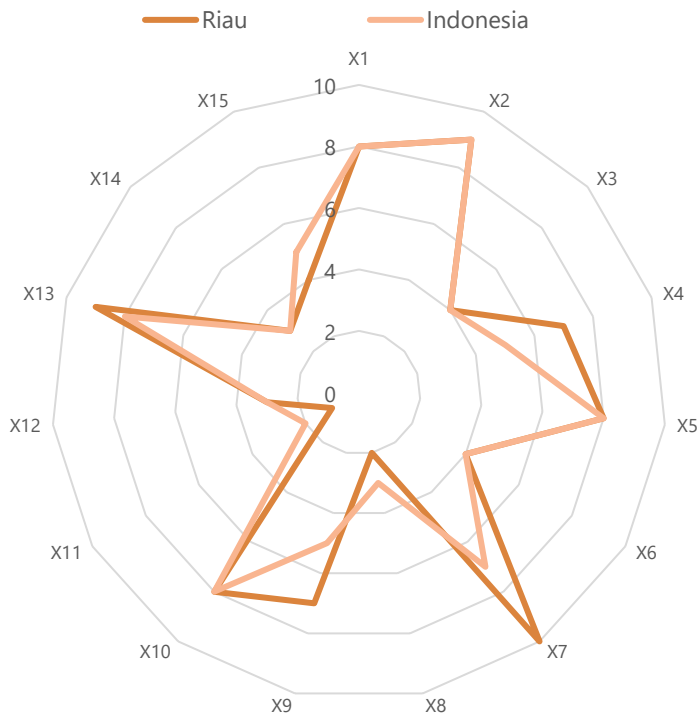
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Riau 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Riau dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Riau dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.5 Provinsi Jambi

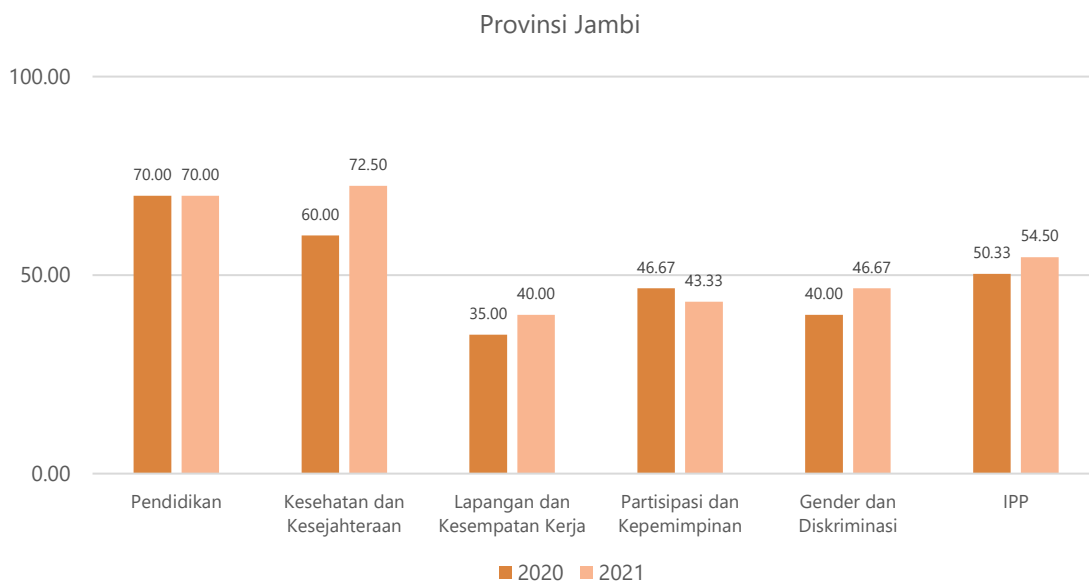
Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 889 ribu pemuda di Provinsi Jambi dengan komposisi sebanyak 444 ribu laki-laki dan 445 ribu perempuan. Provinsi Jambi mengalami perbaikan capaian pemuda pada tahun 2021 ditandai dengan peningkatan nilai IPP sebesar 4.2 poin dibanding 2020 (50.3 menjadi 54.5). Perbaikan didorong oleh peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, dan domain gender dan diskriminasi. Namun, terdapat penurunan pada domain partisipasi dan kepemimpinan, dan di periode yang sama nilai indeks pendidikan tidak mengalami perubahan.

Peningkatan dan perbaikan domain kesehatan dan kesejahteraan di dorong oleh turunnya angka kesakitan pemuda (5,21% pada 2020, 3,44% pada 2021), turunnya persentase pemuda merokok (24,63% pada 2020, 22,73% pada 2021), dan turunnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil (27% pada 2020, 11,66% pada 2021). Sama halnya pada perbaikan domain lapangan dan kesempatan kerja yang didorong oleh meningkatnya persentase pemuda wirausaha kerah putih (0,13% pada 2020, 0,25% pada 2021) dan turunnya tingkat pengangguran pemuda (12,82% pada 2020, 12,34% pada 2021). Namun, indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih provinsi Jambi masih berada jauh di bawah rata-rata nasional yang masih bisa ditingkatkan.

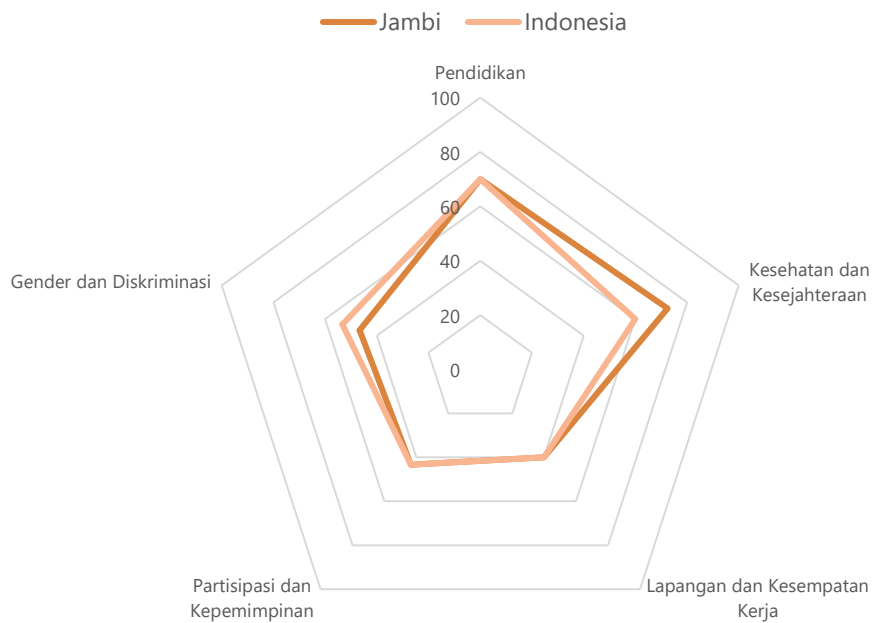
Salah satu tantangan pemuda di Provinsi Jambi yakni meningkatkan kembali persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi yang tahun sebelumnya termasuk sudah baik. Meskipun semua indikator pada domain gender dan diskriminasi membaik, tantangan lain yakni persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada di bawah rata-rata nasional.

Gambar 11. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi pada 2021

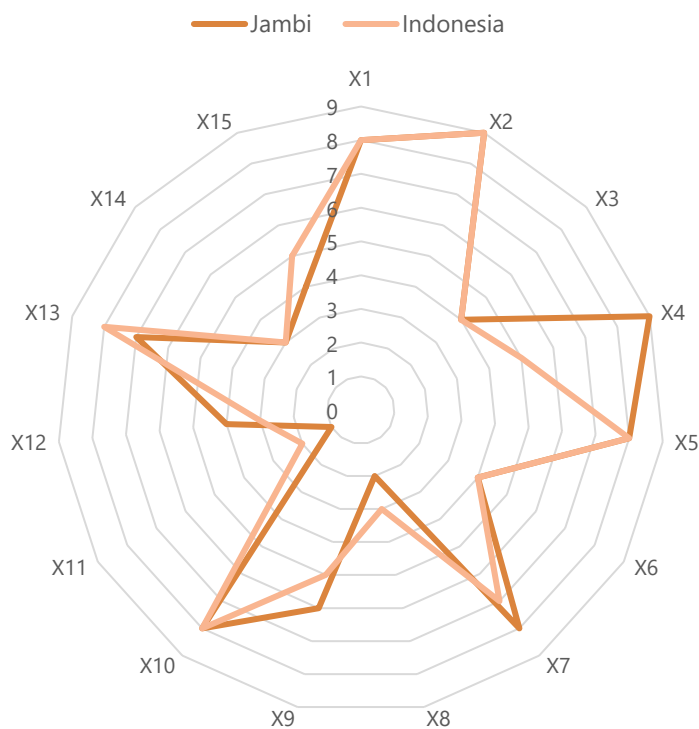
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jambi 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jambi dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jambi dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.6 Provinsi Sumatra Selatan

Provinsi Sumatra Selatan memiliki sebanyak 2,13 juta pemuda pada tahun 2021, dengan komposisi sebanyak 1,08 juta pemuda laki-laki dan 1,05 juta pemuda perempuan. Capaian pemuda Provinsi Sumatra Selatan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 (48,67 ke 48,33). Jika dilihat masing-masing domain, dua domain mengalami penurunan yakni domain lapangan dan kesempatan kerja (45 pada 2020; 40 pada 2021) dan domain partisipasi dan kepemimpinan (47,67 pada 2020; 36,67 pada 2021). Dua domain yang lain mengalami peningkatan yakni domain kesehatan dan kesejahteraan (45 pada 2020; 55 pada 2021) dan domain gender dan diskriminasi (40 pada 2020; 43,33 pada 2021). Sedangkan domain pendidikan cenderung tidak berubah.

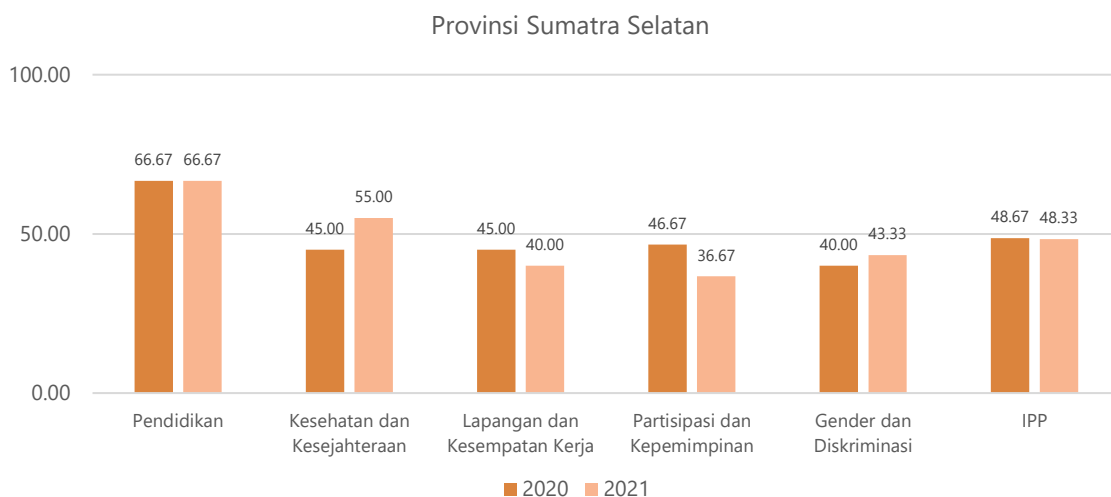
Perbaikan domain kesehatan dan kesejahteraan lebih besar didorong oleh turunnya persentase remaja perempuan yang sedang hamil dari 33,84% pada 2020 menjadi 17,27% pada 2021. Meskipun indikator lain pada domain yang sama sedikit membaik (persentase pemuda korban kejahatan dan persentase pemuda yang merokok), namun angka kesakitan pemuda mengalami peningkatan (7,55% pada 2020 menjadi 10,25% pada 2021). Sedangkan, perbaikan pada domain gender dan diskriminasi didorong oleh perbaikan pada semua indikatornya.

Penurunan capaian domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan terdorong oleh terjadinya penurunan capaian pada hampir di semua indikatornya (kecuali tingkat pengangguran pemuda yang sedikit menurun).

Meskipun terjadi beberapa perbaikan pada domain dan indikator, provinsi Sumatra Selatan memiliki tantangan untuk meningkatkan capaian pembangunan pemuda hampir di semua domain. Selain domain lapangan dan kesempatan kerja, empat domain kepemudaan yang lain di Provinsi Sumatra Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Jika dilihat per indikator, selain indikator tingkat pengangguran pemuda, hampir seluruh indikator berada di bawah rata-rata nasional.

Gambar 12. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Selatan pada 2021

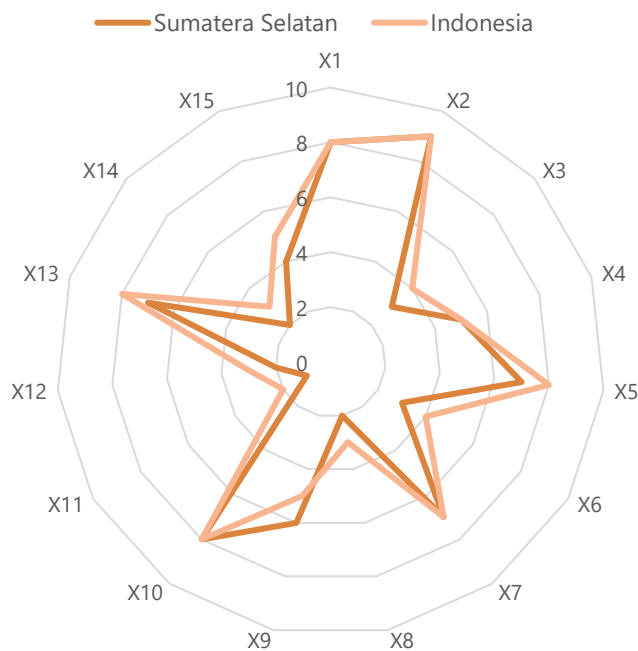
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatra Selatan 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.7 Provinsi Bengkulu

Jumlah pemuda di Provinsi Bengkulu tahun 2021 yakni sebesar 479 ribu dengan komposisi 245 ribu pemuda laki-laki dan 234 ribu pemuda perempuan. Capaian indeks pembangunan pemuda Provinsi Bengkulu meningkat dari 50,83 di 2020 menjadi 53,17 di 2021. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan pada capaian tiga domain yakni domain kesehatan dan kesejahteraan (naik dari 42,5 menjadi 52,5), domain lapangan dan kesempatan kerja (naik dari 45 menjadi 50), dan domain gender dan diskriminasi (naik dari 46,67 menjadi 50). Perbaikan capaian IPP sedikit terhambat karena terjadi penurunan pada capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda (dari 46,67 menjadi 40).

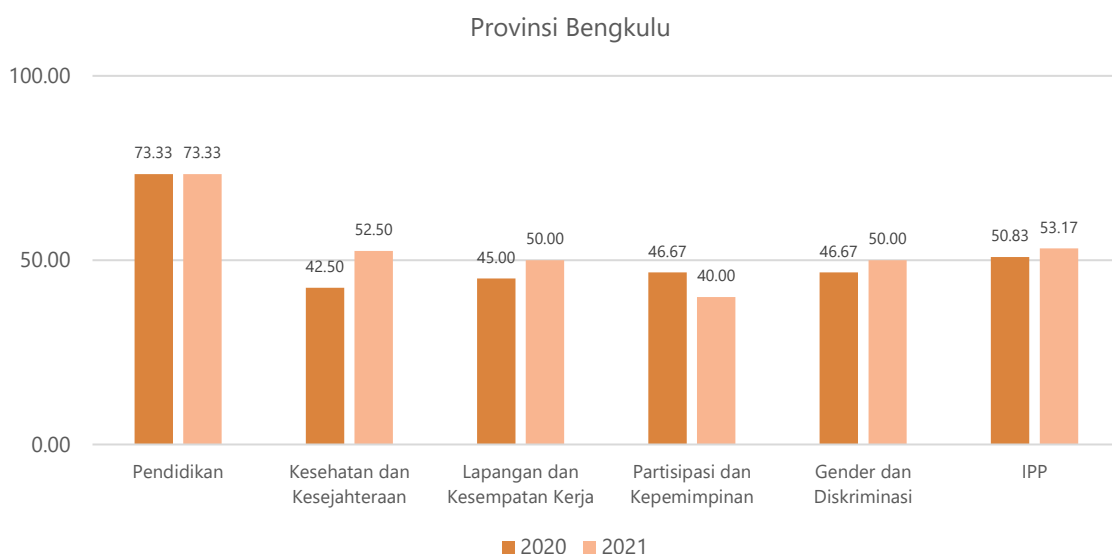
Secara umum, capaian empat domain IPP Provinsi Bengkulu secara relatif sama atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Provinsi Bengkulu perlu memberikan perhatian pada domain yang terakhir ini. Meskipun capaian domain kesehatan kesejahteraan membaik di 2021, namun capaian tiga indikator pembentuk domain tersebut (persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil) masih berada di bawah rata-rata nasional.

Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Penurunan capaian domain ini tercermin dari penurunan semua indikator pembentuk domain (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat).

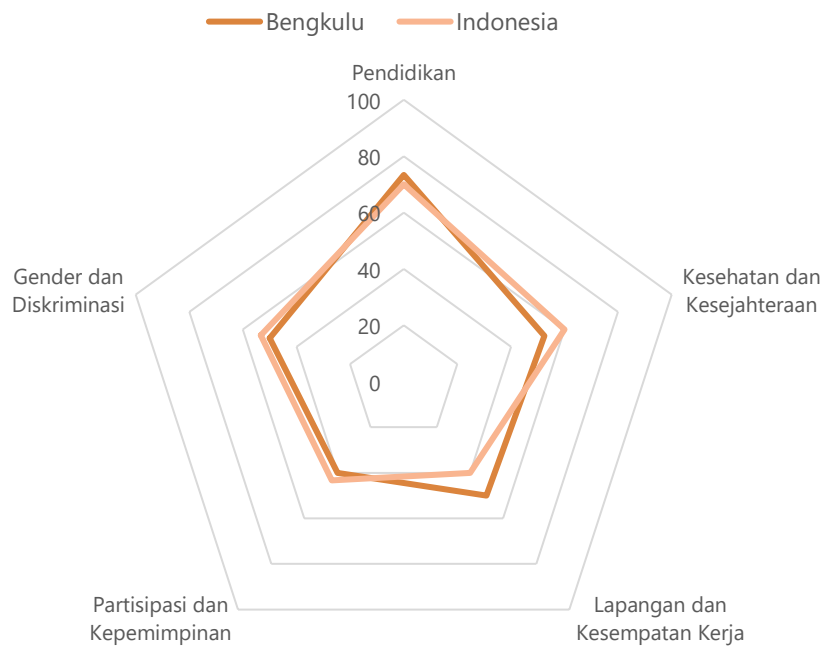
Perhatian lain juga diperlukan pada beberapa indikator lain yang berada di bawah rata-rata nasional yakni angka perkawinan usia anak (11,93%; nasional 9,23) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,36; nasional 24%).

Gambar 13. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu pada 2021

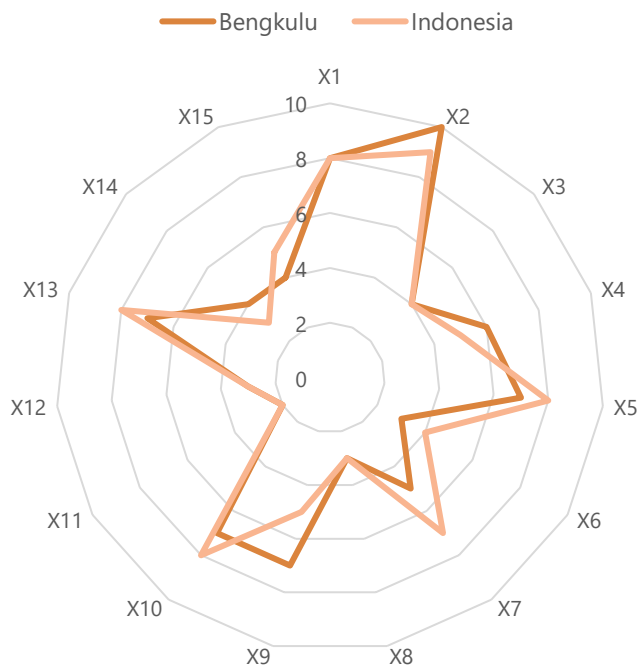
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Bengkulu 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Bengkulu dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Bengkulu dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.8 Provinsi Lampung

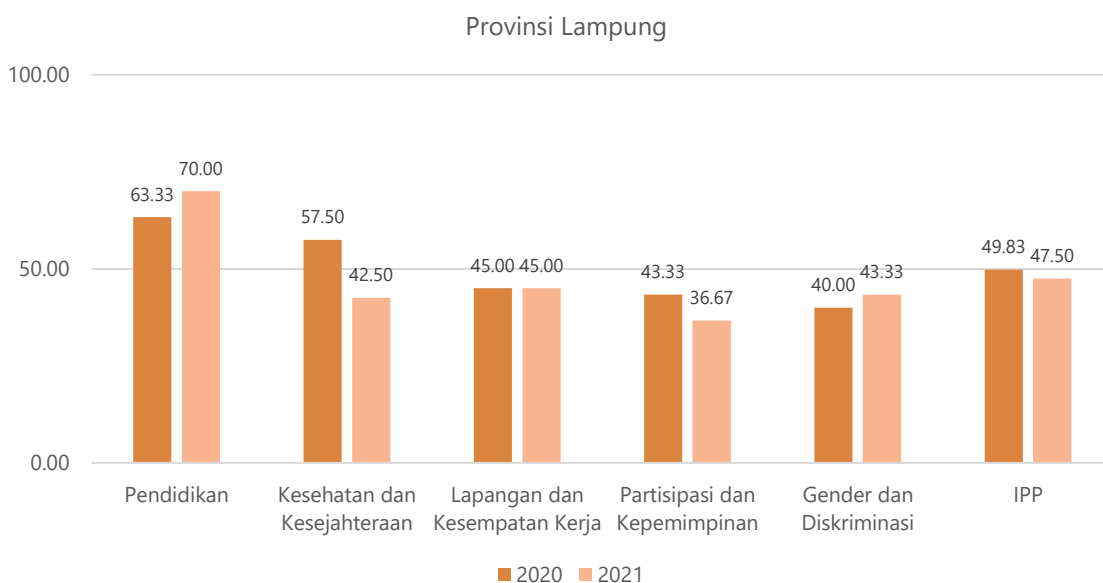
Provinsi Lampung memiliki sebanyak kurang lebih 2,03 juta pemuda dengan komposisi sebanyak 993 ribu pemuda perempuan dan sebanyak 1,04 pemuda laki-laki. Capaian IPP Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 49,83 di 2020 menjadi 47,50 di 2021. Penurunan ini didorong oleh penurunan yang cukup tajam pada domain kesehatan dan kesejahteraan (dari 57,5 di 2020 menjadi 42,5 di 2021). Penurunan juga terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda dari 43,33 di 2020 menjadi 36,67 di 2021. Namun, peningkatan capaian terjadi pada domain pendidikan (63,33 menjadi 70) dan juga pada domain gender dan diskriminasi (40 menjadi 43,33).

Peningkatan capaian domain pendidikan didorong oleh peningkatan indikator rata-rata lama sekolah (mencapai 10,53 tahun) dan APK sekolah menengah (mencapai 97,71%). Namun, indikator APK Perguruan Tinggi Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan karena berada di bawah rata-rata nasional (Lampung 22,64%; Nasional 31,19%). Sedangkan peningkatan pada domain gender dan diskriminasi didorong oleh perbaikan capaian pada ketiga indikatornya. Namun, capaian domain gender dan diskriminasi masih berada di bawah rata-rata nasional (Lampung 43,33; Nasional 53,33).

Provinsi Lampung perlu memberikan perhatian pada capaian indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil yang meningkat tajam di 2021 (mencapai 49%) yang menyebabkan penurunan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, penurunan juga terjadi pada capaian semua indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang menurun pada 2021 sehingga berada di bawah rata-rata nasional.

Gambar 14. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung pada 2021

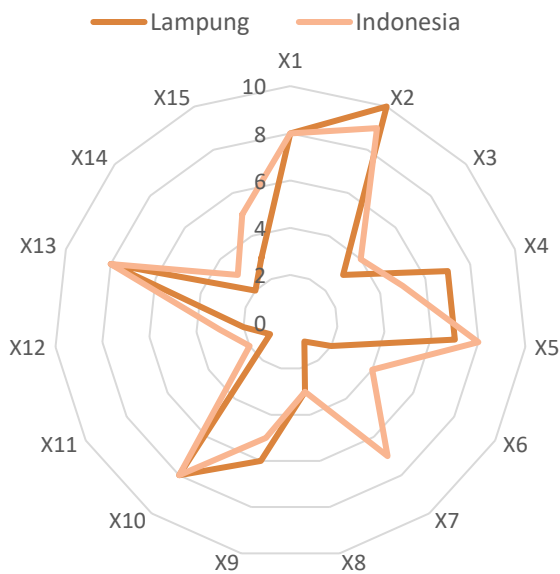
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Lampung 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Lampung dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Lampung dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung memiliki jumlah pemuda sebesar 363 ribu dengan komposisi sebanyak 184 ribu laki-laki dan 179 ribu perempuan. Capaian pemuda Provinsi Bangka Belitung mengalami sedikit penurunan dari 48.83 pada 2020 menjadi 48.17 pada tahun 2021. Penurunan ini didorong oleh penurunan capaian pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Hanya satu domain yang mengalami perbaikan capaian yakni domain gender dan diskriminasi. Sedangkan tiga domain yang lain tidak terdapat perubahan.

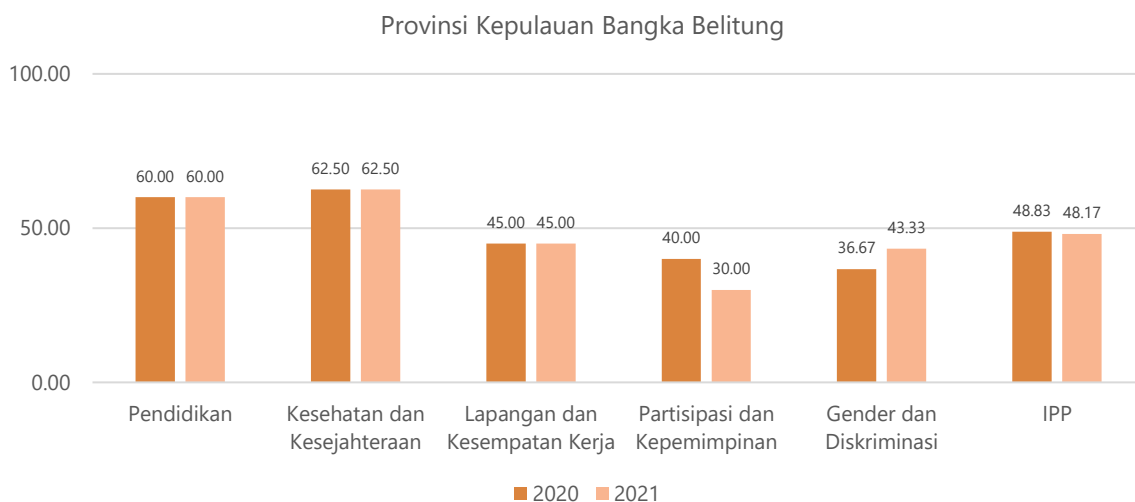
Penurunan domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh turunnya dua indikatornya hingga berada di bawah rata-rata nasional. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan turun dari 76,4% di 2020 menjadi 58,89% di 2021. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi juga turun dari 4,57% di 2020 menjadi 2,68% pada 2021. Akan tetapi, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat sedikit meningkat dari 2,62% menjadi 2,63% di 2021.

Sedangkan perbaikan pada domain gender dan diskriminasi didorong oleh perbaikan pada dua indikator yakni pertama, turunnya angka perkawinan anak dari 18,76% menjadi 14,05% di 2021. Kedua, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal meningkat dari 23,65% di 2020 menjadi 25,65% di 2021. Namun, terdapat sedikit penurunan pada persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas (33,19% di 2020; 32,61% di 2021).

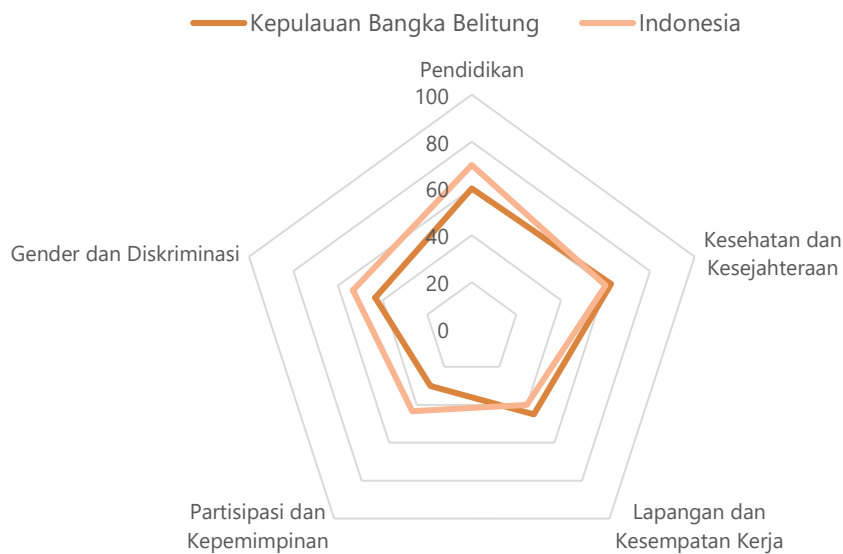
Selain dua domain yakni domain kesehatan dan kesejahteraan dan domain lapangan dan kesempatan kerja, tantangan Provinsi Bangka Belitung yakni pada tiga domain lainnya yang berada di bawah rata-rata nasional. Pada domain Pendidikan, indikator APK Perguruan Tinggi masih relatif rendah dibandingkan nasional (22,64%; Nasional 31,19%). Sedangkan pada domain partisipasi dan kepemimpinan dan domain gender dan diskriminasi, hampir semua indikatornya berada di bawah rata-rata nasional.

Gambar 15. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bangka Belitung pada 2021

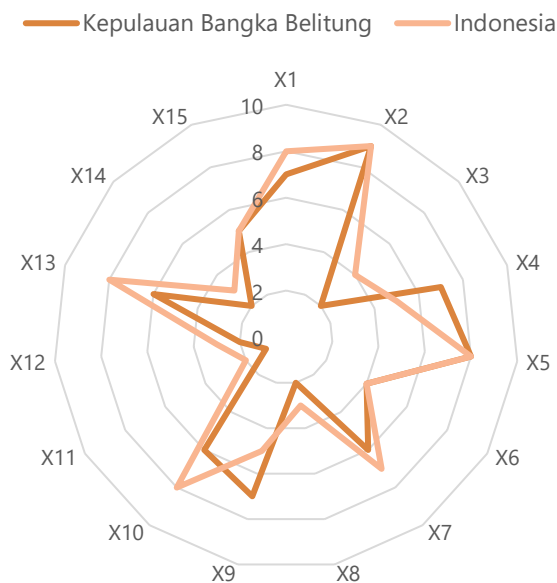
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Bangka Belitung 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Bangka Belitung dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.10 Provinsi Kepulauan Riau

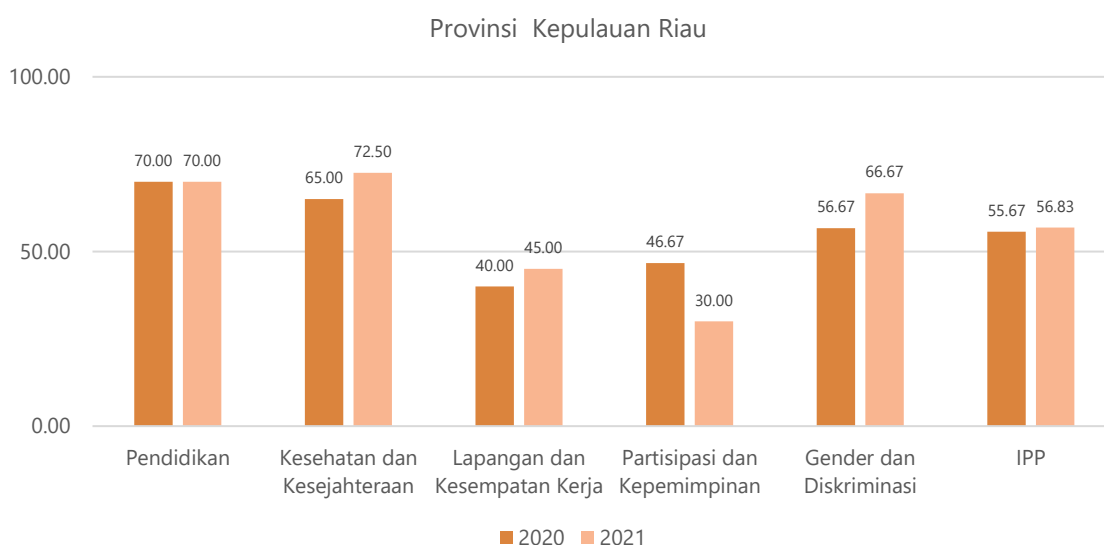
Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 595 ribu pemuda yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah pemuda perempuan sebanyak 312 ribu dan dengan jumlah pemuda laki-laki sebanyak 283 ribu. Capaian IPP Provinsi Kepulauan Riau mengalami perbaikan dengan naik satu poin dari 55.67 pada tahun 2020 menjadi 56.83 pada 2021. Perbaikan ini disumbang oleh peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan (naik 7 poin), domain lapangan dan kesempatan kerja (naik 5 poin), dan domain gender dan diskriminasi (naik 10 poin). Perbaikan IPP Provinsi Kepulauan Riau akan jauh lebih baik jika domain partisipasi dan kepemimpinan tidak turun. Domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan yang cukup tajam (turun 16 poin).

Secara umum, capaian pemuda Provinsi Kepulauan Riau berada di atas rata-rata nasional. Namun, dari lima domain, domain partisipasi dan kepemimpinan turun dan berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada dua indikator yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Untuk perbaikan capaian pemuda secara umum, Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan untuk mendorong peningkatan capaian domain partisipasi dan kepemimpinan.

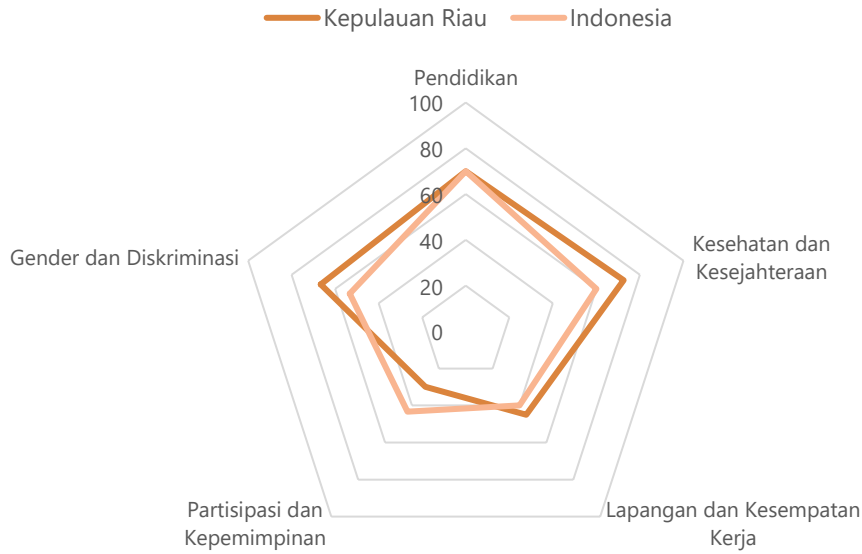
Selain itu, terdapat beberapa tantangan lain untuk meningkatkan capaian pemuda yang relatif sudah baik. Pertama, Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong peningkatan pada Angka Partisipasi Kasar pemuda di Perguruan Tinggi (27.6%) yang berada di bawah rata-rata nasional (31.2%). Kedua, Provinsi Kepulauan Riau juga perlu menurunkan persentase pemuda korban kejahatan (1.62%) yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (0.85%).

Gambar 16. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada 2021

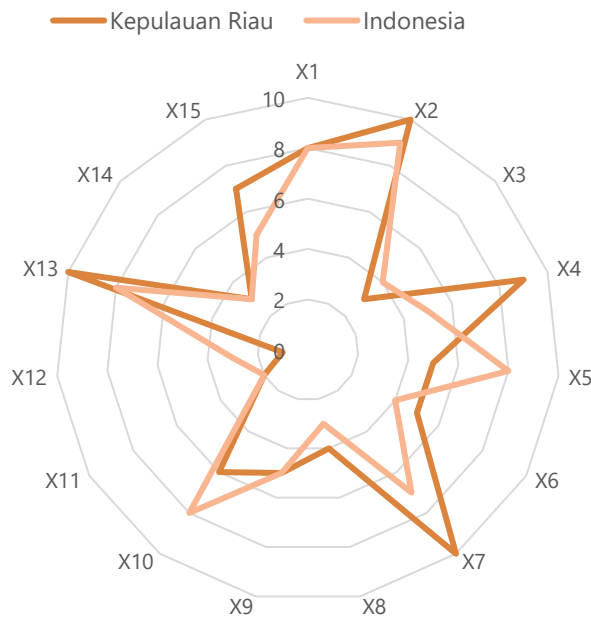
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Riau 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.11 Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 2.65 juta pemuda di Provinsi DKI Jakarta dengan sebaran 1,3 juta pemuda laki-laki dan 1,35 juta pemuda perempuan. Capaian IPP Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2021 (49.7) dibandingkan tahun 2020 (51). Kondisi ini menjadi penurunan ketiga kali berturut-turut sejak tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, nilai IPP tertarik turun oleh penurunan yang tajam dari domain Partisipasi dan Kepemimpinan dan penurunan sedikit pada domain Gender dan Diskriminasi.

Perbaikan domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh perbaikan hampir keempat indikator pembentuk domainnya. Selaras, perbaikan domain lapangan dan kesempatan kerja juga didorong oleh perbaikan di kedua indikatornya. Namun, tingkat pengangguran pemuda Provinsi DKI Jakarta (16,94%) masih relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pemuda secara nasional (14,42%).

Salah satu tantangan terbesar Provinsi DKI Jakarta yakni capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terendah dari semua provinsi. Penurunan drastis ini terjadi dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadi penurunan tajam pada indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (turun dari 73,5% di 2020 menjadi 37,1% di 2021) dan indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (turun dari 5,3% di 2020 menjadi 0,96% di 2021). Salah satu penjelasan sebab dari penurunan ini yakni pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia dan menurunkan intensitas pertemuan pemuda. Dan pada saat yang sama DKI Jakarta merupakan provinsi yang menjadi pusat dan awal mulanya pandemi serta menjadi provinsi yang paling terdampak.

Selain itu, terdapat satu indikator yang perlu mendapat perhatian yakni angka perkawinan usia anak yang meningkat dari 1,45% di 2020 menjadi 4,68% di 2021. Peningkatan angka perkawinan usia anak menyebabkan penurunan capaian domain gender dan diskriminasi Provinsi DKI Jakarta di 2021.

Gambar 17. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta pada 2021

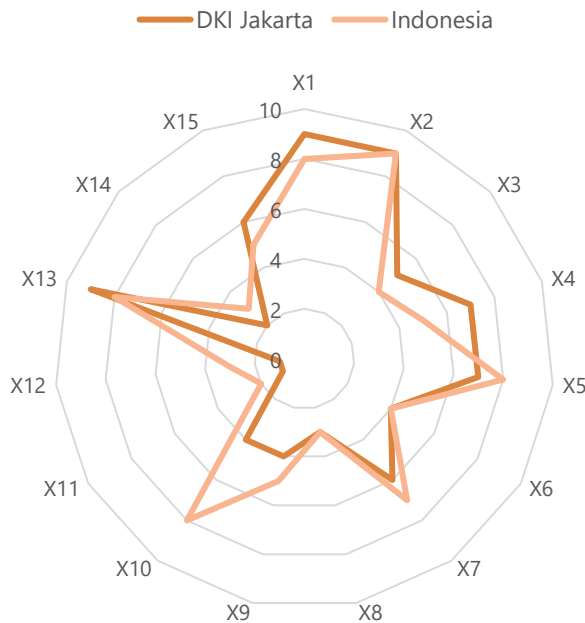
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi DKI Jakarta 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi DKI Jakarta dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi DKI Jakarta dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

3.12 Provinsi Jawa Barat

Jumlah Pemuda di Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai sekitar 12,3 juta jiwa (Statistik Pemuda, 2021). Pemuda di Jawa Barat memiliki nilai IPP sebesar 47,00 (Gambar 18, Panel a). Penurunan nilai IPP Jawa Barat disebabkan adanya penurunan pada domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain lapangan dan kesempatan kerja. Meskipun untuk domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan. Sementara itu domain pendidikan tidak mengalami perubahan.

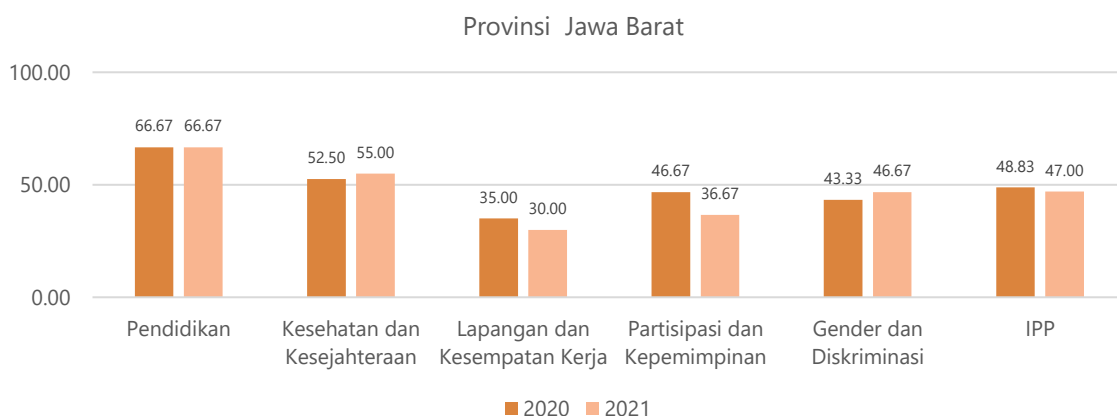
Jika membandingkan nilai domain IPP Jawa Barat dengan nasional seluruhnya berada di bawah domain rata-rata nasional (Gambar 18, Panel b). Nilai domain yang paling jauh dari nilai nasional adalah domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu sebesar 30 sementara angka nasional 40. Sementara domain yang tidak jauh dari nasional adalah domain Pendidikan, dimana secara rata-rata nasional nilai domain pendidikan adalah 70 sementara untuk Jawa Barat sebesar 67. Sementara untuk domain kesehatan dan kesejahteraan berada 5 poin dibawah nasional, dan untuk domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi keduanya berada 6 poin di bawah nasional.

Perbandingan dengan nilai transformasi indikator tingkat nasional (Gambar 18, Panel c), terdapat 7 indikator yang memiliki nilai sama dengan nasional. Tujuh indikator yang sama dengan nasional adalah rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih, pemuda yang memberikan pendapat dalam rapat, dan pemuda perempuan yang bekerja di sector formal. Sementara domain lainnya berada di bawah nasional.

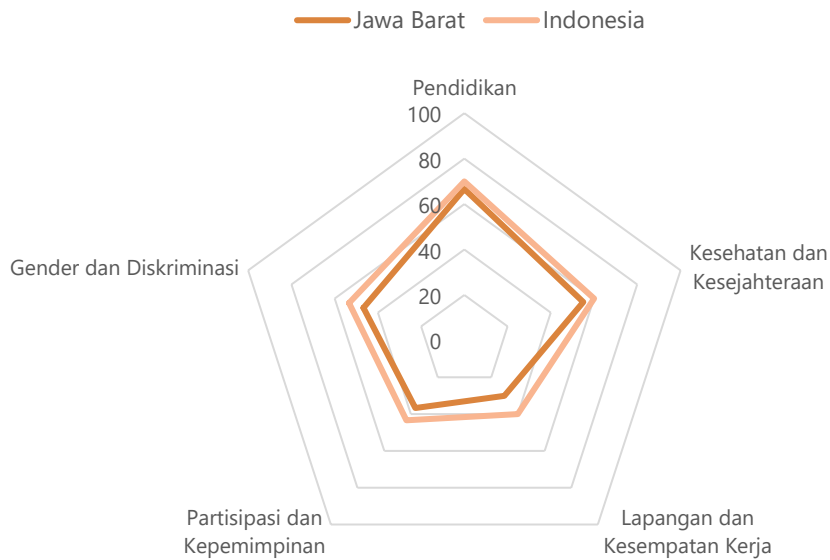
Hasil dari perhitungan IPP, domain, serta nilai transformasi perlu adanya upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda di Jawa Barat. TPT Pemuda di Jawa Barat sangat tinggi yaitu sebesar 20,79 persen jauh diatas nilai nasional yang hanya 14,42 persen. Lapangan pekerjaan bagi pemuda yang sesuai dengan karakteristik pemuda di Jawa Barat sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja khususnya pemuda di Jawa Barat.

Gambar 18. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada 2021

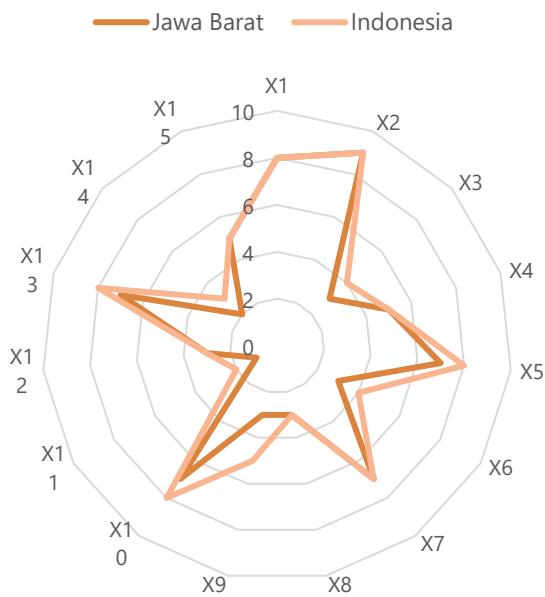
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.13 Provinsi Jawa Tengah

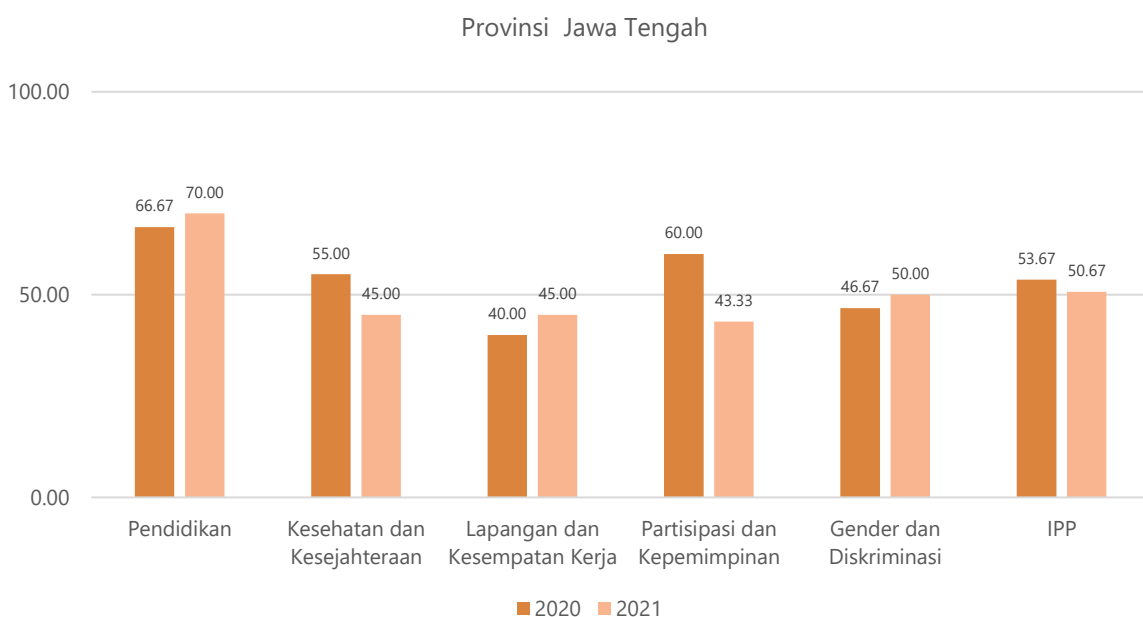
Pada tahun 2021 jumlah pemuda di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 7,7 juta jiwa dengan perkiraan pemuda laki-laki 6.298.280 jiwa dan perempuan 6.063.43 jiwa (Statistik Pemuda, 2021). Nilai IPP Pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 50,67 menempati peringkat ke 21 secara nasional (Gambar 19, panel a), nilai IPP Jawa Tengah turun 3 poin dari nilai IPP tahun 2020. Nilai IPP yang menurun dikarenakan adanya penurunan pada domain kesehatan dan kesejahteraan (10 poin) serta partisipasi dan kepemimpinan (16,7 poin). Meskipun sebenarnya terjadi peningkatan pada domain pendidikan (3,33 poin), lapangan dan kesempatan kerja (5 poin), dan gender dan diskriminasi (3,33 poin) namun belum mampu meningkatkan IPP Jawa Tengah.

Jika dilihat berdasarkan nilai indeks domain yang berada di atas nilai nasional hanya lapangan dan kesempatan kerja. Sementara untuk kesehatan dan kesejahteraan, gender dan diskriminasi berada di bawah nasional. Selain itu domain pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan memiliki nilai yang sama dengan nasional.

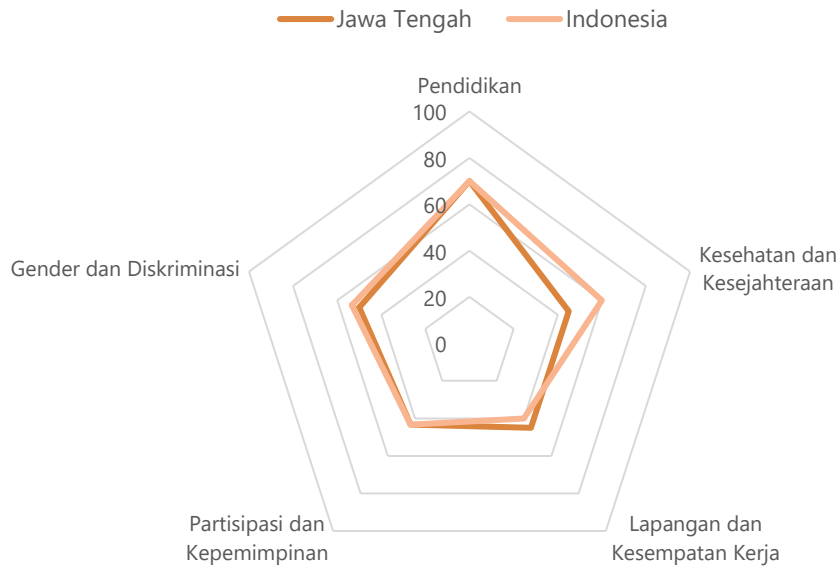
Jawa tengah memiliki nilai transformasi indikator yang lebih tinggi dari nasional pada indikator APK sekolah menengah dan TPT pemuda. APK sekolah menengah Jawa Tengah 90,26 persen sementara rata-rata nasional 88,93 persen dan untuk TPT Pemuda Jawa Tengah 13,24 persen rata-rata nasional 14,42 persen. Sementara untuk persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Jawa Tengah cukup jauh di atas nasional yaitu 23,71 persen sementara nasional 16,97 persen. Perlu upaya lebih untuk dapat mengendalikan laju dari persentase remaja perempuan yang sedang hamil karena nilai ini meningkat dari 2020 yang hanya 13,99 persen.

Gambar 19. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah pada 2021

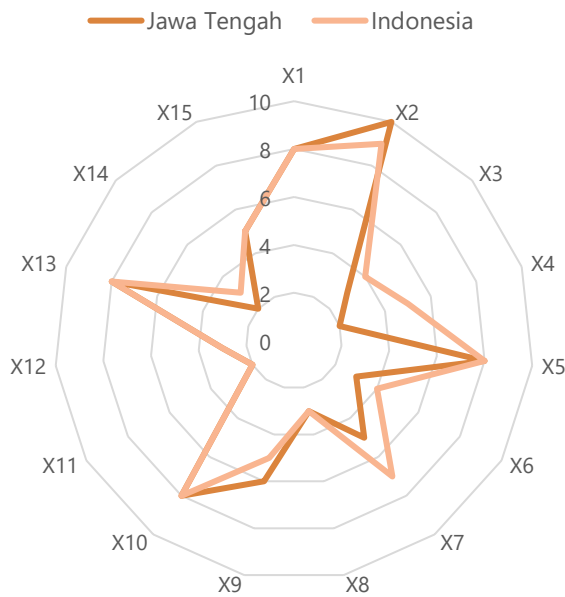
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Tengah 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.14 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

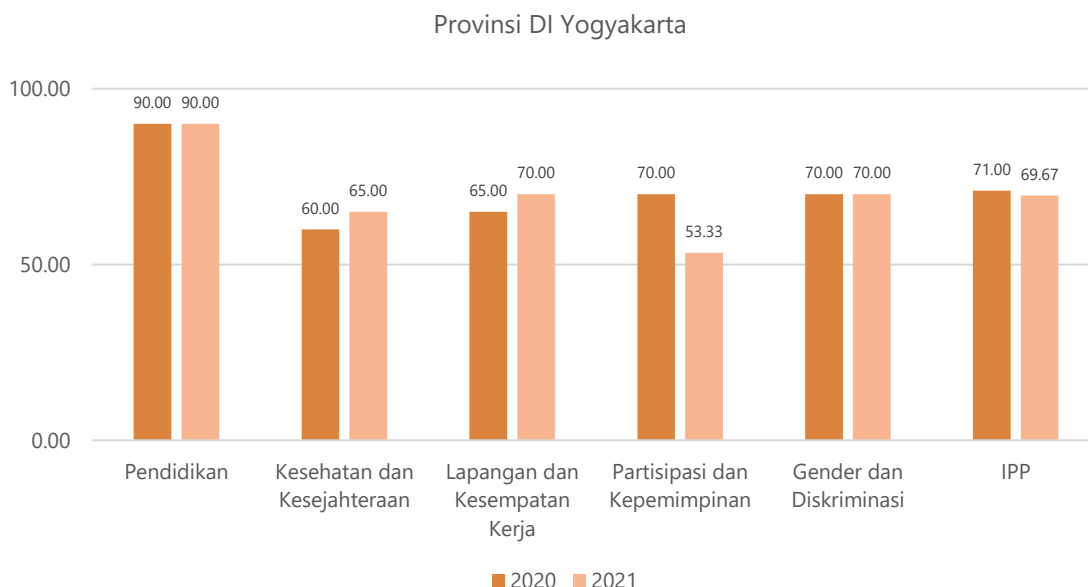
Provinsi DIY pada tahun 2021 memiliki jumlah pemuda sekitar 920.940 jiwa dengan perkiraan jumlah pemuda laki-laki 462.210 dan 458.730 perempuan. Pemuda di DIY memiliki nilai IPP 69,67 yang menempati peringkat pertama secara nasional. Nilai IPP DIY mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1,33 poin. Jika dilihat berdasarkan domain penurunan terbesar terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang turun 13,3 poin. Sementara terjadi peningkatan 5 poin pada domain kesehatan dan kesejahteraan dan lapangan dan kesempatan kerja. Sementara domain pendidikan serta gender dan diskriminasi mengalami stagnansi sejak 2020.

Nilai indeks domain provinsi DIY jika dibandingkan dengan nasional seluruhnya berada di atas nasional. Indeks domain tertinggi adalah domain pendidikan yaitu 90 sementara nilai nasional hanya 70 dan domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu 70 sementara nasional hanya 40.

Sejalan dengan nilai indeks domain, tidak ada nilai transformasi indikator yang berada di bawah nasional. Jika dilihat perbedaan tertinggi ada pada indikator APK perguruan tinggi. Sementara angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang merokok, dan persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sama dengan nilai nasional. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik pada setiap domain agar Provinsi DIY dapat meningkatkan IPP pada tahun selanjutnya.

Gambar 20. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DI Yogyakarta pada 2021

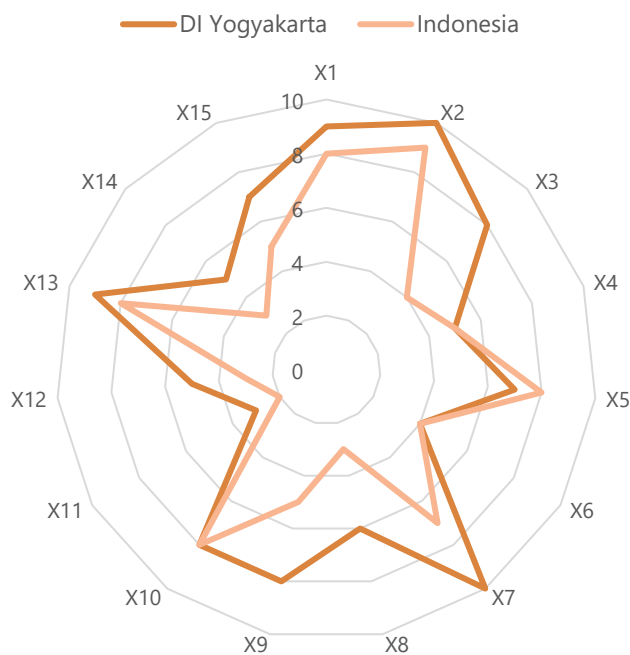
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi DI Yogyakarta 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

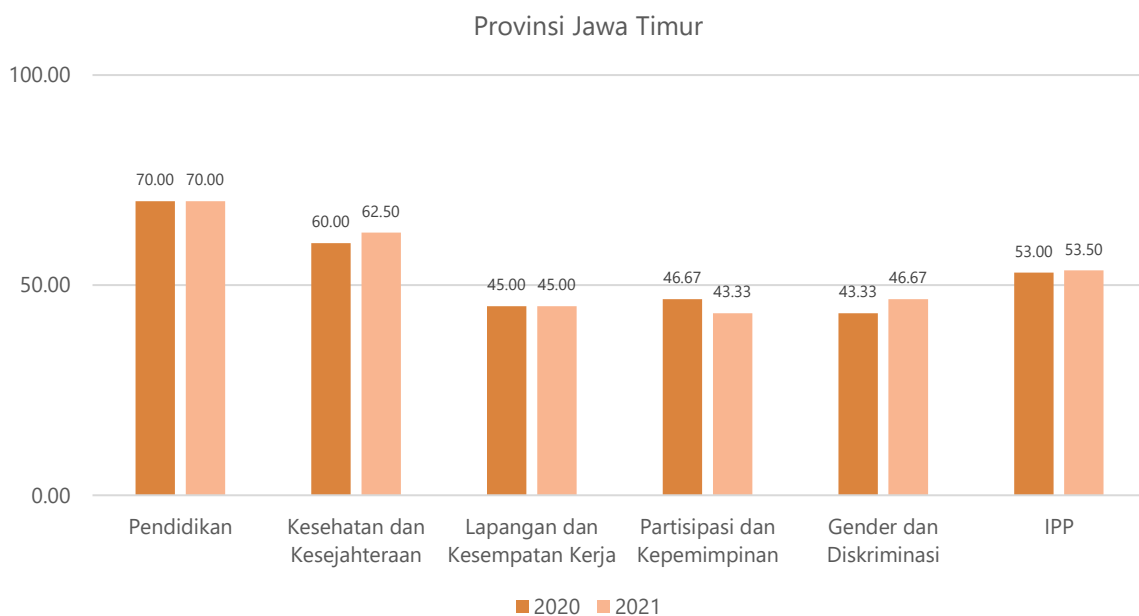
3.15 Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 memiliki jumlah pemuda 8.711.230 jiwa dengan jumlah pemuda laki-laki 4.338.280 jiwa dan 4.372.950 jiwa perempuan. Nilai IPP Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 3 poin dari 2020 ke 2021 dan berada pada peringkat 11 secara nasional. Peningkatan IPP Jawa Timur disebabkan adanya peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta gender dan diskriminasi. Sementara stagnansi terjadi pada domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja. Hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami penurunan.

Jika membandingkan nilai domain Provinsi Jawa Timur dengan nasional domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja berada di atas nasional. Sementara untuk domain pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan memiliki nilai yang sama dengan nasional. Namun, nilai domain gender dan diskriminasi berada di bawah nilai nasional, yaitu 47 untuk Jawa Timur dan 53 untuk nasional. Perbedaan pada domain gender dan diskriminasi paling tinggi pada indikator angka perkawinan usia anak 10,44 persen sementara rata-rata nasional 9,23 persen. Sebenarnya Provinsi Jawa Timur sudah berhasil menurunkan indikator angka perkawinan usia anak yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 10,67 persen. Namun masih di atas rata-rata nasional, perlu adanya upaya lebih untuk mengurangi angka perkawinan anak di Jawa Timur.

Gambar 21. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur pada 2021

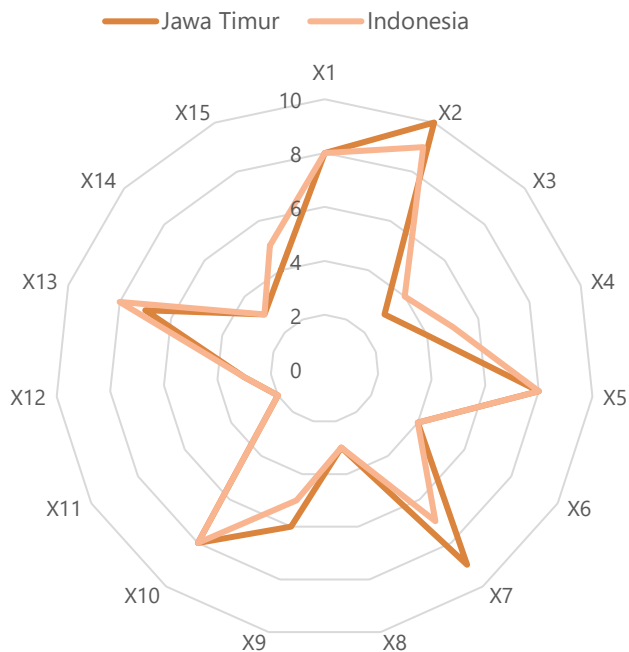
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Timur 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.16 Provinsi Banten

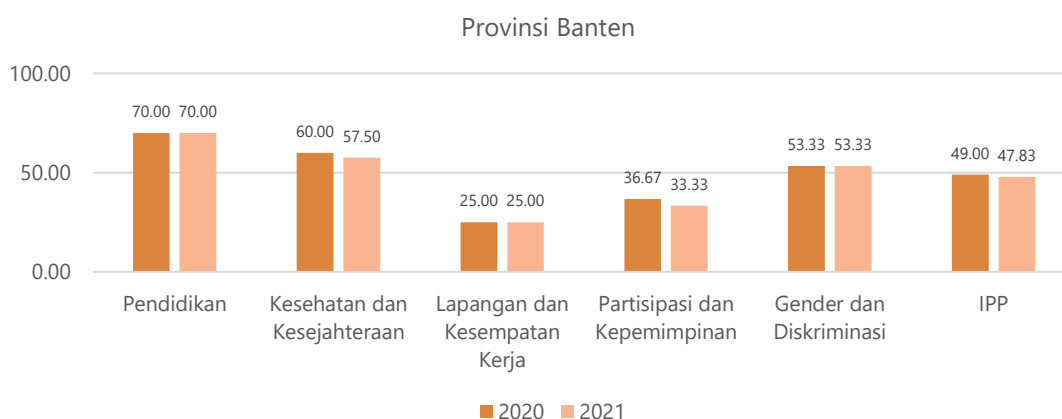
Jumlah pemuda Provinsi Banten pada tahun 2021 diperkirakan 3.276.700 jiwa dengan perkiraan 1.663.050 jiwa laki-laki dan 1.613.650 jiwa perempuan. Provinsi Banten memiliki nilai IPP sebesar 47,83 turun sebesar 1,2 poin dari 2020. Provinsi Banten berada pada peringkat 32 nasional. Penurunan IPP Banten dikarenakan adanya penurunan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, dan partisipasi dan kepemimpinan. Namun, tidak ada domain yang meningkat.

Jika membandingkan antara indeks domain provinsi banten dan nasional, indeks domain lapangan dan kesempatan kerja provinsi banten berada 15 poin di bawah nasional, yaitu 25 untuk provinsi banten sementara secara nasional sudah mencapai 40. Indeks domain lainnya adalah partisipasi dan kepemimpinan berada 10 poin di bawah nasional, yaitu 33 untuk provinsi banten dan 43 untuk nasional. Sementara untuk kesehatan dan kesejahteraan provinsi banten sedikit berada di bawah nasional yaitu 58 dan nasional 60. Indeks domain pendidikan serta gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan nasional. Indeks domain yang berada paling jauh di bawah nasional adalah domain lapangan dan kesempatan kerja. Indikator TPT Pemuda Provinsi Banten cukup tinggi yaitu 19,97 persen sementara nilai nasional 14,42 persen. Namun sebenarnya TPT Pemuda Provinsi Banten telah menurun dari tahun 2020 yang sebesar 22,06 persen. Perlu adanya upaya lebih agar penyerapan tenaga kerja pemuda di Provinsi Banten agar tingkat pengangguran terbuka pemuda dapat terus menurun.

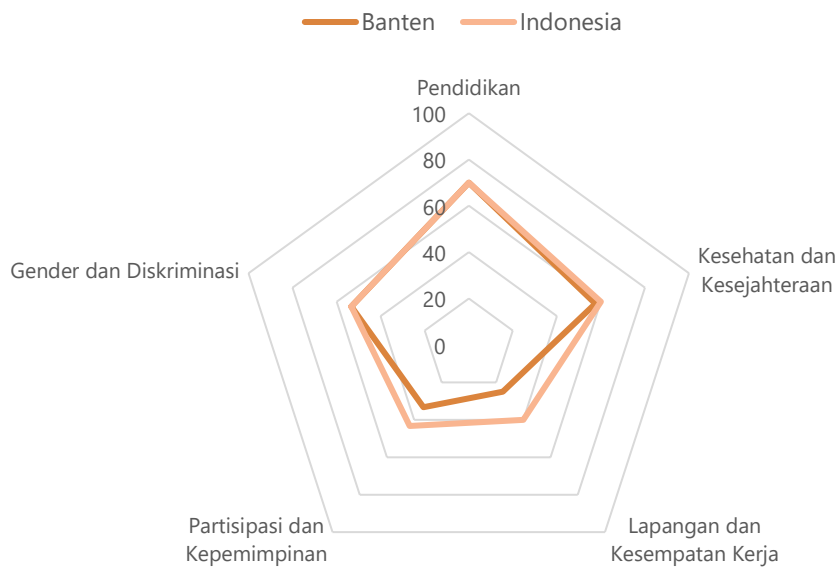
Berdasarkan nilai transformasi indikator TPT berada paling jauh di bawah nasional. Namun, sebanyak 8 indikator berada di bawah nasional. Perlu adanya peningkatan pada 8 indikator untuk provinsi banten, terutama TPT pemuda yang berbeda 2 poin dengan nasional. Sementara nilai transformasi indikator provinsi banten untuk rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, APK perguruan tinggi, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal memiliki nilai yang sama dengan nasional. Nilai transformasi indikator yang berada di atas nasional ada dua yaitu persentase pemuda korban kejahatan dan angka perkawinan usia anak.

Gambar 22. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Banten pada 2021

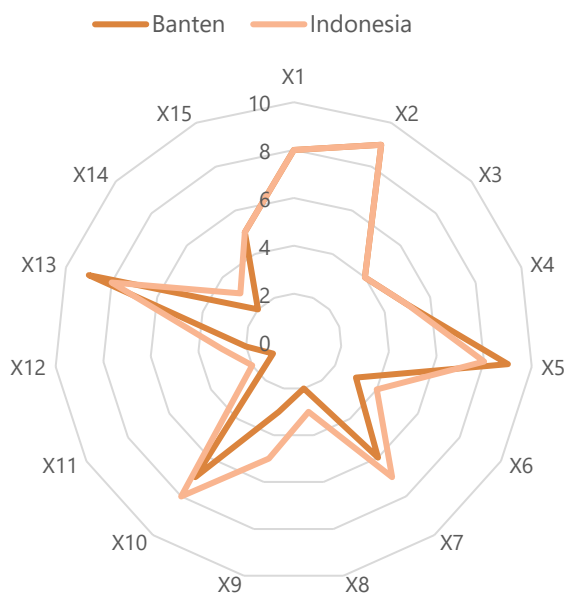
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Banten 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Banten dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Banten dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.17 Provinsi Bali

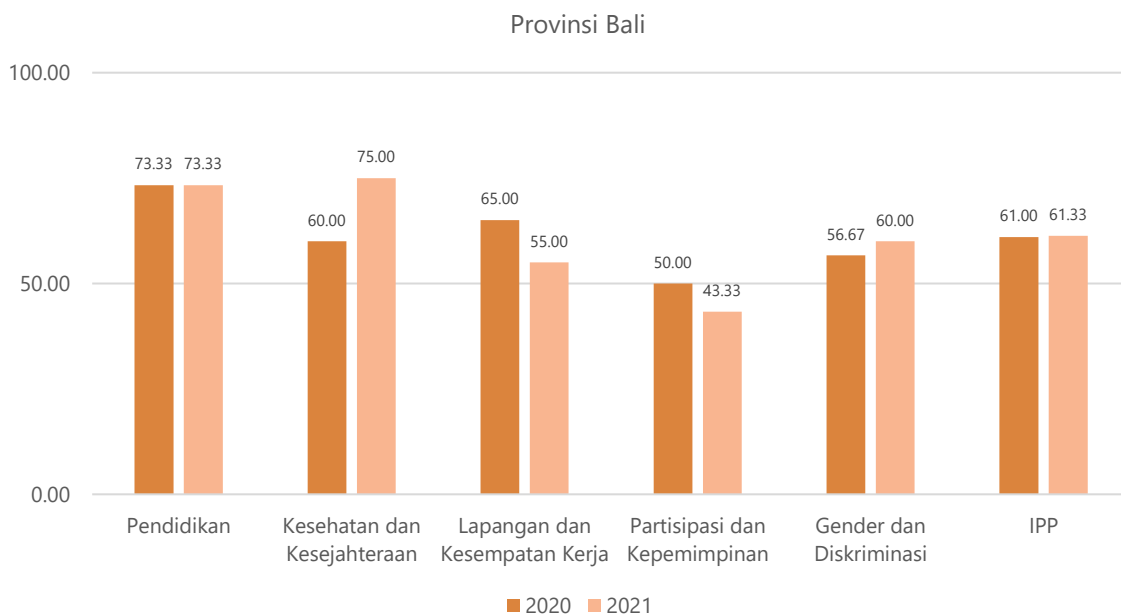
Provinsi Bali pada tahun 2021 memiliki jumlah pemuda 1.049.200 jiwa dengan perkiraan 534.530 jiwa laki-laki dan 514.680 jiwa perempuan. Pada tahun 2021 nilai IPP Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 0.33 poin dari tahun 2020, yaitu sebesar 61,33 yang berada pada peringkat 2 secara nasional. Peningkatan paling tinggi terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan, dari 60,00 di 2020 menjadi 75,00 pada 2021. Peningkatan juga terjadi pada domain gender dan diskriminasi dari 56,67 menjadi 60,00. Namun, ada 2 domain yang mengalami penurunan yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Penurunan paling tinggi ada pada domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu turun sebesar 10 poin. Sementara untuk domain pendidikan mengalami stagnansi.

Nilai indeks domain provinsi Bali sebagian besar berada di atas nilai nasional, hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang memiliki nilai yang sama dengan nasional. Indeks yang berada jauh di atas nasional adalah lapangan dan kesempatan kerja, provinsi Bali berada 15 poin di atas nasional. Provinsi Bali berhasil menurunkan TPT Pemuda dari 11,05 persen di 2020 menjadi 9,47 persen di tahun 2021.

Sementara jika melihat nilai transformasi indikator provinsi hanya indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat yang berada satu poin di bawah nasional.

Gambar 23. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bali pada 2021

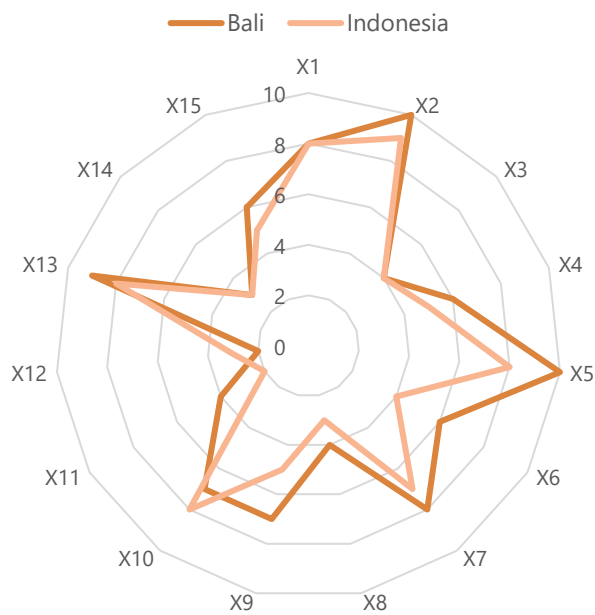
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Bali 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Bali dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Bali dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

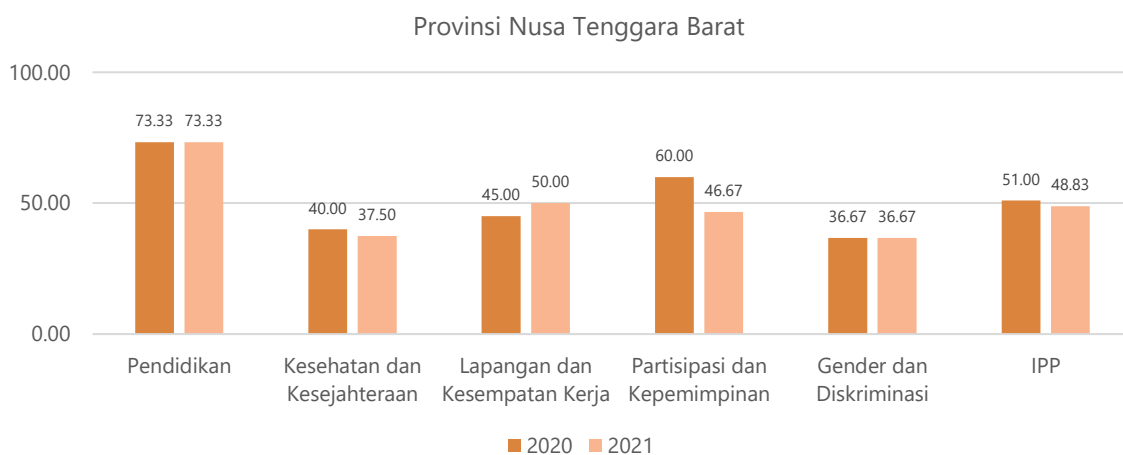
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah pemuda sekitar 1,2 juta jiwa pada tahun 2021 dengan perkiraan jumlah pemuda laki-laki 632 ribu jiwa dan 642 ribu jiwa perempuan. Nilai IPP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 adalah 48,83 berada pada peringkat 28 nasional. Penurunan nilai IPP dari 2020 sebesar 2,71 poin disebabkan adanya penurunan indeks domain dengan nilai terbesar ada pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang turun sebesar 13,33 poin. Penurunan juga terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan. Sementara untuk domain pendidikan, gender dan diskriminasi mengalami stagnansi.

Indeks domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan memiliki nilai di atas nasional. Sementara indeks kesehatan dan kesejahteraan serta gender dan diskriminasi berada di bawah nilai nasional. Indeks yang berada jauh di bawah nasional adalah indeks kesehatan dan kesejahteraan, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai 38 sementara nasional 60, berada 23 poin di bawah nasional. Indikator yang perlu perhatian pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan adalah persentase remaja perempuan yang sedang hamil (23,41 persen) berada jauh di atas nasional (16,97 persen). Selain itu indikator angka perkawinan anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (16,59 persen) juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional (9,23 persen).

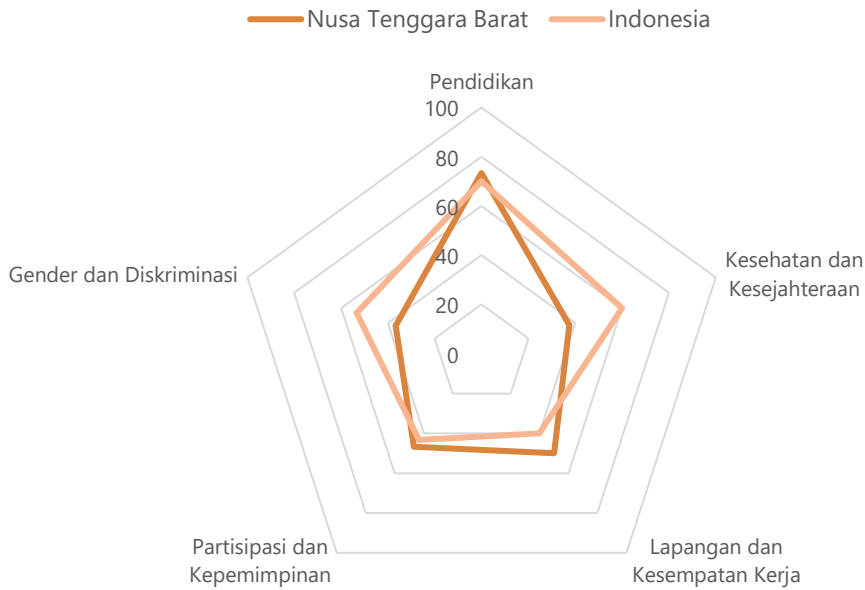
Jika membandingkan nilai transformasi indikator Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nasional nilai transformasi indikator TPT Pemuda memiliki nilai 3 poin di atas nasional. Namun sejalan dengan nilai dari angka perkawinan anak yang tinggi nilai transformasi indikator ini menjadi indikator yang berada paling jauh dengan nasional. Perlu adanya upaya mengurangi angka perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan diharapkan setelah berhasil menurunkan angka perkawinan anak maka persentase remaja perempuan yang hamil juga bisa menurun.

Gambar 24. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2021

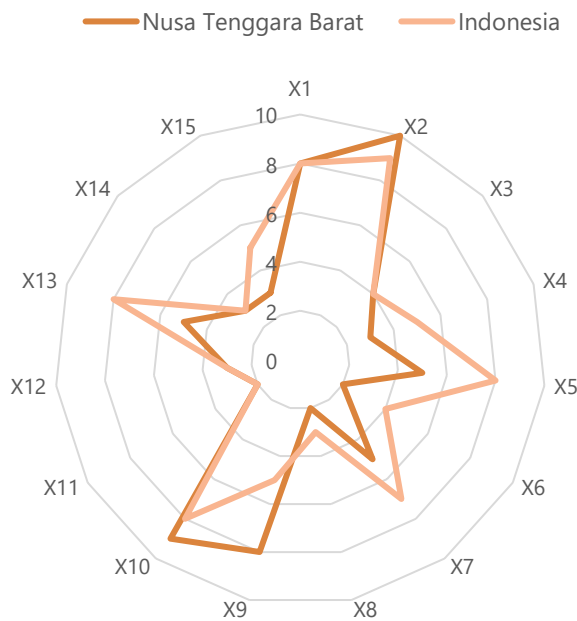
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

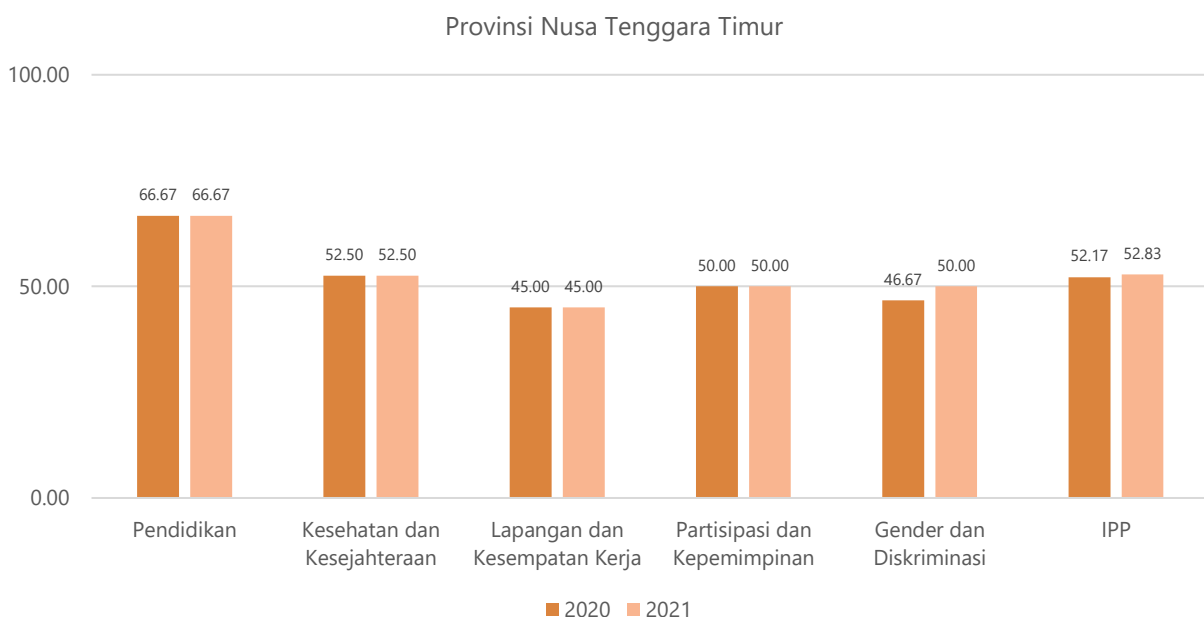
Pada tahun 2021 provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki penduduk pemuda sekitar 1,3 juta jiwa dengan perkiraan jumlah pemuda laki-laki 690 ribu jiwa dan perempuan 695 ribu jiwa. Nilai IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2021 adalah 52,83 berada pada peringkat 14 secara nasional. Peningkatan dari 2020 sebesar 0,67 poin disebabkan adanya peningkatan pada domain gender dan diskriminasi sementara 4 domain lainnya mengalami stagnansi dari tahun 2020.

Jika membandingkan nilai indeks domain indeks domain lapangan dan kesempatan serta partisipasi dan kepemimpinan kerja yang berada di atas nasional. Namun, domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah nasional. Indikator yang perlu di tingkatkan adalah persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal sebesar 14,43 persen sangat jauh dari rata-rata nasional yaitu 24 persen. Sementara untuk persentase remaja perempuan yang sedang hamil sangat tinggi yaitu 31,97 persen. Nilai tersebut berada jauh di atas nasional yaitu 16,97 persen. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesempatan perempuan dalam pasar kerja formal dan menekan persentase remaja perempuan yang telah hamil. Kedua indikator terkait dengan pemuda perempuan ini dapat meningkatkan IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur jika berhasil teratasi.

Gambar 25. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2021

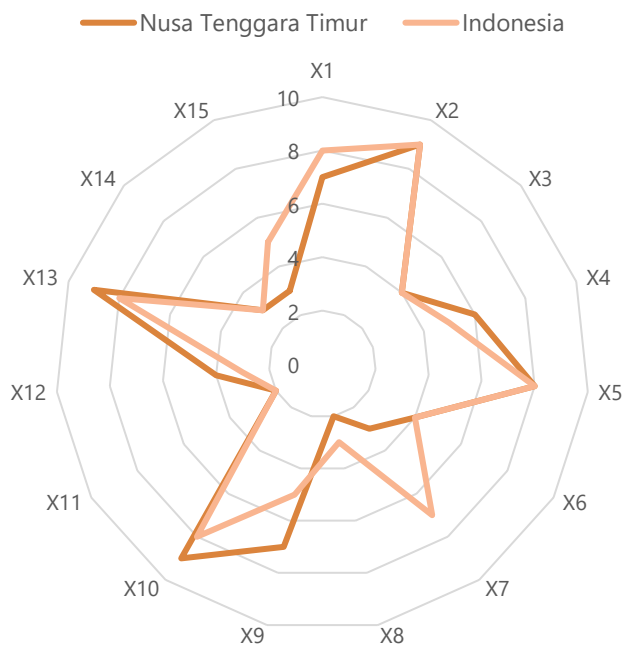
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.20 Provinsi Kalimantan Barat

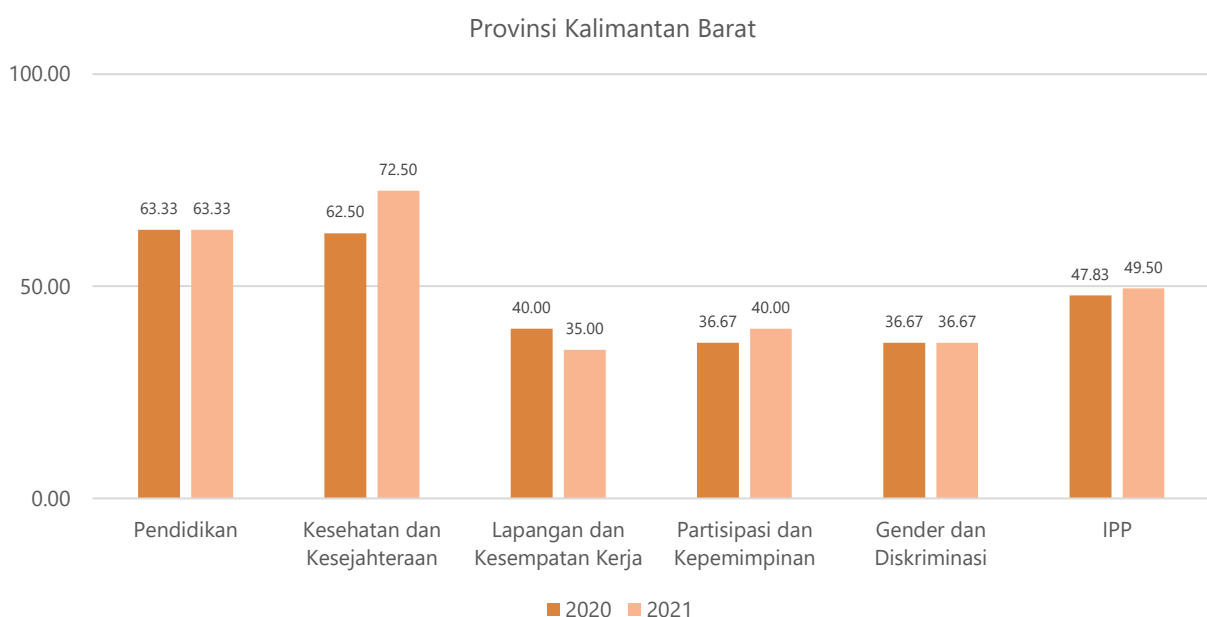
Pada tahun 2021 jumlah pemuda di Kalimantan Barat sekitar 1,2 juta jiwa dengan perkiraan 638 ribu jiwa laki-laki dan 629 ribu jiwa perempuan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai IPP pada tahun 2021 sebesar 49,50 meningkat 1,67 dari tahun 2020. IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 24 secara nasional. Peningkatan IPP Kalimantan Barat disebabkan adanya peningkatan indeks domain kesehatan dan kesejahteraan dan partisipasi dan kepemimpinan. Hanya domain lapangan dan kesempatan kerja yang mengalami penurunan. Sementara untuk domain pendidikan serta gender dan diskriminasi mengalami stagnansi.

Jika membandingkan nilai indeks domain Kalimantan Barat dan nasional, domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi berada di bawah nasional. Hanya domain kesehatan dan kesejahteraan yang berada di atas nasional.

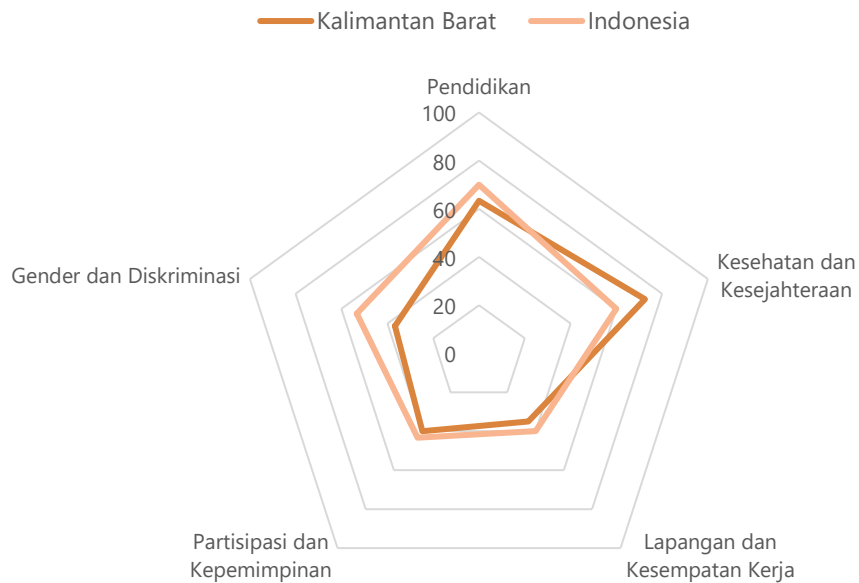
Indikator yang perlu di tingkatkan di Provinsi Kalimantan Barat pada domain pendidikan adalah APK perguruan tinggi, meskipun seluruh indikator pada domain Pendidikan di bawah nasional namun APK perguruan tinggi yang paling jauh dari rata-rata nasional. 26,22 persen untuk Provinsi Kalimantan Barat dan 31,91 persen rata-rata nasional. Sementara pada domain gender dan diskriminasi indikator yang menjadi perhatian adalah persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal hanya 17,69 persen ketika rata-rata nasional sudah mencapai 24 persen. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan setiap indikator pada domain Pendidikan terutama APK perguruan tinggi serta membuka kesempatan kepada pemuda perempuan untuk dapat bekerja di sector formal.

Gambar 26. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Barat pada 2021

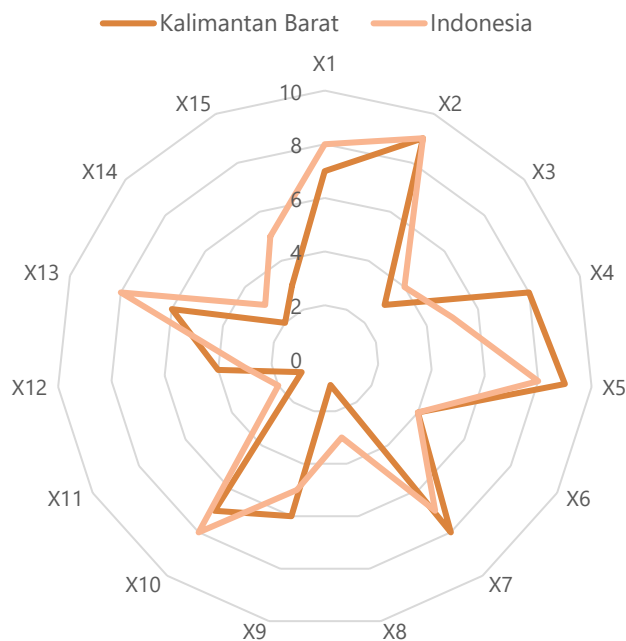
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah pemuda 673.770 jiwa pada 2021 dengan sebaran 344.220 laki-laki dan 329.550 perempuan. Nilai IPP Kalimantan Tengah pada tahun 2021 adalah 49,00 menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 50,67. Tahun 2021 IPP Kalimantan Tengah berada pada peringkat 27 secara nasional. Penurunan IPP terjadi dikarenakan adanya penurunan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Sementara untuk indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, gender dan diskriminasi mengalami stagnansi sejak 2020.

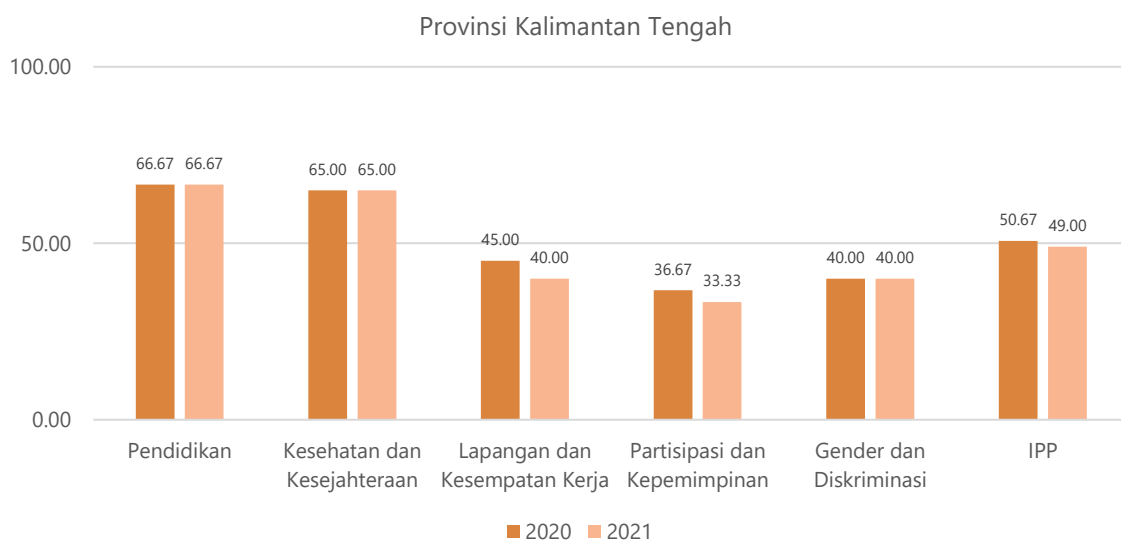
Jika membandingkan dengan nilai indeks domain nasional, nilai indeks pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi berada di bawah nasional. Sementara untuk domain kesehatan berada di atas nasional, dan untuk domain lapangan dan kesempatan kerja sama dengan nasional.

Nilai indikator angka perkawinan anak cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 15,47 persen sementara nilai nasional 9,23 persen. Sebenarnya pada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki angka perkawinan anak sebesar 16,35 persen, telah berhasil turun pada tahun 2021. Namun, masih perlu adanya upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak agar tren penurunan bisa tetap turun dan dengan nilai penurunan yang signifikan.

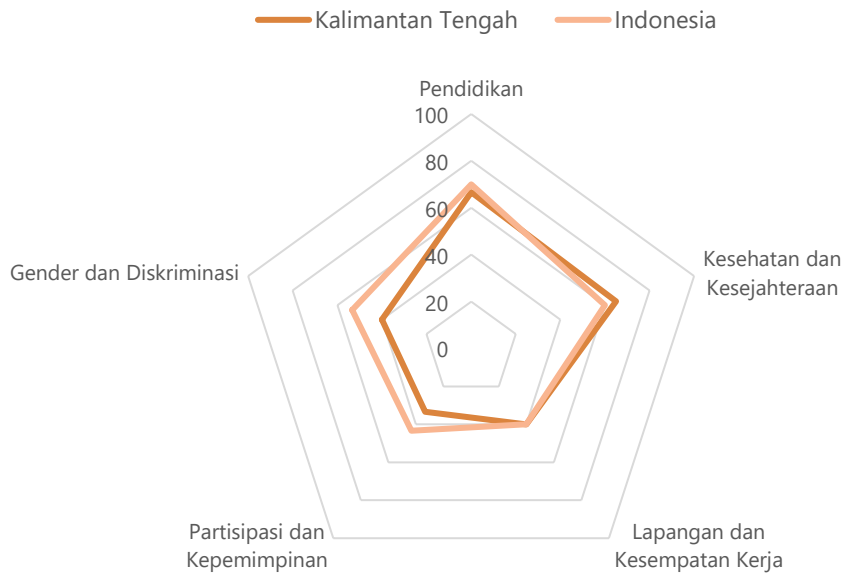
Sementara untuk angka kesakitan pemuda memiliki nilai yang baik dan berada jauh di bawah nasional yaitu hanya 6,07 persen sementara rata-rata nasional 10,23 persen. Ketika rata-rata nasional naik dari sebelumnya 8,58 persen di 2020 Provinsi Kalimantan Tengah justru menurun dari 6,33 persen di tahun 2020. Perlu adanya upaya yang dipertahankan agar capaian tren penurunan angka kesakitan pemuda bisa terus terjadi.

Gambar 27. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021

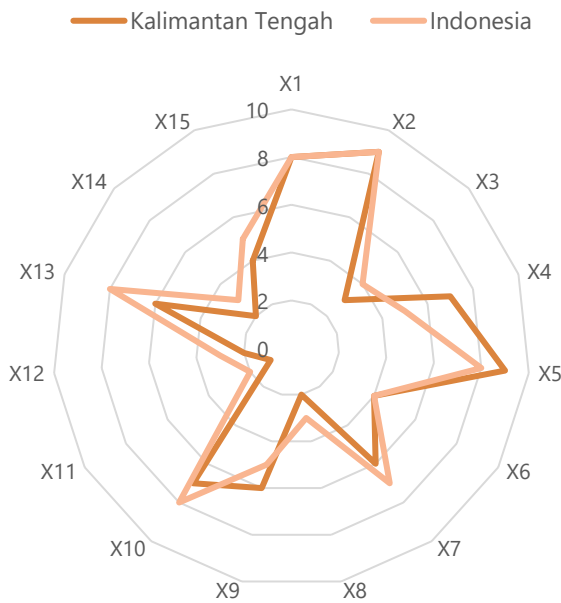
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Tengah 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.22 Provinsi Kalimantan Selatan

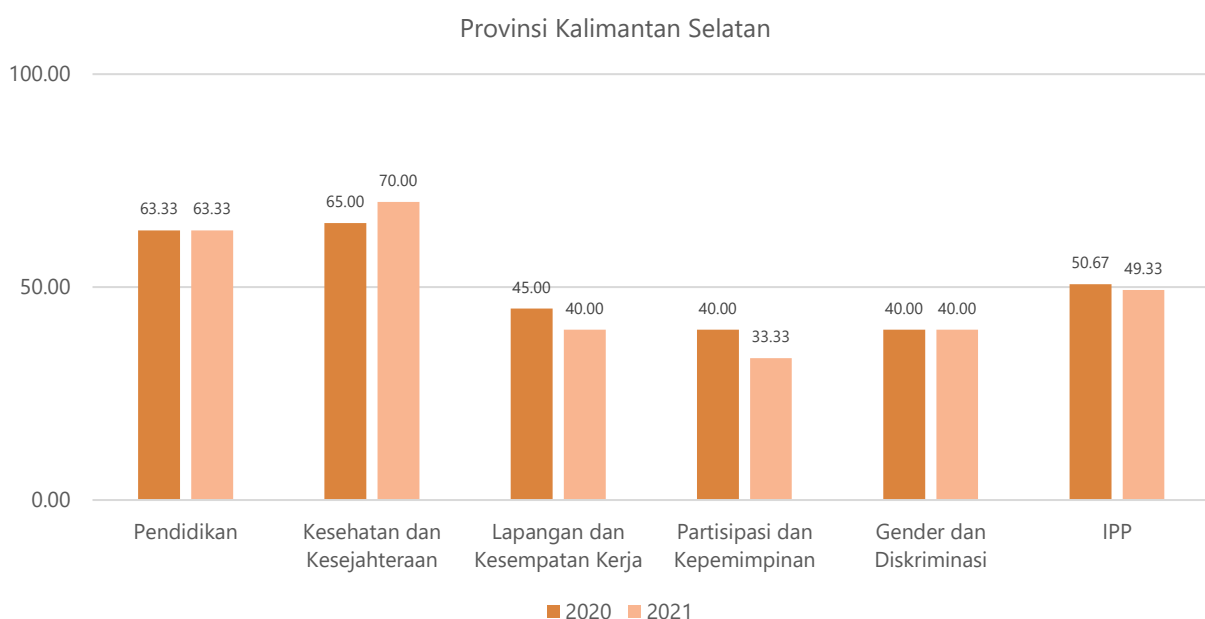
Pada tahun 2021 provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah pemuda sekitar 1 juta jiwa dengan sebaran 516.350 laki-laki serta 497.510 perempuan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai IPP sebesar 49,33 sedikit menurun dari tahun 2020 yaitu 50,67. Pada tahun 2021 IPP Kalimantan Selatan secara nasional menempati peringkat ke 25. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan adanya penurunan pada indeks domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Meskipun terjadi peningkatan hanya terjadi pada indeks domain kesehatan dan kesejahteraan belum mampu meningkatkan nilai IPP. Sementara domain pendidikan serta gender dan diskriminasi mengalami stagnansi dari 2020.

Melihat perbandingan nilai indeks domain IPP Kalimantan Selatan untuk kesehatan dan kesejahteraan berada di atas nasional, sementara untuk lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai yang sama dengan nasional. Namun masih ada nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Selatan untuk pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi yang berada di bawah nasional.

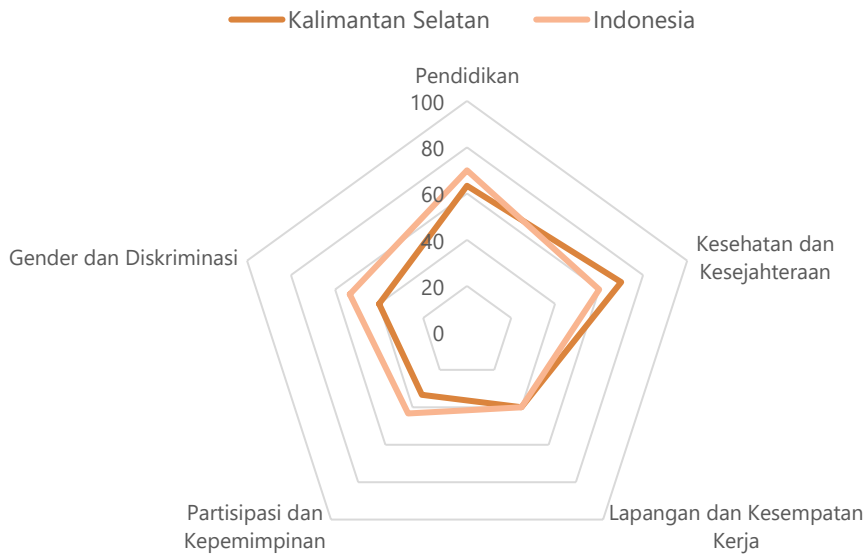
Indikator angka perkawinan usia anak masih cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 15,30 persen. Sementara rata-rata nasional 9,23 persen, perlu adanya upaya menurunkan angka perkawinan usia anak di Kalimantan Selatan. Selain itu indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pemda secara nasional sudah kecil yaitu 5,40 persen, namun Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah lagi yaitu 2,90 persen turun dari 2020 yang sebelumnya 3,61 persen. Hal ini mengindikasikan perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi pemuda agar dapat berpartisipasi dalam memberikan saran/pendapat.

Gambar 28. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan pada 2021

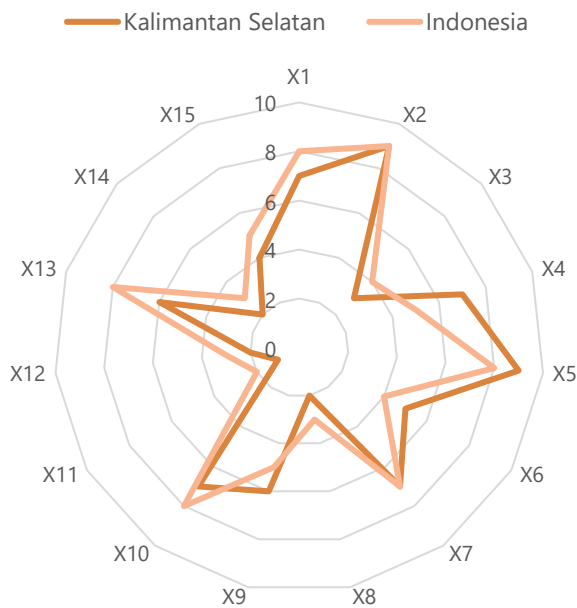
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Selatan 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.23 Provinsi Kalimantan Timur

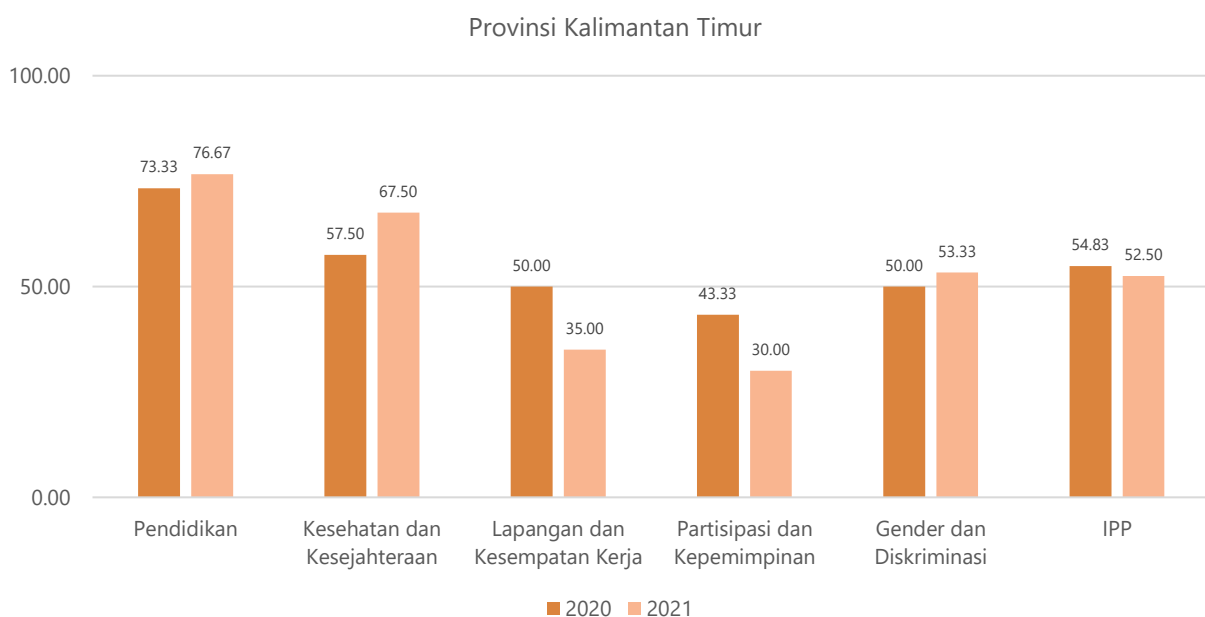
Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkiraan jumlah pemuda sebesar 901.820 jiwa dengan perkiraan 460.430 laki-laki dan 441.380 perempuan pada tahun 2021 (Statistik Pemuda, 2021). Pemuda di Kalimantan Timur memiliki nilai IPP sebesar 52,50 pada tahun 2021 menempati peringkat 17 secara nasional. Nilai IPP provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 54,83. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pada nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja serta partisipasi dan kepemimpinan. Meskipun terjadi peningkatan pada nilai indeks domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta gender dan diskriminasi.

Jika membandingkan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Timur dengan nasional untuk pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan berada di atas nasional. Namun, untuk indeks lapangan dan kesempatan kerja dan partisipasi dan kepemimpinan berada di bawah nasional. Sementara untuk gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan nasional.

Domain yang perlu perbaikan segera adalah domain lapangan dan kesempatan kerja, yang turun 15 poin dari 2020. Indikator yang paling banyak menyumbang adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pemuda yang sebelumnya 13,94 persen menjadi 16,01 persen. Hal ini dapat diatasi dengan adanya lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian pemuda di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Pemuda dapat terserap.

Gambar 29. Capaian pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Timur pada 2021

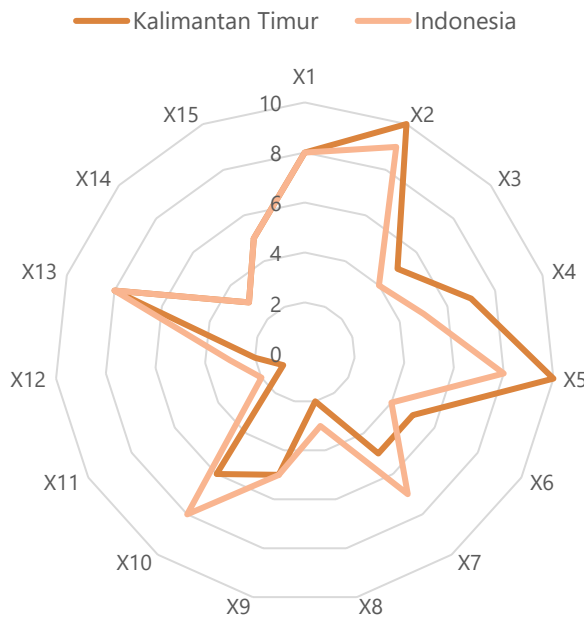
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Timur 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.24 Provinsi Kalimantan Utara

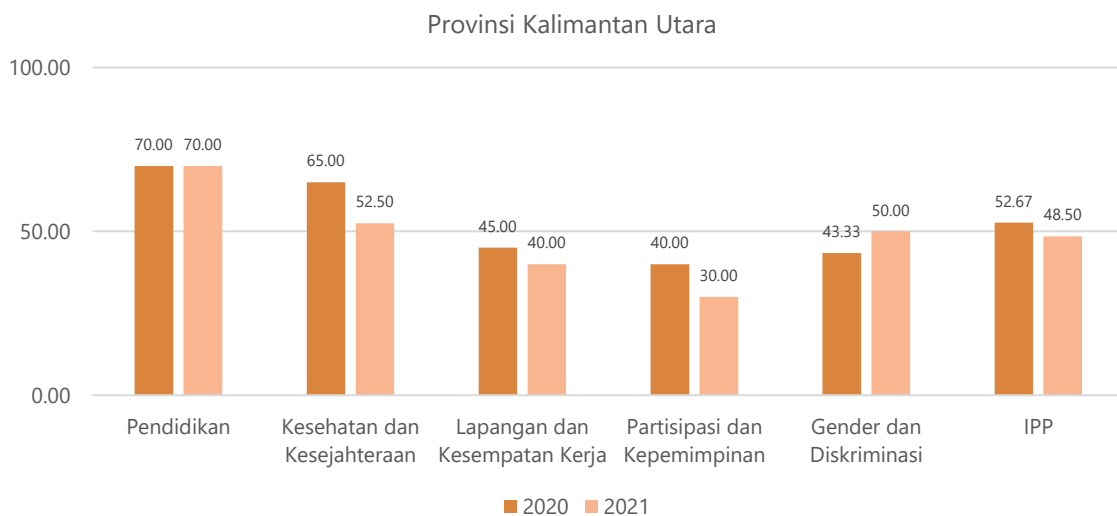
Berdasarkan data Statistik Pemuda tahun 2021 jumlah pemuda di Kalimantan Utara diperkirakan 176.580 jiwa yang terdiri dari sekitar 91.960 laki-laki dan 84.620 perempuan. Pemuda di Kalimantan Utara memiliki nilai IPP 48,50 pada tahun 2021 menempati peringkat 29 secara nasional. IPP Kalimantan Utara mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebelumnya 52,67. Jika melihat kepada nilai indeks domain, penurunan IPP Kalimantan Utara disebabkan adanya penurunan di 3 domain yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Hanya domain gender dan diskriminasi yang mengalami peningkatan sementara domain pendidikan tetap pada angka 70,00 sejak 2020.

Jika membandingkan dengan nilai nasional indeks domain kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi berada di bawah nasional. Kemudian untuk domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai yang sama dengan nasional.

Kalimantan Utara perlu mengejar ketertinggalan nilai transformasi indikator untuk indikator APK perguruan tinggi, persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, angka perkawinan usia anak yang masih berada di bawah nasional. Khususnya untuk indicator persentase remaja perempuan yang sedang hamil yaitu 28,77 persen sangat jauh di atas nasional yaitu 16,97 persen, indicator kedua yang perlu perhatian adalah persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, ketika rata-rata nasional sudah mencapai 70,49 persen provinsi Kalimantan utara baru 43,23 persen.

Gambar 30. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara pada 2021

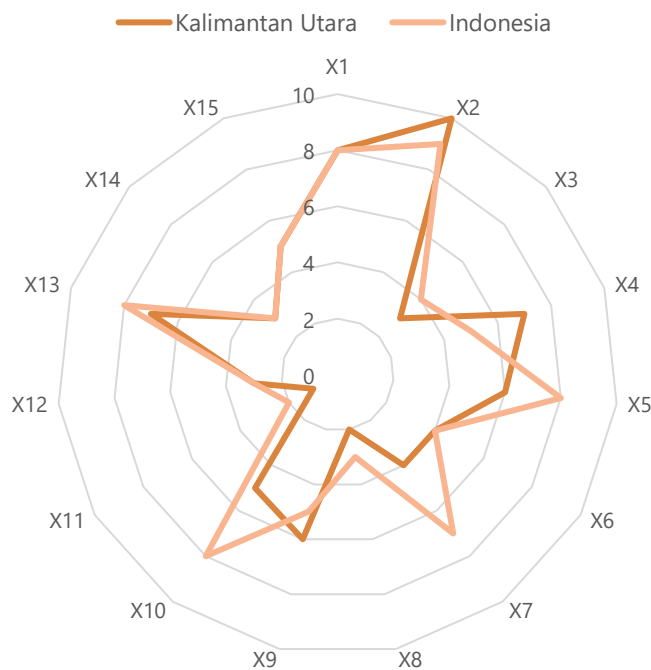
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Utara 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.25 Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi utara memiliki 588.030 jiwa pemuda pada 2021. Dalam periode pembangunan 2020-2021, Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencatat kenaikan angka IPP sebesar 2,5 poin dari 49,5 menjadi 52. Meski angka IPP Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah angka nasional, perbaikan angka IPP Provinsi Sulawesi Utara telah menaikkan peringkat IPP Provinsi Sulawesi Utara dari peringkat 26 pada 2020 menjadi peringkat 20 se-Indonesia pada 2021.

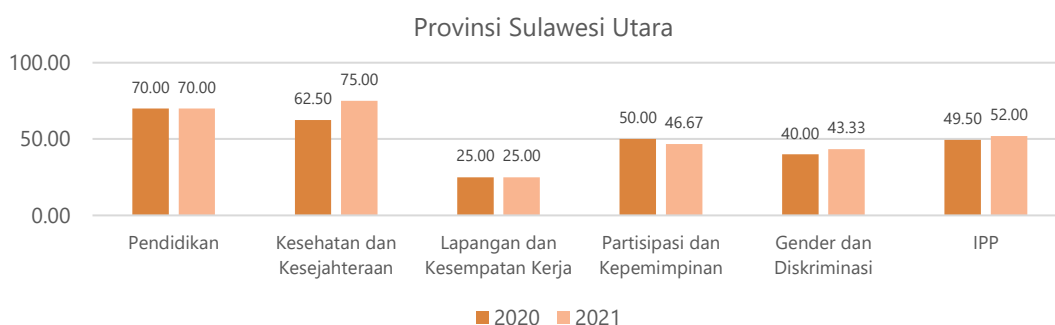
Perbaikan IPP Provinsi Sulawesi Utara ini terutama disumbang oleh perbaikan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan dan domain gender dan diskriminasi. Kenaikan capaian kedua domain ini didorong oleh perbaikan pada indikator angka kesakitan pemuda yang membaik dari 6,45% menjadi 5,99%; angka remaja perempuan hamil berhasil turun secara signifikan dari angka 22,40% menjadi 4,33%; angka perkawinan anak berhasil turun dari 14,01% menjadi 13,56%; dan partisipasi pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat dari 40% menjadi 41,52%.

Meski domain gender dan diskriminasi secara umum mengalami perbaikan, Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan untuk mendorong partisipasi kerja pemuda perempuan. Angka partisipasi kerja pemuda perempuan mengalami penurunan dari 18,62% menjadi 18,05% antara 2020-2021. Disamping itu, jika dibandingkan dengan angka nasional, capaian domain gender dan diskriminasi Provinsi Sulawesi Utara masih tertinggal 10 poin.

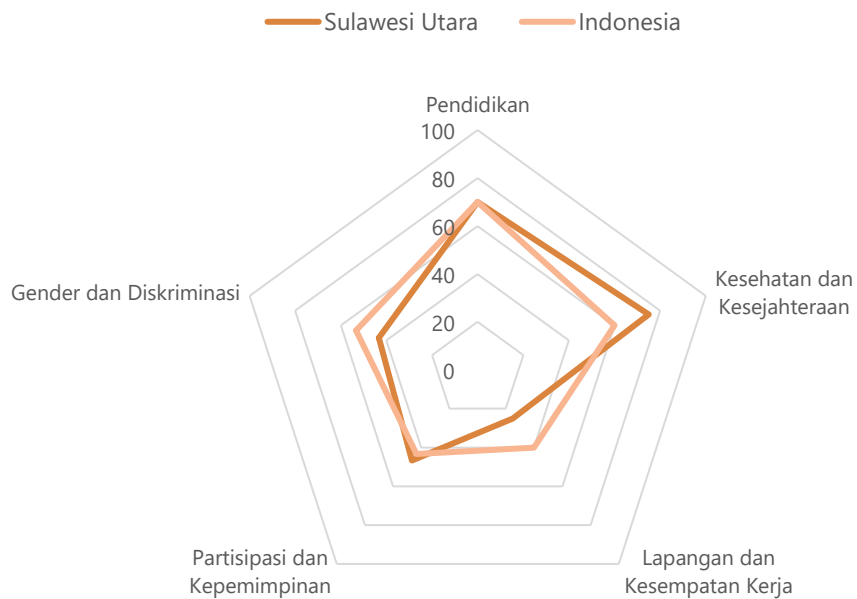
Tantangan lain yang dihadapi Provinsi Sulawesi Utara adalah masih jauh tertinggalnya capaian domain lapangan dan kesempatan kerja (lebih rendah 15 poin) dibandingkan capaian nasional. Kedua indikator penyusun domain lapangan dan kesempatan kerja, yaitu angka pengangguran dan pemuda wirausaha kerah putih, mengalami perbaikan kinerja antara 2020-2021. Namun perbaikan ini masih belum berhasil menjadikan angka pengangguran dan wirausaha kerah putih Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan capaian nasional. Untuk semakin mendorong kenaikan angka IPP ke depan, Provinsi Sulawesi Utara perlu mengejar ketertinggalan pada domain lapangan dan kesempatan kerja ini, termasuk mendorong partisipasi kerja pemuda perempuan.

Gambar 31. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara pada 2021

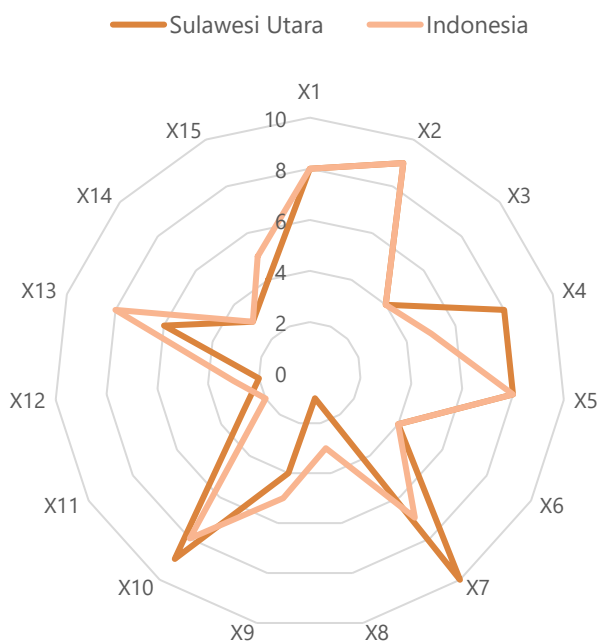
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Utara 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 764.400 jiwa pemuda. Dalam periode 2020 dan 2021, angka IPP Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari

52,17 menjadi 54,17. Sejak 2020, capaian IPP Provinsi Sulawesi Tengah telah berada di atas angka IPP nasional. Pada 2021, capaian IPP provinsi ini menduduki peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia.

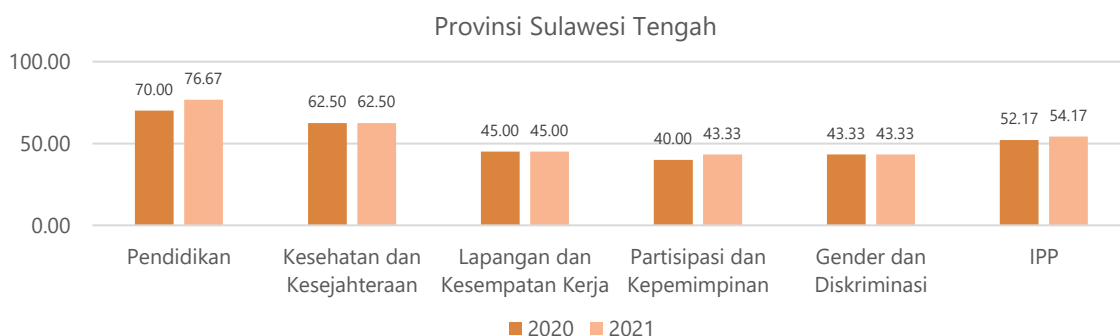
Indikator yang berhasil mendorong perbaikan angka indeks domain pendidikan dalam periode 2020-2021 adalah rata-rata lama sekolah (naik dari 10,37 menjadi 10,54), dan APK perguruan tinggi (naik dari 39,32 menjadi 40,11). Sementara pada domain partisipasi dan kepemimpinan, persentase pemuda yang berpendapat dalam rapat mengalami kenaikan signifikan dari 4,6% menjadi 6,6%.

Gender dan diskriminasi merupakan satu-satunya domain dengan angka indeks yang lebih rendah dibandingkan angka nasional. Pada 2021, capaian indeks domain gender dan diskriminasi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 43,3 sementara angka nasional sebesar 53,33. Ketertinggalan capaian indeks domain ini dibandingkan angka nasional disebabkan oleh tingginya angka perkawinan anak dan rendahnya angka partisipasi kerja perempuan. Pada 2021, sekitar 12,51% pemuda perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia di bawah 19 tahun (angka nasional hanya 9,23%), sementara tingkat partisipasi kerja pemuda perempuan hanya 18,28% (dibandingkan angka nasional yang mencapai 24%).

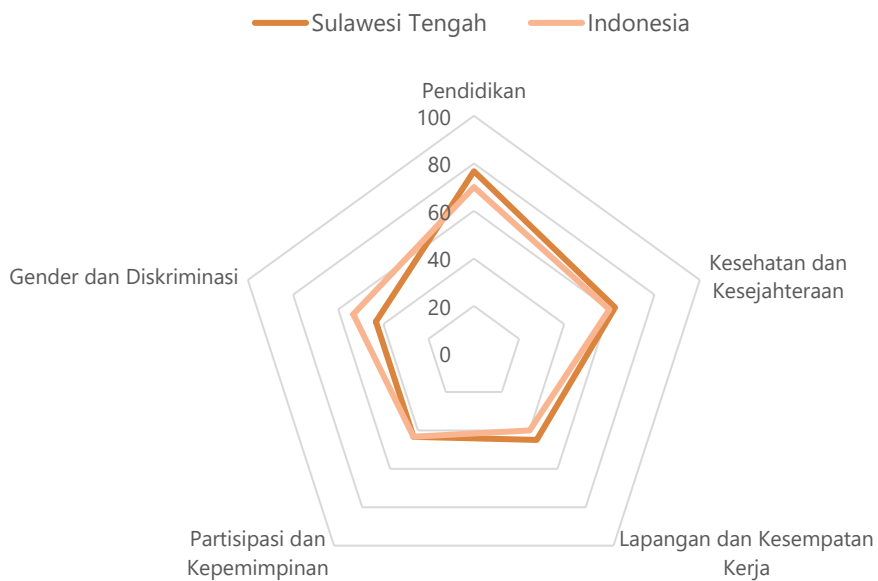
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu terus mendorong perbaikan angka indikator pada domain pendidikan dan domain partisipasi dan kepemimpinan agar perbaikan angka kedua domain ini dapat terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, serta memperbaiki kinerja pembangunan domain gender dan diskriminasi agar dapat mendekati/lebih baik dari kinerja nasional. Disamping itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap indikator persentase remaja hamil dan pemuda wirausaha kerah putih yang capaiannya cenderung memburuk pada 2021 dibandingkan tahun 2020.

Gambar 32. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah pada 2021

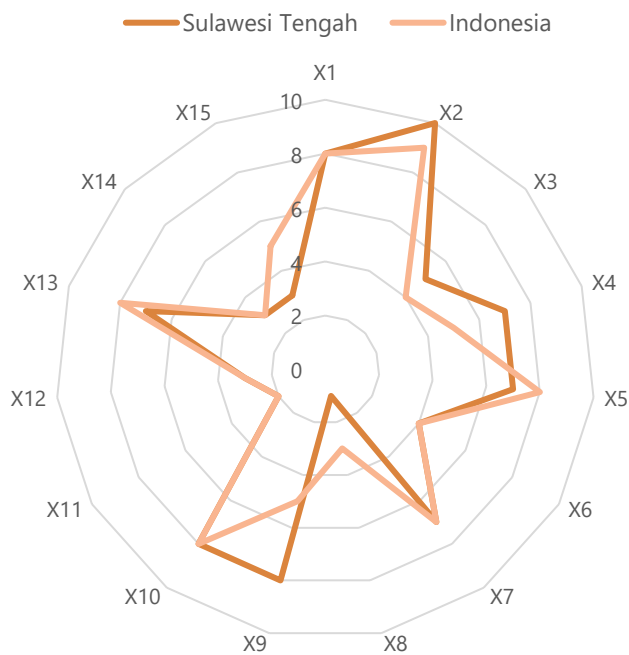
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tengah 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 2.115.150 jiwa pada 2021. Pembangunan pemuda Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kinerja yang baik pada periode 2020 dan 2021. Angka IPP Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode ini, yaitu meningkat 4 poin dari 48,57 menjadi 52,67. Kenaikan ini tercatat sebagai kenaikan ketiga tertinggi di Indonesia setelah Riau yang mengalami kenaikan IPP sebesar 5,5 poin dan Jambi yang mengalami peningkatan IPP 4,17 poin. Cukup besarnya peningkatan angka IPP Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadikan peringkat IPP Provinsi Sulawesi Selatan naik dari peringkat ketiga¹ terendah pada 2020 menjadi peringkat 15 pada 2021.

Dua domain yang berkontribusi besar terhadap kenaikan angka IPP Provinsi Sulawesi Selatan adalah domain kesehatan dan kesejahteraan, serta domain gender dan diskriminasi. Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, terjadinya penurunan angka pemuda korban kejahatan dari 0,96% menjadi 0,64%, angka pemuda merokok dari 23,14% menjadi 20,64%, dan remaja perempuan hamil dari 24,94% menjadi 14,92% secara signifikan berkontribusi terhadap kenaikan angka indeks domain kesehatan dan kesejahteraan.

Sementara pada domain gender dan diskriminasi, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menekan angka perkawinan anak dari 11,25% menjadi 9,25% dan mendorong partisipasi pendidikan dan pekerjaan perempuan (partisipasi pendidikan menengah dan tinggi perempuan meningkat dari 45,49% menjadi 48,14%, sementara partisipasi kerja perempuan meningkat dari 17,58% menjadi 18,28%.

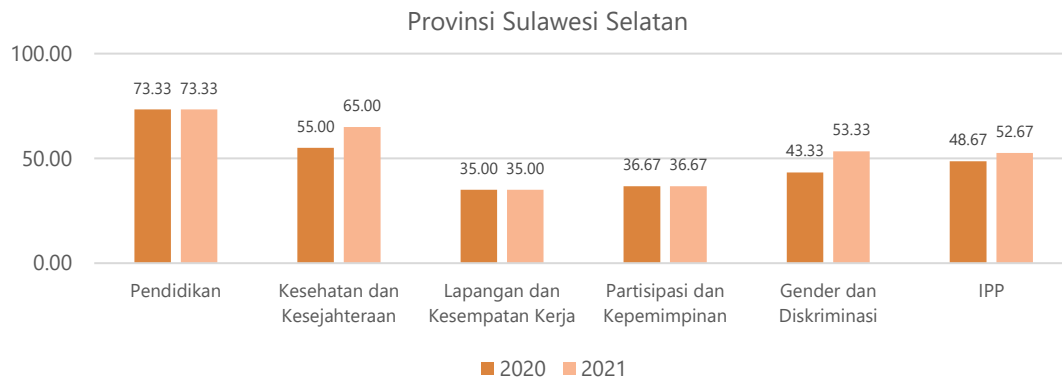
Domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan tercatat mengalami stagnasi perkembangan selama periode 2020-2021. Capaian domain pendidikan menunjukkan tidak adanya perbaikan yang berarti pada angka rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah dan perguruan tinggi. Bahkan APK perguruan tinggi tercatat mengalami penurunan. Partisipasi pemuda berpendapat dalam rapat tercatat mengalami penurunan, begitu pula halnya pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Angka pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran pemuda memang tercatat mengalami perbaikan, namun angkanya masih belum signifikan dalam memengaruhi kenaikan angka indeks domain lapangan dan kesempatan kerja.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memberikan perhatian pada pembangunan pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, dan partisipasi pemuda sembari terus mempertahankan kinerja pembangunan pemuda yang telah baik.

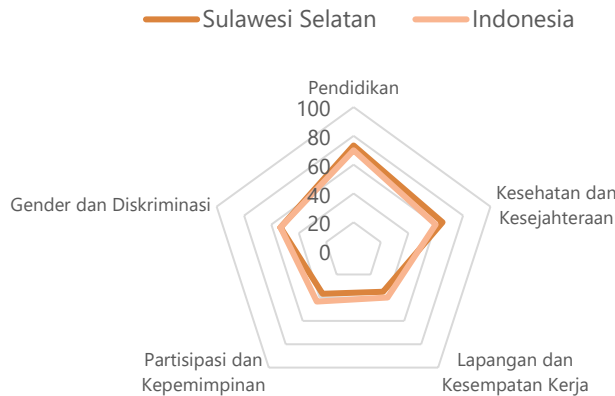
¹Nilai IPP Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 32 nasional.

Gambar 33. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan pada 2021

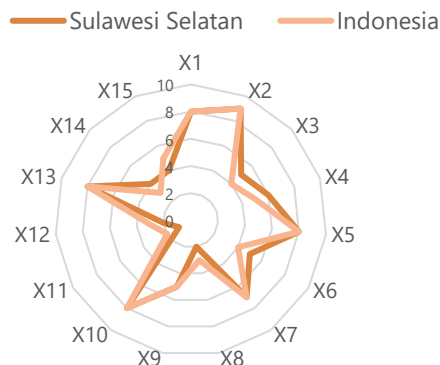
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 678.520 jiwa pemuda. Pembangunan pemuda pada periode 2020 dan 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami perbaikan dari sebesar 1.5 poin (naik dari 58,83 pada 2020 menjadi 50,33 pada 2021). Dengan kenaikan ini, peringkat IPP Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari posisi 29 menjadi peringkat ke 22 se-Indonesia.

Perbaikan angka IPP Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, dan domain gender dan diskriminasi. Perbaikan angka indeks domain kesehatan dan kesejahteraan terjadi karena adanya penurunan signifikan persentase pemuda merokok (dari 21,64% menjadi 21,04%) dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (turun dari 20,55% menjadi 16,19%). Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, perbaikan angka indeks domain didorong oleh kenaikan angka pemuda wirausaha kerah putih dari 0,14% menjadi 0,23%. Sementara pada domain gender dan diskriminasi, perbaikan angka indeks domain didorong oleh peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan di sektor formal.

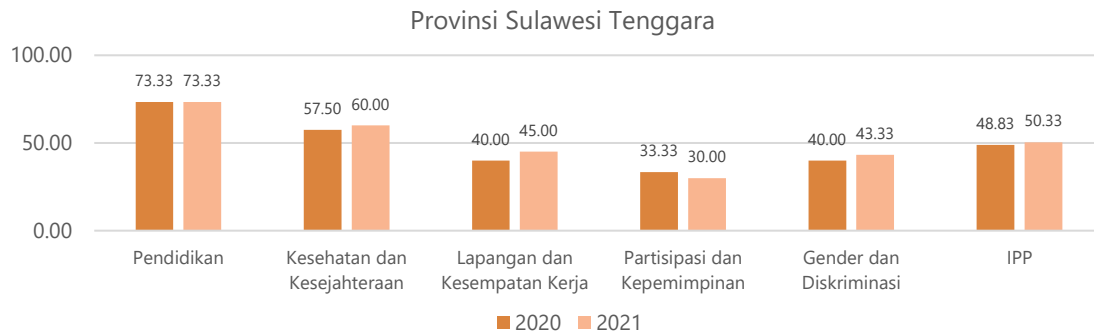
Meski angka indeks domain gender dan diskriminasi tercatat mengalami perbaikan, capaian indeks domain ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Di tingkat nasional, capaian pembangunan pemuda pada domain gender dan diskriminasi telah berada pada angka 53,33, sementara capaian di Provinsi Sulawesi Tenggara berada 10 angka lebih rendah dibandingkan capaian nasional.

Angka indeks domain lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih tertinggal dibandingkan capaian nasional adalah pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Capaian domain ini di Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada angka 30, sementara di tingkat nasional telah mencapai angka 43,33.

Ke depan, pembangunan kedua domain yang masih tertinggal ini perlu terus didorong oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Disamping itu, jika diamati dari Gambar 33 (c), pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga perlu terus menjamin penciptaan lingkungan yang aman bagi pemuda (ditandai dari rendahnya angka pemuda korban kejahatan), terus mendorong penurunan angka perkawinan anak, dan semakin meningkatkan angka partisipasi kerja pemuda perempuan. Hal ini dilakukan untuk mendorong perbaikan capaian indikator, paling tidak agar dapat menyerupai angka rata-rata nasional.

Gambar 34. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2021

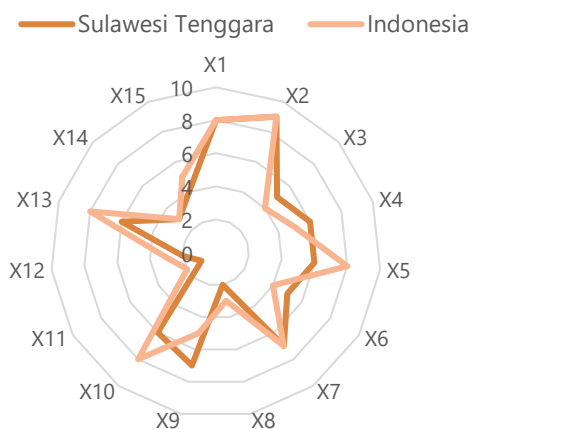
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tenggara 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.29 Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki 300.470 jiwa pemuda. Jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah di Pulau Sulawesi. Pada periode 2020-2021, angka IPP Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 2,5 poin dari 50,67 menjadi 53,17—menyerupai capaian IPP tingkat nasional sebesar 53,33. Kenaikan IPP Gorontalo ini menjadikan provinsi ini menduduki peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia pada 2021.

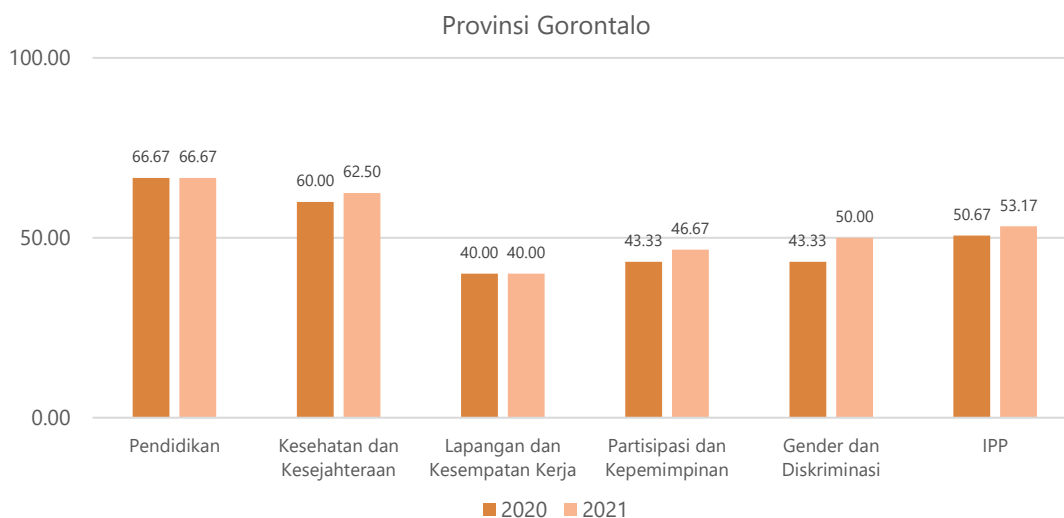
Perbaikan angka IPP Provinsi Gorontalo terutama didorong oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi. Sementara dua domain lainnya, yaitu domain pendidikan dan lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnansi capaian.

Perbaikan yang terjadi pada domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh perbaikan keamanan lingkungan bagi pemuda—yang ditandai oleh penurunan angka pemuda korban kejahatan 0,89% menjadi 0,49% serta menurunkan prevalensi pemuda merokok dari 25,95% menjadi 25%. Perbaikan indeks domain partisipasi dan kepemimpinan didorong oleh kenaikan persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 78,09% menjadi 83,44%, dan persentase pemuda yang berpendapat dalam rapat (meningkat dari 6,46% menjadi 8,05%). Sementara pada domain gender dan diskriminasi, terjadi perbaikan angka perkawinan anak dan partisipasi pendidikan perempuan.

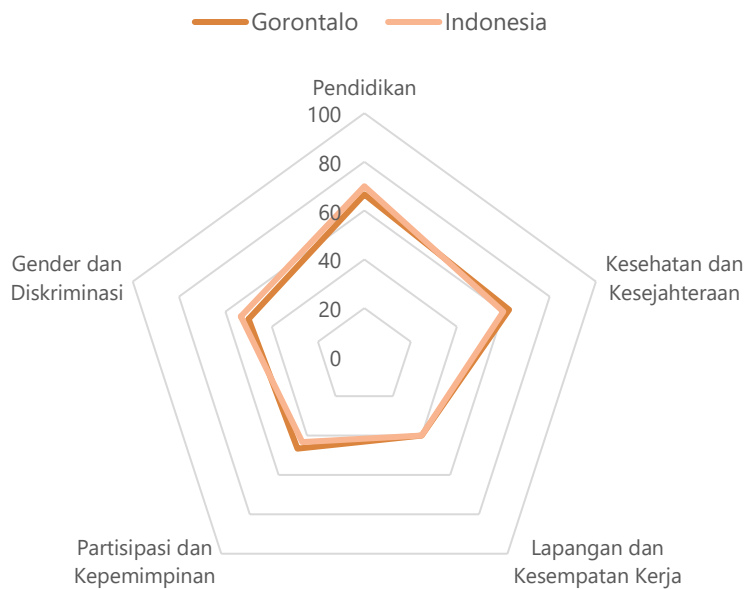
Tantangan yang masih dihadapi Provinsi Gorontalo adalah terjadinya kenaikan angka kesakitan pemuda dari 9,07 menjadi 11,53%, dan penurunan persentase pemuda yang aktif organisasi dari 5,76% menjadi 3,86%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Disamping itu, pemerintah juga perlu terus mendorong perbaikan domain pendidikan dan partisipasi dan kepemimpinan—capaian kedua domain ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional pada 2021.

Gambar 35. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo pada 2021

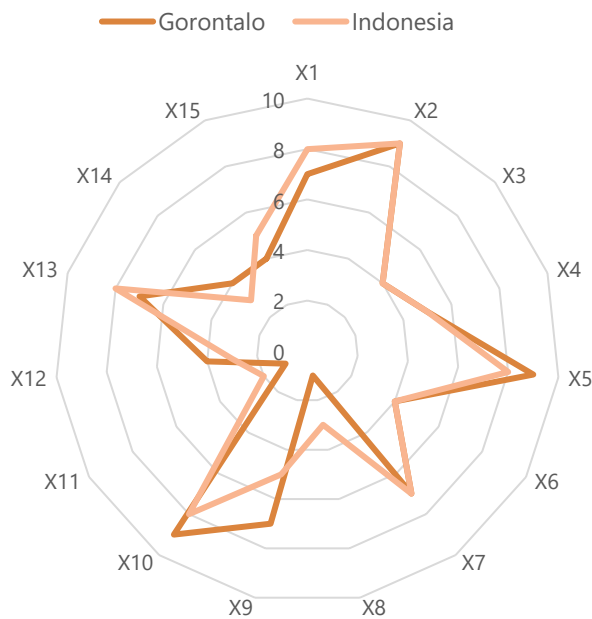
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Gorontalo 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Gorontalo dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Gorontalo dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

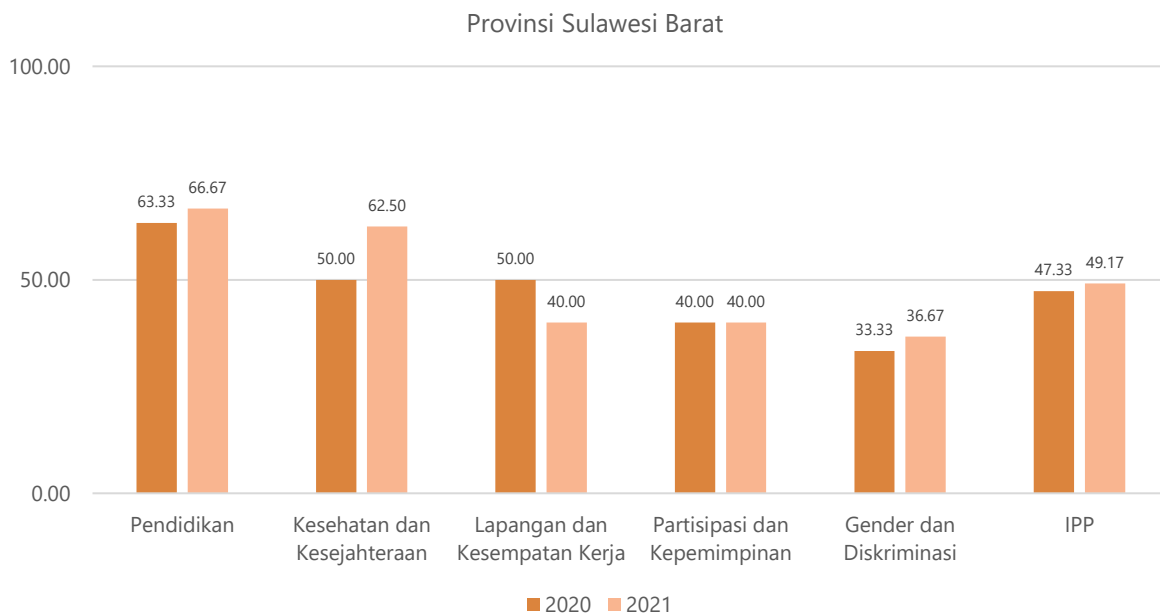
3.30 Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat memiliki sekitar 351.060 jiwa pemuda pada tahun 2021 dengan sebaran 176.450 jiwa laki-laki dan 174.610 jiwa perempuan (Statistik Pemuda, 2021). Pemuda Provinsi Sulawesi Barat memiliki IPP sebesar 49.17 pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 47.33. IPP Sulawesi Barat berada pada peringkat 26 secara nasional. Namun terjadi penurunan pada domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 10 poin. Sementara untuk domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 12.5 poin.

Jika membandingkan nilai domain dengan nasional untuk domain pendidikan, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi berada di bawah nasional. Namun untuk domain kesehatan dan kesejahteraan berada di atas nasional, sementara domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai yang sama dengan nasional. Pemuda Sulawesi Barat memiliki keunggulan pada domain kesehatan dan kesejahteraan namun perlu adanya perhatian karena pada domain ini untuk nilai pada indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil berada di atas nasional yaitu 18,98% sementara nasional 16,97%. Namun, untuk nilai TPT Pemuda Sulawesi Barat berada di bawah nasional yaitu 8,84% sementara nasional 14,42%. Sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meneruskan upaya yang sudah baik terkait dengan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat.

Gambar 36. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat pada 2021

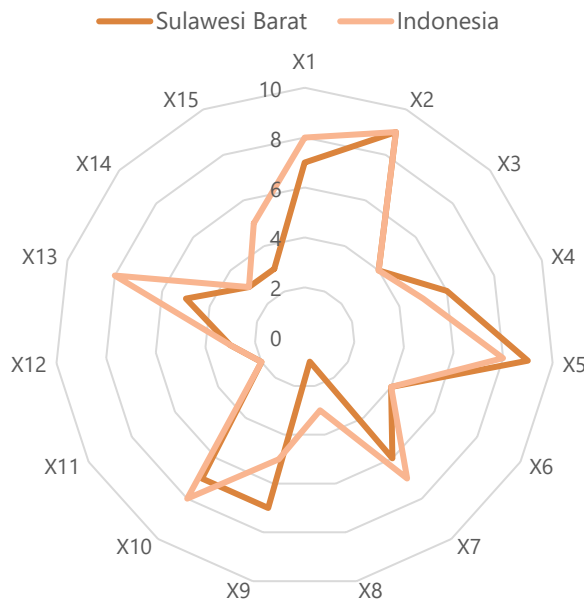
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.31 Provinsi Maluku

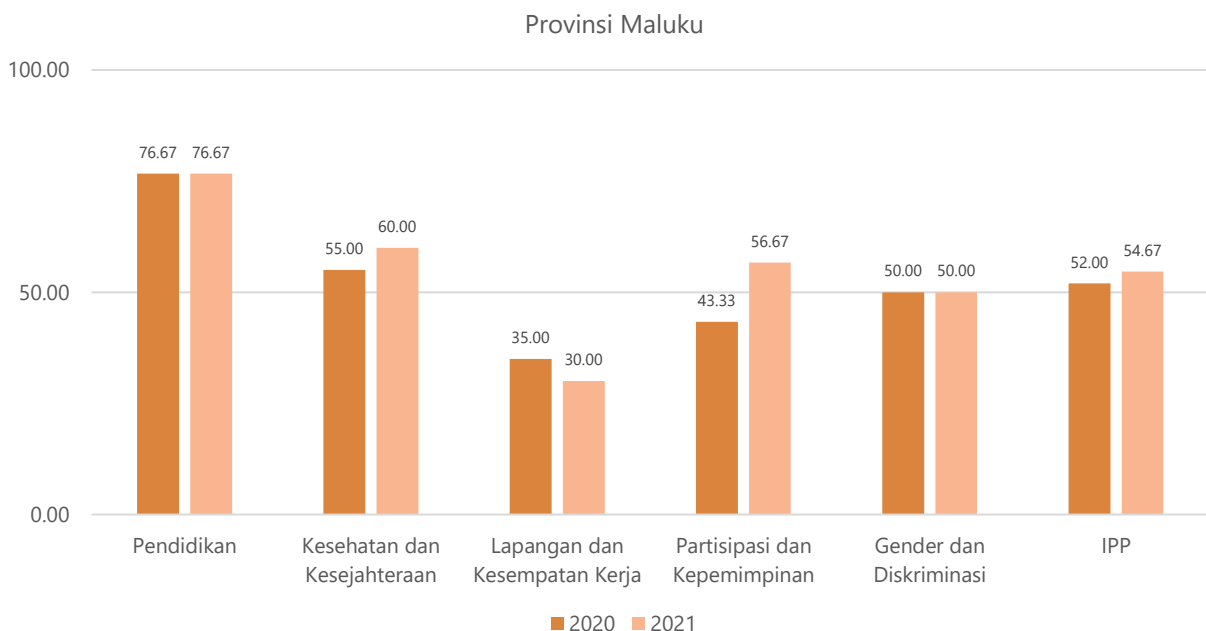
Provinsi Maluku memiliki jumlah pemuda sekitar 458.930 jiwa pada tahun 2021 dengan perkiraan jumlah pemuda laki-laki 234.620 jiwa dan 224.310 jiwa perempuan. Provinsi Maluku memiliki nilai IPP tahun 2021 54,67 meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Nilai IPP Maluku berada pada peringkat 8 secara nasional. Peningkatan tertinggi ada pada domain partisipasi dan kepemimpinan (13,34 poin), yang diikuti dengan peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan (5 poin). Namun untuk domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami penurunan (5 poin).

Jika membandingkan dengan nasional, domain pendidikan provinsi Maluku berada 7 poin di atas nasional yaitu 77 sementara nasional 70, domain lain yang berada di atas nasional adalah partisipasi dan kepemimpinan yang berada 13 poin di atas nasional, 57 untuk Maluku dan 43 untuk Nasional. Kemudian untuk domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda berada 10 poin di bawah nasional yaitu 30 untuk Maluku dan 40 untuk Nasional.

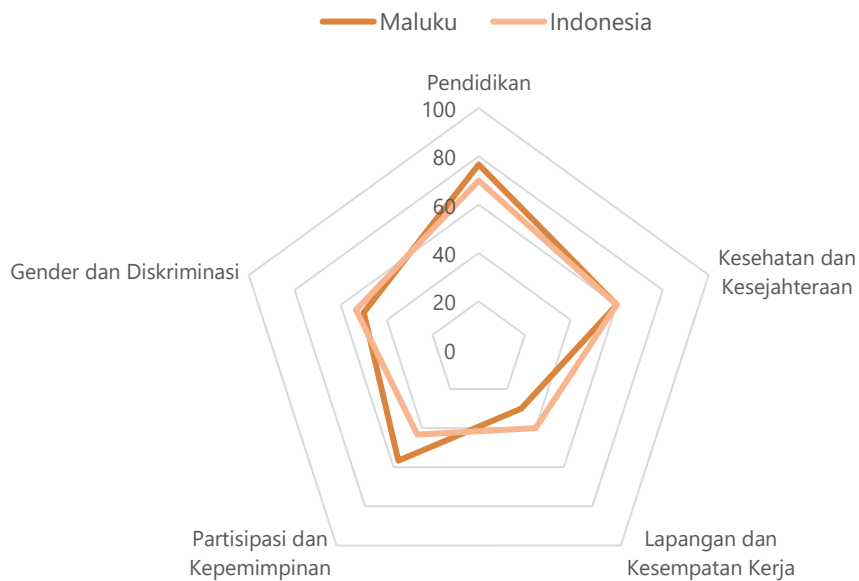
Provinsi Maluku perlu memberikan perhatian kepada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda yang cukup tinggi yaitu 16,85%, nilai tersebut berada di atas nasional yang nilai TPT Pemuda 14,42%. Perlu adanya upaya menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemuda agar TPT Pemuda di Provinsi Maluku dapat berkurang.

Gambar 37. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku pada 2021

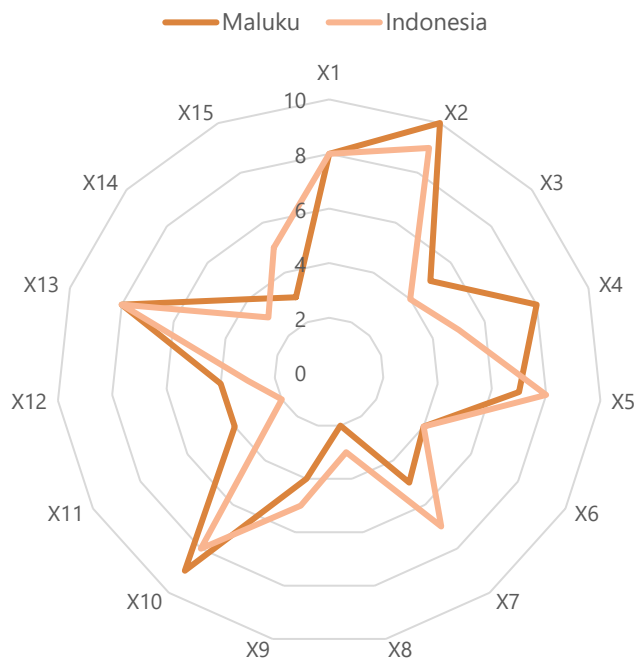
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Maluku 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Maluku dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Maluku dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

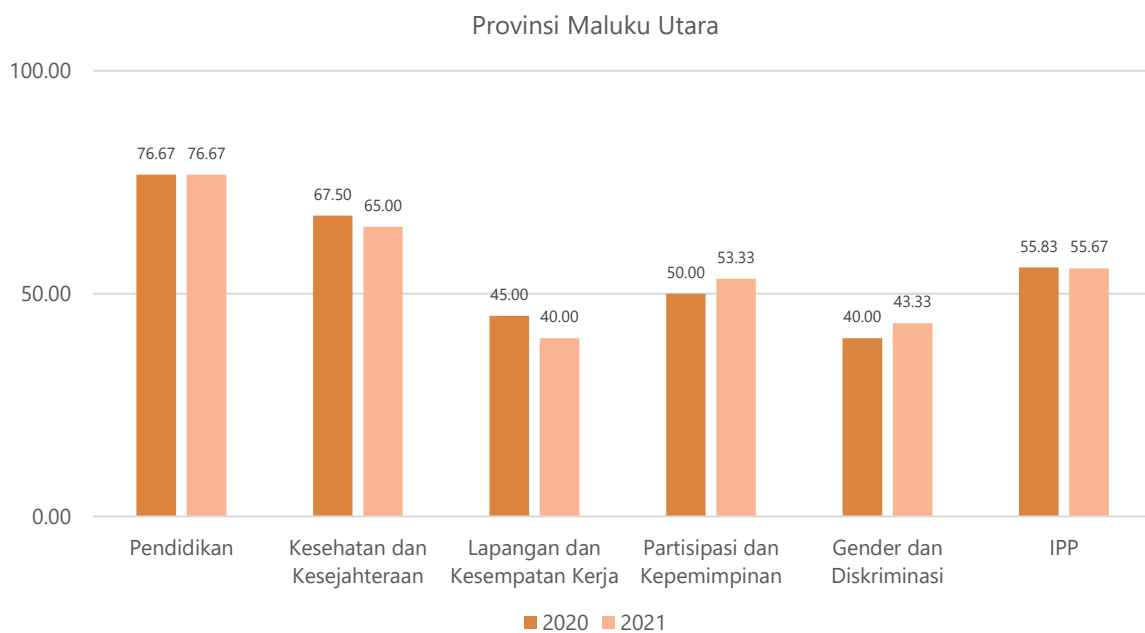
3.32 Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara memiliki 322.960 jiwa pemuda pada 2021. Nilai IPP Provinsi Maluku Utara mengalami sedikit penurunan dari 55.83 pada 2020 menjadi 55.67 pada 2021. Nilai IPP Provinsi Maluku Utara berada pada peringkat 6 secara nasional pada tahun 2021. Nilai domain yang menyebabkan penurunan IPP Maluku Utara adalah domain lapangan dan kesempatan kerja (turun 5 poin) serta kesehatan dan kesejahteraan (turun 2.5 poin).

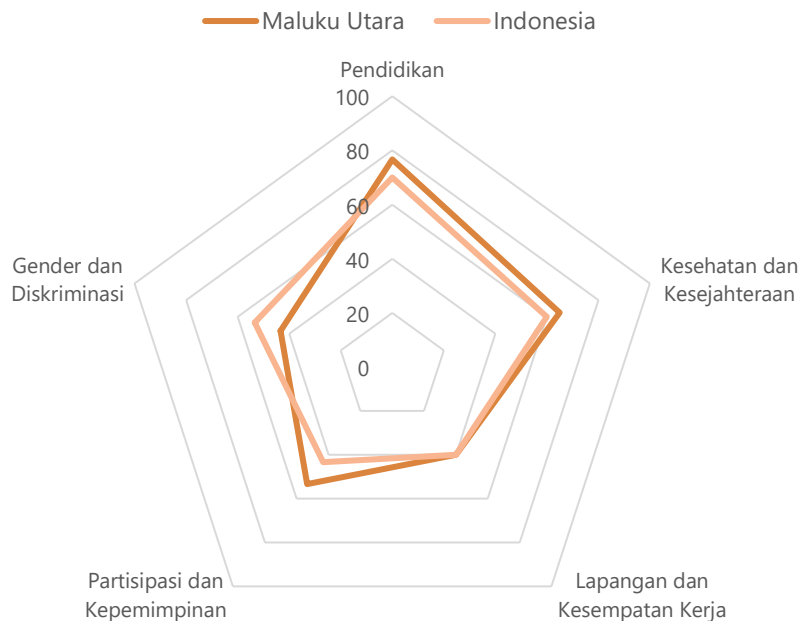
Jika membandingkan nilai domain nasional dan Maluku Utara, hanya domain gender dan diskriminasi yang berada di bawah nasional. Jika melihat dari tahun 2020 domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan sebanyak 3 poin. Berdasarkan nilai indikator untuk persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal berada jauh di bawah nasional yaitu 14,04% sementara nasional 24%. Perlu adanya upaya melibatkan pemuda perempuan untuk bekerja di sektor formal.

Gambar 38. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Utara pada 2021

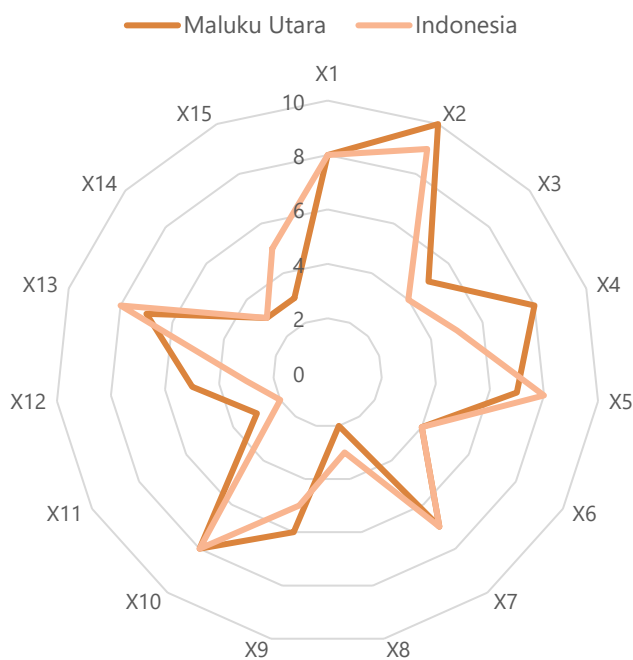
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Maluku Utara 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Maluku Utara dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Maluku Utara dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

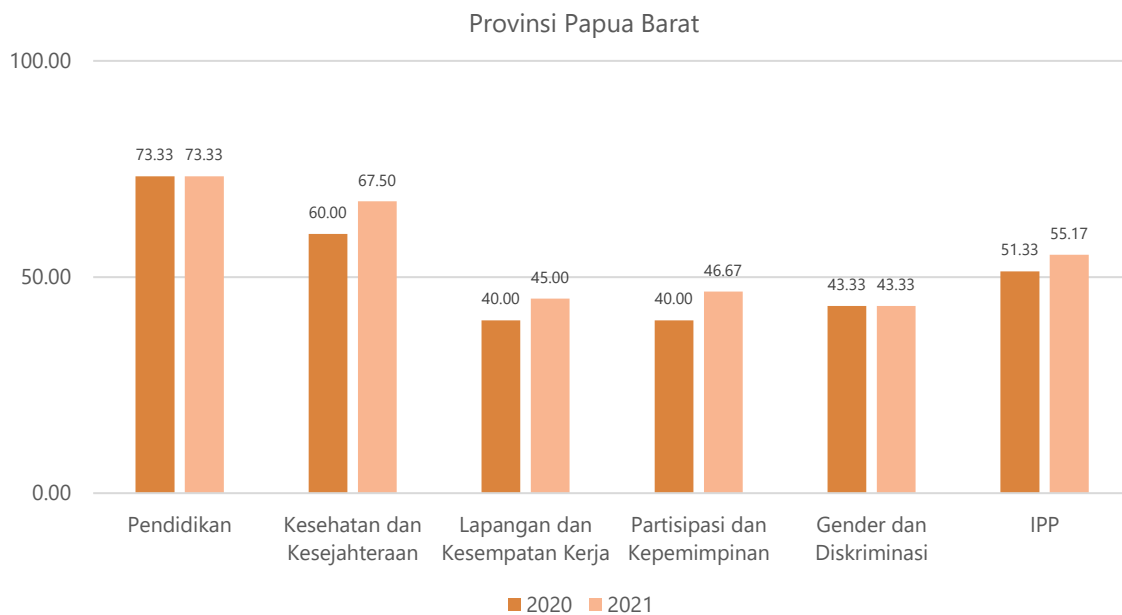
3.33 Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda yang terendah di Indonesia. Pada 2021, jumlah pemuda di provinsi ini adalah 263.120 jiwa dengan sebaran 135.080 pemuda laki-laki dan 128.050 pemuda perempuan. Pemuda Papua Barat pada tahun 2021 memiliki nilai IPP sebesar 55,17 berada pada peringkat ke 7 secara nasional, nilai IPP Papua Barat meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 51,33. Peningkatan ini di dorong dengan adanya peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Selain itu tidak ada domain yang mengalami penurunan, karena domain pendidikan serta gender dan diskriminasi mengalami stagnansi sejak 2020.

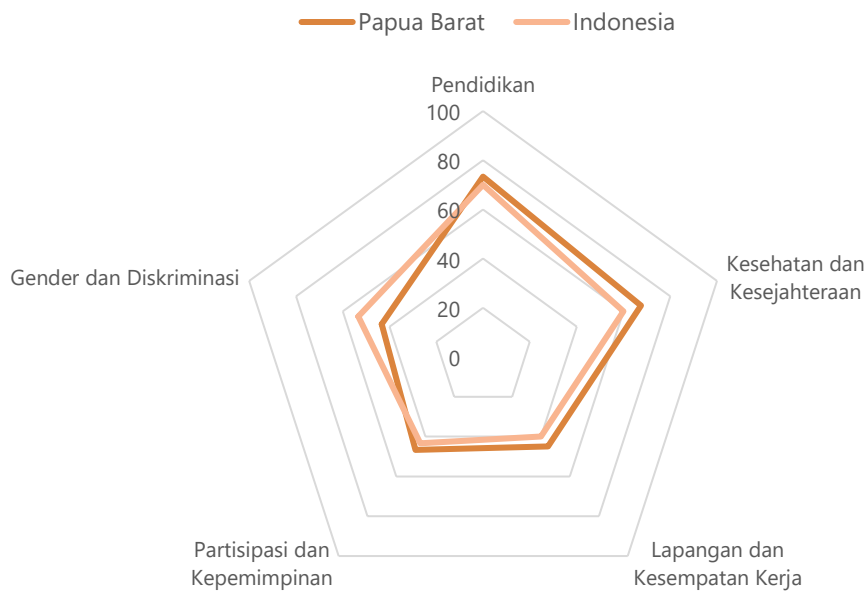
Jika membandingkan nilai domain dengan nasional hanya domain gender dan diskriminasi yang berada di bawah nasional. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai pada domain gender dan diskriminasi karena sejak 2020 mengalami stagnansi. Indikator yang perlu di tingkatkan pada domain ini adalah indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Gambar 39. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Barat pada 2021

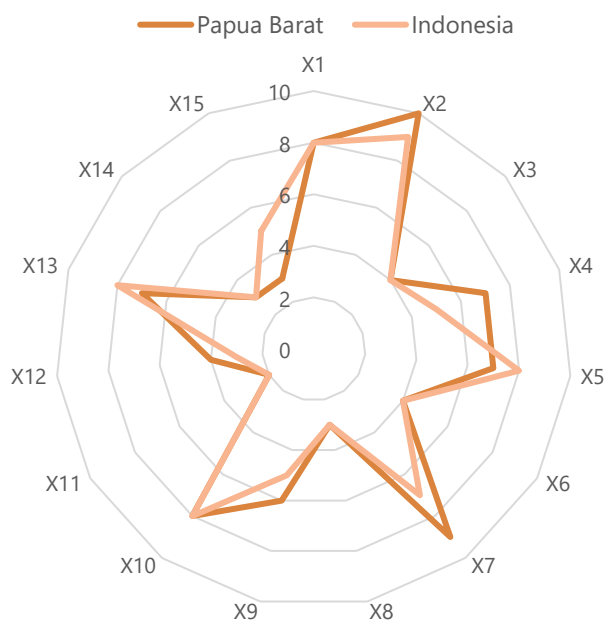
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Papua Barat 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Papua Barat dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Papua Barat dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

3.34 Provinsi Papua

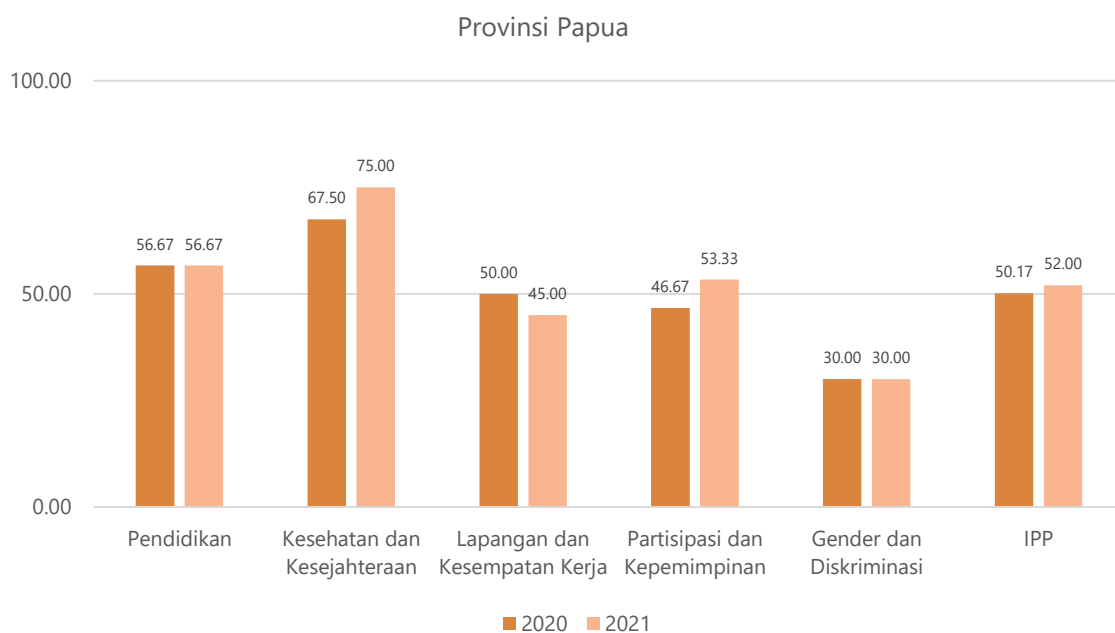
Provinsi Papua memiliki 934.190 jiwa pemuda pada 2021 dengan sebaran 487.590 pemuda laki-laki dan 446.600 pemuda perempuan. Nilai IPP Provinsi Papua mengalami peningkatan sebesar 1.83 poin dari 50.17 pada 2020 menjadi 52 pada 2021. Provinsi Papua berada pada peringkat 19 pada 2021. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain partisipasi dan kepemimpinan.

Sementara hanya domain lapangan dan kesempatan kerja provinsi papua mengalami penurunan pada tahun 2021. Jika membandingkan dengan nilai domain nasional persentase pemuda wirausaha kerah putih berada di bawah nasional yaitu 0.16 sementara nasional 0.41. Indikator lainnya pada domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu TPT Pemuda Provinsi Papua sudah jauh berada di bawah nasional sehingga perlu adanya upaya meneruskan penurunan TPT Pemuda di Provinsi Papua.

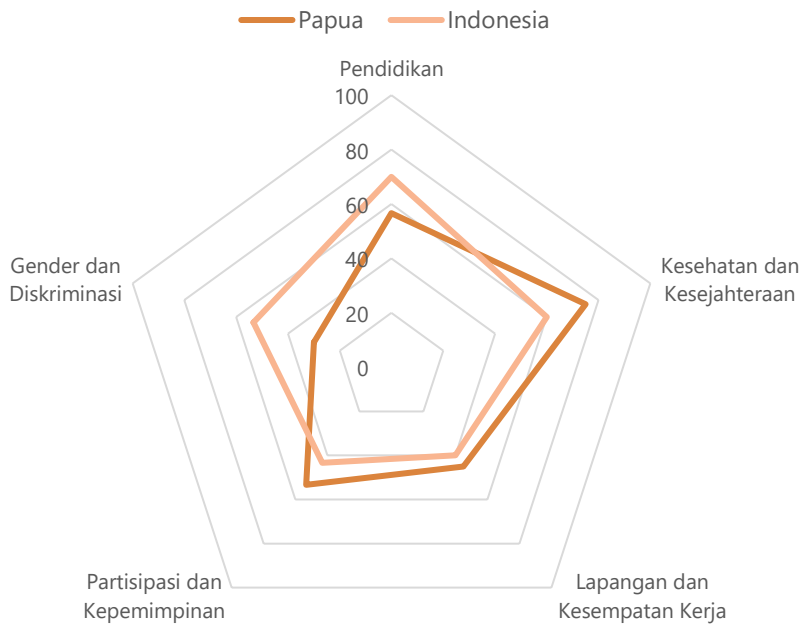
Sementara untuk domain pendidikan perlu ada peningkatan di seluruh indikator agar dapat meningkatkan Domain Pendidikan, karena jika dibandingkan dengan rata-rata nasional seluruh indikator pada Domain Pendidikan berada di bawah nasional.

Gambar 40. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua pada 2021

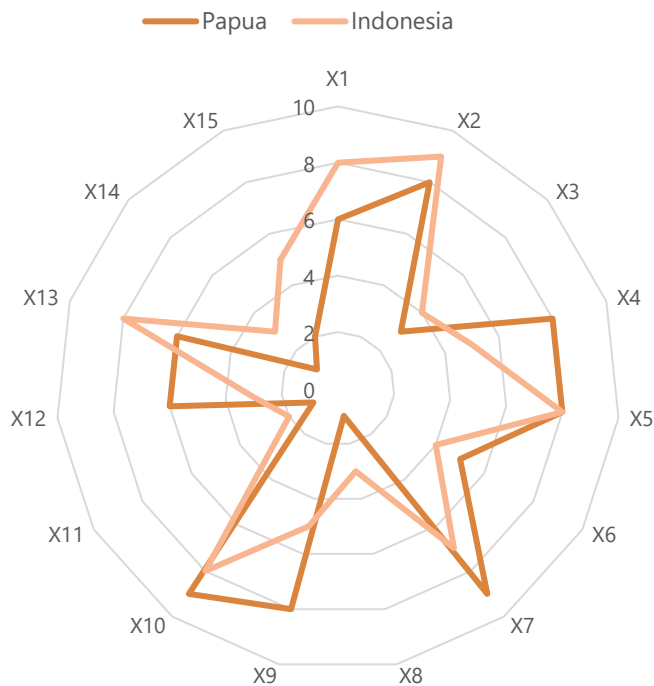
a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Papua 2020 dan 2021



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Papua dan Nasional pada 2021



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Papua dan Nasional pada 2021



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)

IV. Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan

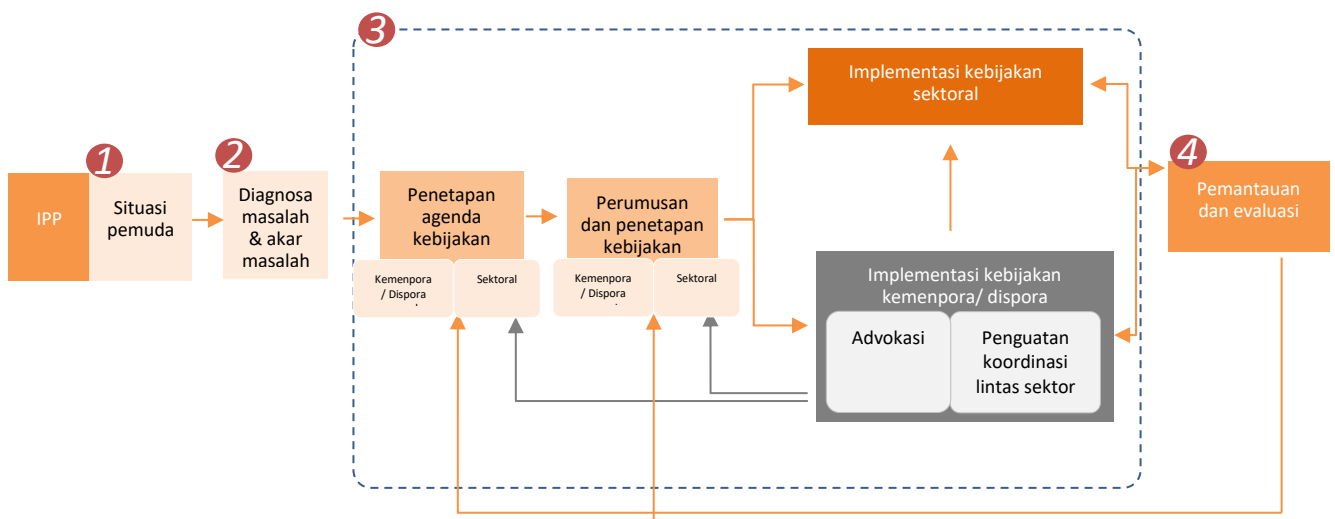
Pembangunan pemuda idealnya diarahkan untuk menciptakan pemuda yang berkualitas, yaitu pemuda memiliki kapasitas (terdidik), sehat fisik dan mental, mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan (tercermin dari baiknya capaian kelima domain Indeks Pembangunan pemuda (IPP)). Keberadaan IPP mempermudah proses penilaian terhadap keberhasilan pembangunan pemuda karena situasi pemuda di berbagai aspek kehidupannya dapat tercermin dalam satu angka². IPP (baik angka indeksnya maupun angka indikator ememberikan gambaran terkait situasi pemuda (aspek *what*), dinamika ketimpangan pembangunan pemuda antar wilayah (aspek *where*), serta sejauh mana situasi pemuda telah berhasil berkembang waktu ke waktu (aspek *when*) dalam mewujudkan wajah ideal pemuda Indonesia.

Bagaimana IPP dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan wajah ideal pemuda Indonesia? Merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi pemuda merupakan aspek kunci untuk dapat terus mendorong perbaikan situasi pemuda. Untuk tujuan ini, IPP dapat dimanfaatkan sebagai alat kebijakan untuk menelusuri faktor yang menyebabkan munculnya situasi pemuda tertentu (aspek *why*) dan strategi yang diperlukan (aspek *how*), apabila dilakukan analisis secara terstruktur dan komprehensif.

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai proses untuk memanfaatkan IPP sebagai alat untuk mendorong perumusan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan (dan tantangan yang dihadapi) pemuda. Proses untuk memanfaatkan IPP sebagai alat untuk merumuskan kebijakan ini terbagi atas empat tahap, yaitu 1) menganalisis situasi pemuda, 2) menganalisis akar masalah, 3) penentuan dan pelaksanaan kebijakan, serta 4) pemantauan dan evaluasi. Keempat tahap ini tergambar pada gambar berikut.

²Tanpa IPP, pengambilan kesimpulan situasi pemuda menjadi aktivitas yang menantang karena beragamnya indikator (dengan tingkat capaian yang beragam pula) yang berpotensi/dapat digunakan dalam menilai situasi pemuda.

Gambar 41. Diagram Alur Proses Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan dalam Konteks Pembangunan Pemuda



4.1 Tahap 1 Mengalisis situasi pemuda melalui IPP

Gambaran situasi pemuda (profil pemuda) yang diperoleh dari IPP ini menjadi pintu masuk untuk memahami lebih jauh mengenai faktor (masalah dan akar masalah) yang memengaruhi situasi pembangunan pemuda pada masing-masing aspek kehidupan pemuda. Dengan berkoordinasi dengan BPS provinsi atau kabupaten/kota, indikator penyusun IPP dapat di dianalisis lebih jauh untuk mengetahui perbedaan dinamika situasi pemuda diantara pemuda dengan latar belakang sosio-demografi yang berbeda, misalnya diantara pemuda laki-laki / perempuan, pemuda disabilitas/non disabilitas, dan antar wilayah.

Pada tahap ini, kesadaran akan adanya persoalan pemuda di wilayahnya dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan hal yang perlu dimiliki pemerintah daerah, terutama pemimpin di tingkat daerah. Ketika hasil analisis situasi pemuda menunjukkan bahwa pemuda memiliki persoalan di lapisan atau domain kehidupan tertentu (yang tergambar dari perkembangan capaian indikator-indikator IPP), pemerintah daerah perlu mengakui keberadaan persoalan tersebut dan memiliki komitmen untuk membenahi persoalan yang terjadi.

4.2 Tahap 2 Menganalisis akar masalah

Mengetahui konteks, masalah, dan penyebab dari masalah masih rendahnya capaian dari indikator IPP tertentu diperlukan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pemuda ke depan. Dengan mengarahkan kebijakan pada akar persoalan, rumusan kebijakan pembangunan pemuda diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendorong perbaikan situasi pemuda.

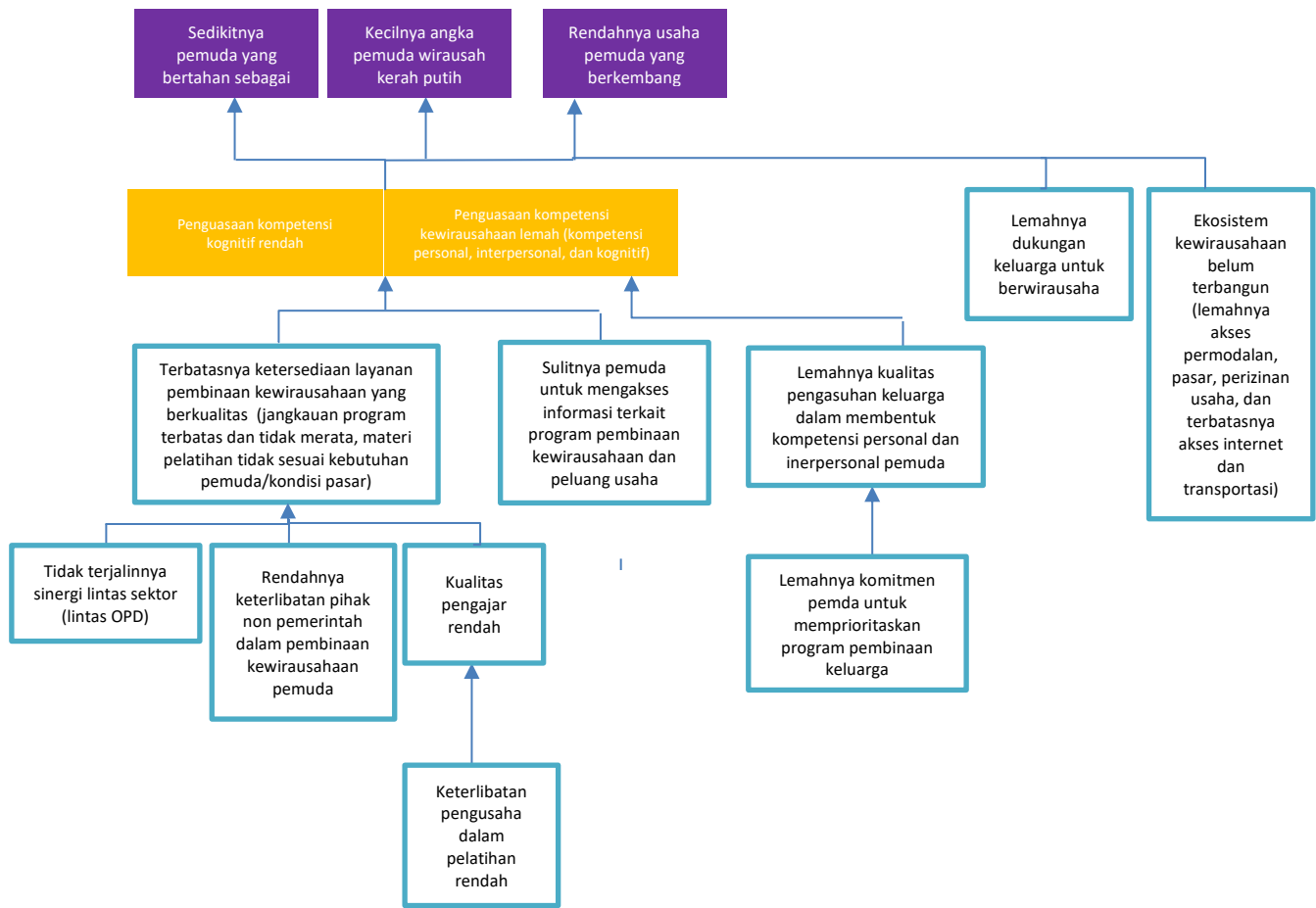
Untuk memahami faktor yang memengaruhi situasi pembangunan pemuda, masing-masing indikator IPP (tidak hanya angka indeks total dari IPP) dapat dibedah/dikaji/dianalisis lebih jauh dengan mencari tahu jawaban dari pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” situasi tertentu pemuda dapat terjadi. Pada tahap ini, koordinasi dengan lintas sektor terkait dan lintas pemangku kepentingan diharapkan sudah terjalin.

Penggalian akar masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan dengan menganalisis data berbentuk angka, sementara melalui pendekatan kualitatif, pengetahuan diperoleh dengan menghimpun dan menganalisis data selain angka untuk memahami perilaku, nilai, persepsi individu/kelompok terhadap topik yang dianalisis. Pendekatan kuantitatif diantaranya dilakukan dengan menganalisis korelasi dan regresi dari indikator-indikator yang terdapat dalam IPP dan indikator lainnya. Sementara pengumpulan informasi melalui pendekatan kualitatif dapat dilakukan diantaranya melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD, wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi, analisis studi kasus. Pihak yang dapat terlibat diantaranya pemuda, rumah tangga dengan pemuda, masyarakat, institusi sekolah, tempat kerja, pemerintah pusat dan daerah, NGO, dan akademisi—pihak yang dilibatkan sangat bergantung pada topik yang dianalisis.

Ketika memetakan akar masalah iniperlu dilakukakan pula pemetaan pemangku kepentingan yang memiliki (potensi) peran strategis untuk menyelesaikan masalah /akar masalah. *Power* dan agenda yang dimiliki aktor tersebut perlu dianalisis, disertai celah yang dimiliki oleh pemerintah saat ini dalam menyelesaikan masalah pembangunan pemuda. Pemangku kepentingan ini lah yang selanjutnya akan diadvokasi oleh Kemenpora atau Dispora (dijelaskan dalam Tahap 3 di bawah) untuk menyelenggarakan intervensi yang memastikan pemuda ikut serta sebagai objek dan subjek pembangunan).

Berikut disajikan contoh analisis akar masalah pembangunan pemuda pada domain partisipasi dan kesempatan kerja pada tingkat nasional. Analisis ini dilakukan melalui FGD pengembangan Background Study RPJPN dan RPJMN Bidang Pemuda dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang partisipasi dan kesempatan kerja termasuk kementerian/lembaga, pemuda, akademisi, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan pihak swasta.

Gambar 42. Ilustrasi analisis akar masalah pengembangan kewirausahaan pemuda pada domain partisipasi dan kesempatan kerja



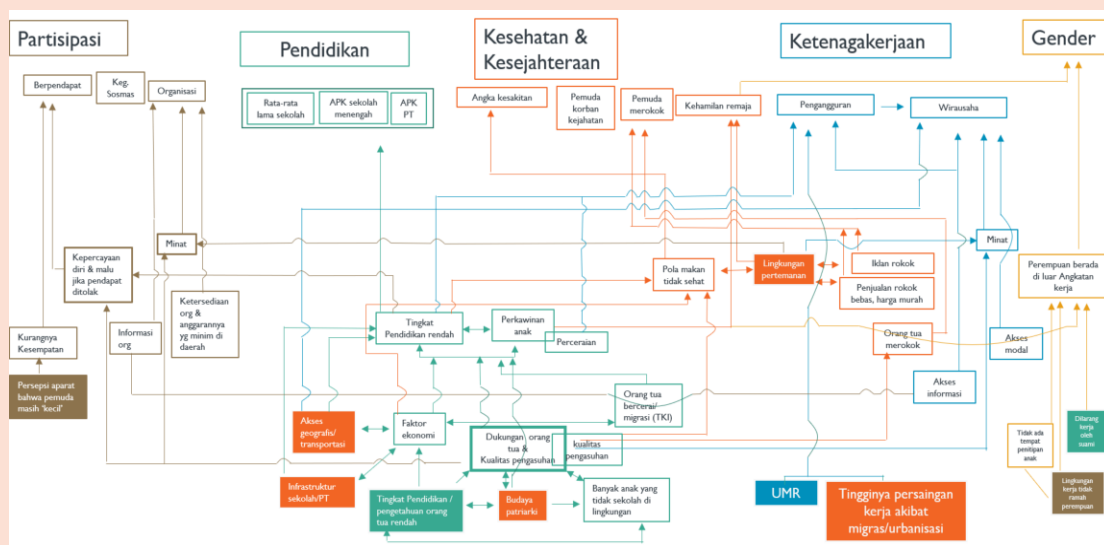
Sumber: FGD perumusan background study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pemuda

Kotak 1

Analisis Persoalan Pembangunan Pemuda di Jawa Barat

Contoh lain proses penggalian masalah persoalan pembangunan pemuda dapat dilihat dalam Bab 4 Laporan IPP tahun 2019, dengan studi kasus di Jawa Barat. Pada laporan tersebut, proses penggalian akar masalah pembangunan pemuda di Jawa Barat ini dilakukan dengan penghitungan data IPP hingga tingkat kabupaten/kota (hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan BPS daerah). Analisis diperdalam dengan melakukan FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan isu pembangunan pada 5 domain pembangunan pemuda dalam IPP (meliputi OPD lintas sektor, akademisi, NGO, dan organisasi pemuda). Diskusi dilakukan secara terpisah untuk kelima domain tersebut. Hasil pemetaan persoalan pembangunan pemuda di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 43. Pemetaan Akar Masalah Pembangunan Pemuda, Studi Kasus di Jawa Barat



Sumber: (Bappenas 2020), diolah

Pada gambar ini terlihat bahwa masing-masing domain dan indikator tidak benar-benar terpisah satu sama lainnya. Terdapat keterkaitan persoalan dari masing-masing indikator penyusun IPP—ketika intervensi diarahkan untuk menysasar persoalan ini (dan akar masalahnya), diharapkan perbaikan situasi seluruh aspek kehidupan pemuda dapat dicapai.

Catatan bagi pelaksanaan penggalian akar masalah adalah sebagai berikut:

- Mengingat setiap wilayah di Indonesia memiliki dinamika pembangunan pemuda yang berbeda, pemetaan akar persoalan pembangunan pemuda di wilayah lain kemungkinan besar akan menghasilkan pemetaan persoalan yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi di Jawa Barat.
- Dalam menghimpun data dan informasi, proses triangulasi perlu dilakukan. Triangulasi adalah proses untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat ditelusuri dengan memastikan konsistensi temuan berdasarkan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Proses ini menduduki peranan penting dalam rangka memberikan masukan dalam proses formulasi kebijakan pembangunan pemuda.

4.3 Tahap 3 Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

Proses perumusan kebijakan terdiri dari rangkaian kegiatan yang membentuk sebuah siklus. Siklus kebijakan dimulai dengan penerapan agenda kebijakan, diikuti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya bermanfaat untuk mendorong perbaikan kebijakan ke depannya. Siklus proses perumusan kebijakan dapat dilihat pada gambar berikut.

Dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan pemuda, seperti yang terlihat pada Gambar 40 di atas, Kemenpora dan Dispora menjalankan peran untuk mengadvokasi dan menguatkan koordinasi pembangunan pemuda dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan yang terjalin sejak tahap perencanaan. Peran ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 yang menempatkan Kemenpora sebagai Kementerian Kelompok III, yaitu kementerian yang menangani pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Status Kemenpora sebagai Kementerian Kelompok III ini serupa dengan status yang dimiliki oleh Bappenas, KemenPAN RB, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemen PPPA, dan BRIN. KL kelompok III ini merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, tapi fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan bukan menjadi bagian dari fungsi KL kelompok III.

1. Aspek yang perlu diadvokasi oleh Kemenpora/Dispora ke berbagai pemangku kepentingan diantaranya adalah terkait aspek berikut. Advokasi poin 1-3 ditujukan untuk mendorong perbaikan capaian pembangunan pemuda pada domain 1, 2, 3, dan 5; sementara advokasi poin 4 dilakukan dalam rangka memastikan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan—aspek yang diusung dalam Domain 4 IPP.
2. Memastikan instansi pemerintah lintas sektor memiliki kebijakan dan program yang mengintervensi akar persoalan pembangunan pemuda. Advokasi agenda kebijakan ini dapat berpijak dari hasil analisis situasi dan akar masalah pembangunan pemuda (tahap 1 dan 2 dari proses merumuskan IPP menjadi kebijakan di atas)
3. Memastikan program kementerian/dinas lintas sektor (terutama terkait kelima domain pembangunan pemuda) dapat diakses oleh seluruh pemuda secara setara termasuk pemuda disabilitas, laki-laki dan perempuan, berpendidikan/berketerampilan rendah, pemuda luar sekolah, miskin, pemuda dengan HIV, pemuda yang menikah/hamil di usia anak, dan pemuda pengungsi
4. Memastikan penyelenggaraan program kementerian/dinas lintas sektor (terutama terkait 5 domain pembangunan pemuda) mempertimbangkan aspirasi pemuda, sesuai dengan kebutuhan spesifik pemuda, serta memperhatikan karakteristik pemuda rentan sehingga layanan dapat diakses secara mudah, aman dan nyaman oleh pemuda
5. Memastikan adanya partisipasi bermakna pemuda sebagai aktor pelaksana dari intervensi pembangunan lintas sektor yang dilakukan (tidak hanya intervensi terkait kepemudaan, tapi juga intervensi umum lainnya), sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan evaluasi

Diakui bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks. Kompleksitas ini terjadi karena banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pemuda (paling tidak terdapat 27 kementerian/lembaga yang terlibat

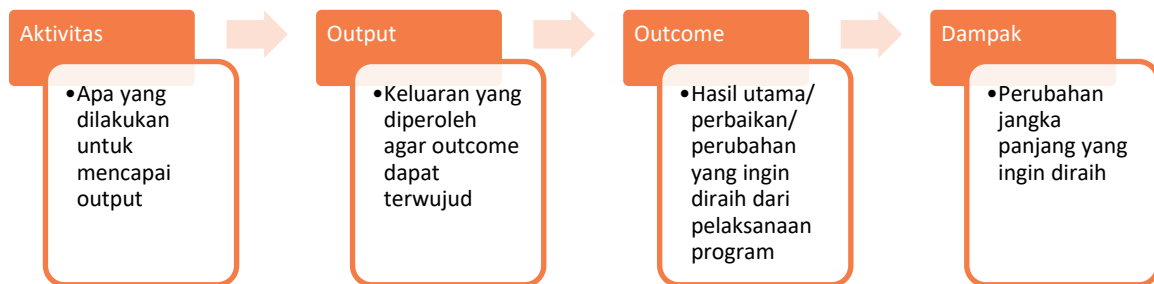
dalam upaya membangun pemuda—berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2022). Disamping itu, faktor politik seringkali memegang peranan penting dalam pengambilan kebijakan publik disertai konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Pemahaman bersama terhadap akar masalah pembangunan pemuda dapat memberikan pilihan kebijakan yang lebih baik untuk dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan secara sinergis. Terhadap konflik kepentingan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan, dibutuhkan keterampilan untuk mengkomunikasikan bukti dengan berbagai pihak. Hal ini untuk menghindari proses perumusan kebijakan yang hanya berbasis opini dan disusupi kepentingan politik yang berorientasi jangka pendek.

Dalam merancang program/intervensi kebijakan, kerangka berpikir logis atau kerangka *theory of change* dapat digunakan untuk memfasilitasi proses berfikir dalam menganalisis kegiatan / intervensi yang dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (Stein dan Valters 2012). Kerangka *theory of change* dapat memetakan proses perubahan yang diharapkan terjadi, memberikan landasan terhadap intervensi yang dipilih, dan membantu advokasi/komunikasi rancangan kebijakan ke berbagai pemangku kepentingan. Pada saat melakukan pemantauan dan evaluasi program (dijelaskan dalam sub bab 'tahap 4'), dilakukan pengujian terhadap teori perubahan yang dirumuskan ini, sehingga dapat diketahui apakah intervensi dapat menghasilkan dampak yang diharapkan.

Penerapan kerangka berfikir logis ini dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan 'jika ..., maka...'. Hal ini dapat diterapkan dalam membangun logika logis dari input hingga dampak seperti yang tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 44. Kerangka Berfikir Logis Perencanaan Kebijakan



Pada tabel berikut disajikan contoh kerangka berfikir logis dalam perumusan kebijakan terkait pengembangan kewirausahaan pemuda. Kerangka berfikir logis ini didasarkan pada analisis akar masalah yang disajikan pada Gambar 41.

Tabel 1. Kerangka Berfikir Logis Upaya Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Kegiatan	Output	Outcome	Dampak	Pemangku Kepentingan
Merumuskan skema insentif bagi pemangku kepentingan yang mendukung upaya pembinaan kualitas pengasuhan dan keterampilan kerja/wirausaha pemuda secara berkelanjutan (sebagai tenaga pengajar, dalam penyusunan kurikulum, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Tersusun dan terlaksananya rumusan insentif bagi pemangku kepentingan yang menjalankan kegiatan pembinaan keterampilan kerja/wirausaha pemuda secara berkelanjutan Meningkatnya kapasitas pemuda dalam melakukan kegiatan wirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya proporsi pemuda wirausaha Menurunnya tingkat pengangguran nasional Meningkatnya proporsi pemuda wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja 	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Bappeda, Dispora, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, pengusaha/pihak swasta, akademisi
Kampanye/promosi pemuda pewirausaha sukses secara luas dan berkelanjutan untuk membangun citra positif profesi wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> Terbangun persepsi positif keluarga terhadap profesi pewirausaha Terjadinya perbaikan dukungan keluarga bagi pemuda pewirausaha 			Bappeda, Dispora, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, media
Pengembangan sistem penyebaran informasi pembinaan kewirausahaan dan peluang usaha secara luring maupun daring	<ul style="list-style-type: none"> Pemuda mengetahui keberadaan program dan informasi dapat dengan mudah diakses pemuda Meningkatnya jumlah pemuda yang mengakses program pembinaan 			Bappeda, Dispora, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, media
Menyusun instrument sinkronisasi dan	Tersusun dan terlaksananya rancangan koordinasi perencanaan	Terselenggaranya program pengembangan		Bappeda, Dispora, dan

Kegiatan	Output	Outcome	Dampak	Pemangku Kepentingan
koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta instrument pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemuda lintas sektor	dan penganggaran RKP lintas K/L	kewirausahaan pemuda yang sinergis lintas sektor		OPD sektoral terkait
Pemetaan (beserta pendataan) target sasaran dan sebaran kegiatan kepemudaan lintas K/L yang tumpang tindih	Terhimpunnya data sasaran, deskripsi kegiatan, dan sebaran kegiatan lintas dinas yang tumpang tindih			Bappeda, Dispora, dan OPD sektoral terkait
Merancang strategi untuk mengadvokasi serta melakukan dialog terencana secara berkelanjutan dengan OPD dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya celah ketersediaan layanan kepemudaan (layanan kewirausahaan dan pengasuhan)	Terlaksananya dialog lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan secara berkelanjutan			Bappeda, Dispora, dan OPD sektoral terkait

4.4 Tahap 4 Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi (P&E) merupakan bagian penting dari siklus pelaksanaan program pembangunan. Pemantauan dan Evaluasi (P&E) telah menjadi bagian yang terintegrasi dari tahapan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penyusunan laporan P&E rencana pembangunan merupakan agenda rutin dari setiap instansi pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten/kota (SKPD, Bappeda) hingga pusat (Kementerian/Lembaga). Kerangka hukum yang menjadi landasan penyusunan P&E di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan, PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sulistyaningrum 2018; Kemenpora 2019).

Pada dasarnya, P&E dilakukan untuk mengukur hasil dari intervensi pembangunan yang dilakukan. Tujuan dari penyelenggaraan pemantauan adalah untuk mengetahui seberapa baik program diimplementasikan. Sementara tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk menilai tingkat relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak dari program. Dengan kata lain, pemantauan melakukan penilaian terkait aksi/kegiatan yang dilakukan, sementara evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan. Dengan perbedaan ini, aspek yang dianalisis dalam kegiatan pemantauan akan lebih berhubungan dengan analisis input, pelaksanaan kegiatan, dan output³ dari intervensi; sementara evaluasi fokus pada analisis output⁴, outcome dan dampak dari intervensi. Angka IPP dan indikator penyusunnya dapat digunakan untuk menilai *outcome* dari upaya pembangunan pemuda yang dilakukan (dalam kerangka evaluasi kebijakan pembangunan pemuda).

Aspek yang perlu menjadi catatan, menurut teori P&E, adalah bahwa P&E pembangunan pemuda tidak hanya dapat dijadikan alat untuk melaporkan kinerja pemerintah/menilai kinerja organisasi (*proving*), tapi juga untuk memberikan indikasi awal adanya progress untuk mencapai tujuan kegiatan/program, munculnya dampak 'ikutan'⁵ dari program, dan memberikan pembelajaran (feedback atas kinerja) agar terjadi inovasi dan perbaikan pelaksanaan program ke depannya (*improving*). Lebih jauh lagi, P&E bahkan dapat menjadi pintu masuk untuk menghubungkan (meningkatkan koordinasi) berbagai pemangku kepentingan (*relating*) (Hoang 2014).

Namun saat ini, struktur laporan evaluasi rencana pembangunan dinas dan kementerian lemah di sisi *improving*. Di dalam PP 39 tahun 2006 memang telah diarahkan untuk mencantumkan kendala yang dihadapi dan laporan P&E memang telah memaparkan kendala pelaksanaan kegiatan/program—yang berhubungan dengan tidak tercapainya target output. Namun analisisnya belum ke arah analisis/penilaian indikasi awal tercapainya tujuan kegiatan/program (untuk laporan pemantauan) dan efektifitas capaian output tersebut terhadap pencapaian efek program yang diharapkan—dampaknya terhadap masyarakat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari program/kegiatan (untuk laporan evaluasi). Mengabaikan informasi terkait indikasi / efektivitas pelaksanaan program terhadap pencapaian target program berarti mengabaikan potensi inovasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan program ke depannya.

Penyelenggaraan P&E pembangunan pemuda ke depan perlu dilakukan dengan menitikberatkan pada penelusuran, paling tidak, pada aspek relevansi, efektivitas dan

³Output yang terlihat dalam jangka pendek

⁴Terutama output yang terlihat dalam jangka panjang

⁵Yang dimaksud dengan dampak 'ikutan' adalah dampak yang terjadi dan dirasakan masyarakat namun tidak direncanakan saat perencanaan program

efisiensi intervensi (jika memungkinkan, penelusuran dampak dan keberlanjutan dari program juga perlu dilakukan). Ketika memantau capaian output, misalnya, penilaian efektivitas intervensi dapat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan intervensi baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan biaya yang diperlukan. Begitu pula dengan evaluasi outcome dan dampak. Dengan strategi ini, hasil P&E akan menghasilkan rekomendasi perbaikan program dan kebijakan kepemudaan ke depannya untuk mencapai target kualitas pemuda yang diharapkan.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Secara nasional, capaian pembangunan pemuda Indonesia telah mengalami perbaikan pada tahun 2021. Namun, pandemi COVID-19 telah memperlambat capaian pembangunan pemuda (terlihat dari capaian 2020 dan 2021). Pada tahun 2021, pemulihan pasca krisis pandemi COVID-19 tidaklah seragam antar domain, antar indikator, dan antar provinsi.

Secara nasional, IPP telah kembali ke tren sebelum krisis pandemi COVID-19. Berdasarkan lima domain, dua domain belum kembali ke tren sebelum krisis yakni domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Dari total 15 indikator, 8 diantaranya telah kembali bahkan memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum krisis. Namun, sebanyak 7 indikator lainnya masih belum pulih kembali ke tren sebelum krisis. Dari 34 provinsi, sebanyak 18 provinsi mengalami peningkatan IPP di tahun 2021 sedangkan sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan yang belum pulih ke situasi sebelum krisis.

Untuk dapat terus mendorong perbaikan capaian pembangunan pemuda, kebijakan yang responsif terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi pemuda menjadi aspek kunci. Empat langkah berikut menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan untuk mewujudkan perbaikan capaian pembangunan pemuda. Pertama, mengalisis situasi pemuda melalui IPP sebagai landasan, kedua, menganalisis akar masalah secara tepat, ketiga, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang logis dan cermat, dan keempat pemantauan dan evaluasi yang objektif dan transparan.

5.2 Arah Ke Depan

Setidaknya terdapat tiga arah utama yang dapat dijadikan landasan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kebijakan pembangunan pemuda.

1. Rekomendasi ke pengambil kebijakan sektoral untuk memerhatikan capaian pemuda berdasarkan masing-masing domain sesuai dengan peran masing-masing, misalnya domain pendidikan oleh Kemendikbud dan domain kesehatan dan kesejahteraan oleh Kemenkes.
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi dan peran strategis dalam tata kelola kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional. Kemenpora dapat menjadi orkestrator dan advokator yang mengkoordinasikan kebijakan pengambil kebijakan sektoral dalam kerangka perbaikan capaian pembangunan pemuda.
3. Peran pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota) sangat diperlukan dalam keberhasilan perbaikan capaian pembangunan pemuda. Target IPP secara nasional tidak akan tercapai tanpa pencapaian pambangan pemuda di semua daerah di Indonesia.

Daftar Acuan

Badan Pusat Statistik Statistik Pemuda Indonesia 2021

Bappenas. 2018. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017. Jakarta.

Bappenas. 2020. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019. Jakarta.

Bappenas. 2022. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021. Jakarta.

Hoang LA. 2014. Monitoring and Evaluation in Development. Melbourne.

Kemenpora. 2019. Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2018. Jakarta.

Stein D, Valters C. 2012. UNDERSTANDING THEORY OF CHANGE IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT. London. [dalam jaringan] <https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/UNDERSTANDINGTHEORYOFChangeSteinValtersPN.pdf>

Sulistyaningrum WS. 2018. Workshop Evaluasi Terpadu Perencanaan Pembangunan Pemuda, Fokus: Kewirausahaan Pemuda. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019

PP 39 tahun 2006

Lampiran

Lampiran 1

Tabel A1. Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (dalam ribuan jiwa Tahun 2021)

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Aceh	692.23	691.98	1,384.21
Sumatera Utara	1,905.90	1,826.34	3,732.24
Sumatera Barat	690.06	673.77	1,363.83
Riau	877.43	844.97	1,722.40
Jambi	444.47	444.84	889.31
Sumatera Selatan	1,076.24	1,053.40	2,129.64
Bengkulu	244.83	234.42	479.25
Lampung	1,040.25	993.92	2,034.17
Kep. Bangka Belitung	183.55	179.34	362.90
Kepulauan Riau	282.90	311.61	594.51
DKI Jakarta	1,308.64	1,346.88	2,655.53
Jawa Barat	6,298.28	6,063.43	12,361.71
Jawa Tengah	3,941.57	3,835.41	7,776.98
DI Yogyakarta	462.21	458.73	920.94
Jawa Timur	4,338.28	4,372.95	8,711.23
Banten	1,663.05	1,613.65	3,276.70
Bali	534.53	514.68	1,049.20
Nusa Tenggara Barat	632.22	642.50	1,274.72
Nusa Tenggara Timur	690.78	695.64	1,386.42
Kalimantan Barat	638.48	629.93	1,268.41
Kalimantan Tengah	344.22	329.55	673.77
Kalimantan Selatan	516.35	497.51	1,013.86
Kalimantan Timur	460.43	441.38	901.82
Kalimantan Utara	91.96	84.62	176.58
Sulawesi Utara	304.15	283.87	588.03
Sulawesi Tengah	382.61	381.80	764.40
Sulawesi Selatan	1,046.16	1,068.99	2,115.15
Sulawesi Tenggara	337.57	340.95	678.52
Gorontalo	153.01	147.46	300.47
Sulawesi Barat	176.45	174.61	351.06
Maluku	234.62	224.31	458.93
Maluku Utara	162.02	160.94	322.96
Papua Barat	135.08	128.04	263.12
Papua	487.59	446.60	934.19
Indonesia	32,778.15	32,139.02	64,917.17

Sumber: Statistik Pemuda Indonesia, 2021

Lampiran 2 Metodologi Penghitungan IPP

Isi lampiran (Segoe UI, size 11, sentence case, alignment: left).

Lampiran 3

Tabel A2. Indikator Penyusun IPP per Provinsi dalam Periode 2019 - 2021

A. Domain Pendidikan

NO	PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH			APK SEKOLAH MENENGAH			APK PT		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	11.5	11.59	11.66	93.75	94.37	95.21	44.51	44.58	44.65
2	Sumatera Utara	11.02	11.26	11.35	92.17	93.13	94.34	30.82	31.14	31.10
3	Sumatera Barat	10.87	11.23	11.34	90.16	91.20	91.78	42.18	43.09	44.25
4	Riau	10.88	10.99	11.10	89.13	89.76	89.70	33.93	35.07	35.97
5	Jambi	10.63	10.86	11.00	84.85	86.34	86.57	30.71	31.42	30.74
6	Sumatera Selatan	10.38	10.54	10.67	84.03	85.22	85.78	25.59	26.41	26.32
7	Bengkulu	10.77	10.87	11.14	91.54	92.70	92.98	37.63	38.39	38.66
8	Lampung	10.25	10.46	10.53	88.45	89.26	90.71	21.98	23.08	22.64
9	Kepulauan Bangka Belitung	9.99	10.36	10.47	86.18	87.66	87.41	14.27	14.73	15.23
10	Kepulauan Riau	11.3	11.50	11.56	89.88	90.98	90.09	25.11	26.68	27.59
11	DKI Jakarta	11.91	12.04	12.13	82.75	84.22	83.80	39.43	40.34	40.05
12	Jawa Barat	10.54	10.69	10.81	84.14	85.03	85.53	25.15	25.75	25.83
13	Jawa Tengah	10.32	10.51	10.56	89.21	89.99	90.26	21.8	22.62	23.86
14	DI Yogyakarta	12.32	12.37	12.47	91.89	92.24	92.90	73.14	74.69	74.90
15	Jawa Timur	10.73	10.81	10.90	89.45	90.70	92.13	29.2	29.52	29.96
16	Banten	10.62	10.69	10.86	82.48	83.49	84.77	33.22	33.07	32.51
17	Bali	11.34	11.40	11.46	92.56	93.18	94.06	35.96	36.46	36.51
18	Nusa Tenggara Barat	10.64	10.98	11.12	91.48	92.70	93.73	30.7	31.28	32.26
19	Nusa Tenggara Timur	9.65	9.76	10.21	86.38	87.47	88.62	30.22	31.28	33.27
20	Kalimantan Barat	9.61	9.90	10.06	82.88	84.87	85.33	24.87	25.36	26.22
21	Kalimantan Tengah	10.18	10.56	10.78	85.51	86.28	86.94	25.45	25.70	26.46
22	Kalimantan Selatan	10.26	10.36	10.50	81.43	82.71	83.35	27.04	27.35	27.97
23	Kalimantan Timur	11.24	11.28	11.44	93.00	93.69	93.85	37.78	39.16	40.21
24	Kalimantan Utara	10.8	11.06	11.08	98.09	99.89	98.81	23.43	22.71	25.23
25	Sulawesi Utara	10.97	11.12	11.17	87.99	88.74	88.30	33.86	34.61	34.43
26	Sulawesi Tengah	10.31	10.37	10.54	89.06	90.21	90.55	38.64	39.32	40.11
27	Sulawesi Selatan	10.7	10.77	10.59	85.13	86.33	86.95	42.72	42.69	42.35
28	Sulawesi Tenggara	10.9	11.18	10.89	86.02	87.40	88.48	47.56	47.40	44.77
29	Gorontalo	9.89	9.90	10.14	83.38	83.82	83.68	36.71	37.74	37.32
30	Sulawesi Barat	9.88	10.14	10.43	83.37	84.51	86.58	30.85	29.44	30.15
31	Maluku	11.35	11.44	11.47	92.67	93.46	93.11	47.65	48.62	48.36
32	Maluku Utara	10.95	11.15	11.46	89.54	90.71	91.25	44.02	43.97	43.63
33	Papua Barat	10.78	10.78	11.02	92.06	94.00	93.74	34.83	35.30	35.80
34	Papua	7.71	7.90	8.07	77.28	79.08	78.43	21.08	21.87	20.04
35	Indonesia	10.63	10.78	10.89	87.30	88.32	88.93	30.28	30.85	31.19

B. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

NO	PROVINSI	ANGKA KESAKITAN PEMUDA			PERSENTASE PEMUDA KORBAN KEJAHATAN			PERSENTASE PEMUDA YANG MEROKOK			PERSENTASE REMAJA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	8.40	7.41	6.02	0.71	0.72	0.61	23.94	23.39	22.75	22.07	8.48	6.97
2	Sumatera Utara	6.05	6.59	4.40	1.24	1.24	0.95	22.61	22.36	22.05	20.22	19.11	20.92
3	Sumatera Barat	8.41	8.46	8.09	1.60	1.47	1.43	27.25	26.44	25.65	37.93	5.23	34.68
4	Riau	7.26	6.13	7.52	1.60	1.07	0.83	24.83	23.20	21.80	22.08	37.02	0.00
5	Jambi	5.76	5.21	3.44	1.16	0.67	0.74	25.00	24.63	22.73	35.46	27.07	11.66
6	Sumatera Selatan	6.95	7.55	10.25	1.40	1.78	1.03	28.18	27.47	26.63	14.04	33.84	16.27
7	Bengkulu	8.70	8.23	8.61	1.77	1.54	1.18	30.00	29.54	28.21	14.94	27.30	23.12
8	Lampung	9.82	8.98	7.96	1.79	1.48	1.09	30.63	30.67	29.87	20.97	7.78	49.01
9	Kepulauan Bangka Belitung	7.39	6.79	7.22	0.71	0.55	0.83	27.08	26.51	24.89	29.34	19.08	18.85
10	Kepulauan Riau	6.15	3.90	2.49	1.64	1.57	1.62	23.47	22.39	19.42	30.83	9.61	0.00
11	DKI Jakarta	7.38	8.01	7.46	1.99	1.69	1.11	21.90	22.07	21.93	32.48	24.52	18.26
12	Jawa Barat	9.14	9.49	11.71	1.43	1.30	1.02	29.55	29.13	28.61	21.89	14.50	16.71
13	Jawa Tengah	8.35	10.29	16.61	0.92	0.94	0.66	25.59	26.36	25.83	17.82	13.99	23.71
14	DI Yogyakarta	8.67	8.83	11.88	2.59	2.25	0.95	21.75	21.05	23.88	0.00	0.00	0.00
15	Jawa Timur	10.21	8.43	12.97	1.14	0.87	0.80	25.14	25.30	25.12	16.42	17.21	8.74
16	Banten	11.09	10.00	10.06	1.19	0.85	0.47	28.35	28.16	27.45	3.42	14.83	21.53
17	Bali	9.72	8.61	9.32	0.60	0.56	0.19	18.76	18.56	17.08	16.67	31.31	11.39
18	Nusa Tenggara Barat	14.80	14.14	15.01	2.24	1.86	1.72	29.13	28.59	28.91	15.21	21.96	23.41
19	Nusa Tenggara Timur	13.89	11.77	8.67	0.90	0.71	0.75	25.83	24.67	24.88	12.22	27.77	31.97
20	Kalimantan Barat	6.68	6.91	4.08	0.87	0.64	0.60	24.20	23.45	22.41	17.84	18.68	11.20
21	Kalimantan Tengah	7.89	6.33	6.02	0.81	0.69	0.44	25.49	24.07	23.93	13.63	15.79	18.06
22	Kalimantan Selatan	8.08	8.16	7.48	1.29	0.86	0.44	21.75	20.86	21.20	16.56	17.43	14.67
23	Kalimantan Timur	6.52	4.07	6.31	1.37	1.67	0.23	20.82	20.39	19.14	2.52	25.55	26.88
24	Kalimantan Utara	6.07	6.51	7.48	2.08	1.55	1.26	24.41	20.40	22.16	17.91	6.58	28.77
25	Sulawesi Utara	8.98	6.45	5.99	0.81	0.73	0.61	24.80	24.06	23.12	25.98	22.40	4.33
26	Sulawesi Tengah	10.21	7.91	7.56	1.42	1.24	1.01	28.11	26.82	24.87	18.59	6.58	15.24
27	Sulawesi Selatan	8.14	8.45	9.13	1.48	0.96	0.64	24.38	23.14	20.64	12.04	24.94	14.92
28	Sulawesi Tenggara	7.76	9.00	8.99	1.49	1.13	1.21	23.92	21.64	21.04	18.50	20.55	16.19
29	Gorontalo	12.42	9.07	11.53	1.73	0.89	0.49	28.34	25.95	25.00	19.59	16.33	15.66
30	Sulawesi Barat	9.58	9.66	9.44	0.42	0.71	0.38	24.92	25.00	23.49	30.58	38.63	18.98
31	Maluku	6.28	4.42	4.15	1.70	1.87	1.17	22.02	20.88	22.92	28.06	25.30	26.13
32	Maluku Utara	4.46	4.89	5.47	0.96	1.16	0.98	25.14	24.65	22.78	13.54	10.29	16.54
33	Papua Barat	5.96	4.60	7.17	1.91	1.56	1.14	25.06	21.33	22.19	14.50	20.74	6.50
34	Papua	4.67	4.93	4.13	1.63	1.28	0.66	22.38	24.55	20.38	2.52	5.31	5.86
35	Indonesia	8.78	8.58	10.23	1.31	1.14	0.85	25.99	25.70	25.07	17.92	18.22	16.97

C. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

NO	PROVINSI	PEMUDA WIRAUSAHA KERAH PUTIH			TPT PEMUDA		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	0.45	0.29	0.24	14.58	14.17	15.06
2	Sumatera Utara	0.36	0.43	0.38	12.73	13.93	13.11
3	Sumatera Barat	0.32	0.42	0.32	14.23	14.85	15.28
4	Riau	0.56	0.35	0.35	13.45	12.76	10.81
5	Jambi	0.05	0.13	0.25	11.38	12.82	12.34
6	Sumatera Selatan	0.24	0.44	0.24	11.64	12.98	12.27
7	Bengkulu	0.32	0.32	0.51	8.34	9.86	9.67
8	Lampung	0.30	0.27	0.41	10.73	10.28	11.31
9	Kepulauan Bangka Belitung	0.31	0.28	0.26	8.56	10.69	11.05
10	Kepulauan Riau	1.44	0.45	0.67	12.86	16.39	14.79
11	DKI Jakarta	0.47	0.20	0.41	12.97	20.08	16.94
12	Jawa Barat	0.64	0.64	0.48	18.54	21.55	20.79
13	Jawa Tengah	0.43	0.48	0.42	11.87	14.83	13.24
14	DI Yogyakarta	1.60	1.12	1.03	6.97	9.54	7.97
15	Jawa Timur	0.55	0.50	0.53	11.29	13.48	12.61
16	Banten	0.55	0.29	0.35	17.92	22.06	19.97
17	Bali	0.47	1.14	0.73	3.89	11.05	9.47
18	Nusa Tenggara Barat	0.30	0.31	0.33	8.06	8.6	6.74
19	Nusa Tenggara Timur	0.13	0.25	0.20	8.68	8.82	8.92
20	Kalimantan Barat	0.37	0.20	0.16	10.37	13.13	13.1
21	Kalimantan Tengah	0.54	0.27	0.24	9.87	10.94	11.3
22	Kalimantan Selatan	0.29	0.24	0.28	10.72	10.06	12.16
23	Kalimantan Timur	0.48	0.70	0.38	12.8	13.94	16.01
24	Kalimantan Utara	0.07	0.33	0.36	10.83	9.59	11.21
25	Sulawesi Utara	0.20	0.10	0.15	17.97	17.46	16.97
26	Sulawesi Tengah	0.39	0.21	0.07	7.08	8.51	8.14
27	Sulawesi Selatan	0.25	0.20	0.35	11.55	14.55	14.52
28	Sulawesi Tenggara	0.35	0.14	0.23	8.53	9.17	8.67
29	Gorontalo	0.23	0.16	0.16	10.7	9.9	8.69
30	Sulawesi Barat	0.30	0.34	0.05	7.77	6.87	8.84
31	Maluku	0.24	0.21	0.31	18.62	14.19	16.85
32	Maluku Utara	0.18	0.54	0.32	12.63	11.21	12.09
33	Papua Barat	0.52	0.39	0.49	14.41	13.8	12.55
34	Papua	0.10	0.26	0.16	7.55	7.87	7.51
35	Indonesia	0.47	0.44	0.41	13.03	15.23	14.42

D. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

NO	PROVINSI	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			PERSENTASE PEMUDA YANG AKTIF DALAM ORGANISASI			PERSENTASE PEMUDA YANG MEMBERIKAN SARAN/PENDAPAT DALAM RAPAT		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	87.55	87.55	85.71	4.37	4.37	2.64	8.44	8.44	13.56
2	Sumatera Utara	76	76.00	65.21	6.64	6.64	4.12	5.12	5.12	3.45
3	Sumatera Barat	67.92	67.92	74.43	4.68	4.68	3.34	9.81	9.81	7.49
4	Riau	79.41	79.41	70.15	6.44	6.44	2.63	6.39	6.39	5.39
5	Jambi	85.73	85.73	72.86	6.62	6.62	4.43	6.99	6.99	8.17
6	Sumatera Selatan	83.76	83.76	71.42	6.08	6.08	1.39	5.93	5.93	3.23
7	Bengkulu	78.65	78.65	64.80	7.79	7.79	4.54	9.9	9.90	5.20
8	Lampung	85.17	85.17	71.38	5.79	5.79	4.20	4.84	4.84	3.75
9	Kepulauan Bangka Belitung	76.4	76.40	58.89	4.57	4.57	2.68	2.62	2.62	3.63
10	Kepulauan Riau	74.99	74.99	50.40	4.58	4.58	5.71	8.99	8.99	2.46
11	DKI Jakarta	73.5	73.50	37.10	4.86	4.86	3.74	5.32	5.32	0.96
12	Jawa Barat	80.06	80.06	68.92	4.75	4.75	3.69	5.72	5.72	5.49
13	Jawa Tengah	90.22	90.22	76.77	9.79	9.79	8.19	10.48	10.48	6.03
14	DI Yogyakarta	87.99	87.99	72.89	15.75	15.75	11.32	19.22	19.22	11.04
15	Jawa Timur	86.32	86.32	76.18	6.53	6.53	5.43	6.79	6.79	5.05
16	Banten	74.08	74.08	67.63	2.92	2.92	0.91	4	4.00	3.84
17	Bali	78.79	78.79	69.98	17.68	17.68	16.71	6.99	6.99	4.12
18	Nusa Tenggara Barat	92.85	92.85	89.08	11.21	11.21	6.18	11.07	11.07	7.36
19	Nusa Tenggara Timur	83.18	83.18	80.20	5.22	5.22	4.67	7.55	7.55	8.76
20	Kalimantan Barat	75.05	75.05	67.15	3.08	3.08	2.76	4.79	4.79	7.51
21	Kalimantan Tengah	75.38	75.38	68.87	4.33	4.33	3.19	4.72	4.72	4.38
22	Kalimantan Selatan	76.31	76.31	67.03	5.02	5.02	2.36	3.61	3.61	2.90
23	Kalimantan Timur	70.55	70.55	50.56	4.87	4.87	4.15	5.12	5.12	2.62
24	Kalimantan Utara	68.33	68.33	43.23	4.63	4.63	3.28	5.59	5.59	5.22
25	Sulawesi Utara	85.84	85.84	83.35	10.42	10.42	9.85	6.45	6.45	4.66
26	Sulawesi Tengah	79.34	79.34	72.02	6.19	6.19	7.46	4.6	4.60	6.64
27	Sulawesi Selatan	78.45	78.45	70.85	3.98	3.98	4.47	3.7	3.70	3.58
28	Sulawesi Tenggara	69.07	69.07	57.12	2.15	2.15	2.32	4.6	4.60	4.51
29	Gorontalo	78.09	78.09	83.44	5.76	5.76	3.86	6.46	6.46	8.05
30	Sulawesi Barat	76.96	76.96	68.92	7.41	7.41	6.73	3.53	3.53	5.88
31	Maluku	77.15	77.15	81.50	9.53	9.53	14.51	2.53	2.53	7.75
32	Maluku Utara	83.02	83.02	77.25	7.78	7.78	9.13	7.66	7.66	10.69
33	Papua Barat	66.95	66.95	70.51	6.18	6.18	7.44	5.85	5.85	8.38
34	Papua	79.55	79.55	80.81	6.83	6.83	1.39	9.24	9.24	12.52
35	Indonesia	81.36	81.36	70.49	6.36	6.36	4.84	6.72	6.72	5.40

E. Domain Gender dan Diskriminasi

NO	PROVINSI	ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK			PERSENTASE PEMUDA PEREMPUAN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI			PERSENTASE PEMUDA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	6.59	5.43	4.60	47.72	48.34	49.73	17.64	14.46	15.7
2	Sumatera Utara	6.5	5.95	4.82	43.82	44.18	46.08	24.39	19.82	20.94
3	Sumatera Barat	5.96	5.03	3.48	52.14	53.38	55.01	21.36	19.01	19.61
4	Riau	8.3	9.19	5.55	43.54	42.66	46.10	23.15	20.39	20.97
5	Jambi	14.78	14.03	10.67	38.27	38.53	40.56	21.9	18.42	19.48
6	Sumatera Selatan	13.53	13.44	12.24	33.84	35.56	37.11	22.11	19.5	20.51
7	Bengkulu	13.24	10.68	11.93	45.81	47.34	48.93	21.29	19.17	19.36
8	Lampung	12.1	10.24	9.77	35.88	36.39	37.28	18.47	16.67	17.84
9	Kepulauan Bangka Belitung	15.48	18.76	14.05	34.12	33.19	32.61	28.21	23.65	25.65
10	Kepulauan Riau	3.82	7.31	2.89	37.9	43.84	40.95	37.57	35.65	38.56
11	DKI Jakarta	3.12	1.45	4.68	37.71	37.93	38.83	42.79	33.95	34.96
12	Jawa Barat	12.33	11.96	10.09	35.68	34.65	36.97	27.45	23.23	26.56
13	Jawa Tengah	10.19	10.05	9.75	36.38	37.19	38.35	29.57	26.24	29.01
14	DI Yogyakarta	3.06	1.83	3.52	59.99	59.16	61.32	39.81	31.69	36.23
15	Jawa Timur	11.11	10.67	10.44	38.54	39.29	41.10	25.91	22.36	23.99
16	Banten	6	6.23	6.00	35.65	33.76	37.23	32.7	26.93	28.33
17	Bali	10.18	8.79	5.06	44.98	44.37	45.97	43.23	32.75	31.38
18	Nusa Tenggara Barat	16.09	16.61	16.59	38.79	40.60	40.30	17.34	15.5	16.21
19	Nusa Tenggara Timur	8.51	9.22	5.95	41.15	43.40	45.04	15.55	14.37	14.43
20	Kalimantan Barat	17.86	17.14	13.84	34.63	37.42	37.08	19.94	18.83	17.69
21	Kalimantan Tengah	20.15	16.35	15.47	33.56	35.12	36.16	23.65	18.95	20.91
22	Kalimantan Selatan	21.18	16.24	15.30	37.57	37.78	38.35	23.67	21.38	22.52
23	Kalimantan Timur	12.36	11.79	8.64	46.1	45.88	46.76	27.96	24.48	25.17
24	Kalimantan Utara	12.94	12.70	10.16	38.94	39.56	40.46	27.51	21.96	24.42
25	Sulawesi Utara	13.54	14.01	13.56	38.53	40.00	41.52	22.5	18.62	18.05
26	Sulawesi Tengah	16.25	14.89	12.51	42.23	44.34	47.20	19.91	18.77	17.87
27	Sulawesi Selatan	12.11	11.25	9.25	48.21	45.49	48.14	22.02	17.58	18.28
28	Sulawesi Tenggara	16.56	16.09	13.26	46.29	46.58	46.52	21.37	17.77	19.47
29	Gorontalo	13.16	14.73	11.64	43.5	44.35	49.63	23.66	20.16	20.9
30	Sulawesi Barat	19.17	17.12	17.71	37.99	37.85	41.79	15.82	15.76	16.5
31	Maluku	9.54	6.84	7.08	50.8	51.25	52.21	14.89	13.9	14.73
32	Maluku Utara	14.36	15.29	13.09	47.26	44.90	46.07	17.15	13.86	14.04
33	Papua Barat	13.2	12.91	12.27	43.57	44.37	46.97	17.94	16.25	16.5
34	Papua	11.21	13.78	13.21	29.23	28.92	30.88	7.86	6.32	7.09
35	Indonesia	10.82	10.35	9.23	39.21	39.37	41.11	26.06	22.31	24.00

Lampiran 4

Tabel A3. Nilai Transformasi Indikator Penyusun IPP

A. Domain Pendidikan

NO	PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH			APK SEKOLAH MENENGAH			APK PT		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	8	8	8	10	10	10	5	5	5
2	Sumatera Utara	8	8	8	10	10	10	4	4	4
3	Sumatera Barat	8	8	8	10	10	10	5	5	5
4	Riau	8	8	8	9	9	9	4	4	4
5	Jambi	8	8	8	9	9	9	4	4	4
6	Sumatera Selatan	7	8	8	9	9	9	3	3	3
7	Bengkulu	8	8	8	10	10	10	4	4	4
8	Lampung	7	7	8	9	9	10	3	3	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	9	9	9	2	2	2
10	Kepulauan Riau	8	8	8	9	10	10	3	3	3
11	DKI Jakarta	8	9	9	9	9	9	4	5	5
12	Jawa Barat	8	8	8	9	9	9	3	3	3
13	Jawa Tengah	7	8	8	9	9	10	3	3	3
14	DI Yogyakarta	9	9	9	10	10	10	8	8	8
15	Jawa Timur	8	8	8	9	10	10	3	3	3
16	Banten	8	8	8	9	9	9	4	4	4
17	Bali	8	8	8	10	10	10	4	4	4
18	Nusa Tenggara Barat	8	8	8	10	10	10	4	4	4
19	Nusa Tenggara Timur	7	7	7	9	9	9	4	4	4
20	Kalimantan Barat	7	7	7	9	9	9	3	3	3
21	Kalimantan Tengah	7	8	8	9	9	9	3	3	3
22	Kalimantan Selatan	7	7	7	9	9	9	3	3	3
23	Kalimantan Timur	8	8	8	10	10	10	4	4	5
24	Kalimantan Utara	8	8	8	10	10	10	3	3	3
25	Sulawesi Utara	8	8	8	9	9	9	4	4	4
26	Sulawesi Tengah	7	7	8	9	10	10	4	4	5
27	Sulawesi Selatan	8	8	8	9	9	9	5	5	5
28	Sulawesi Tenggara	8	8	8	9	9	9	5	5	5
29	Gorontalo	7	7	7	9	9	9	4	4	4
30	Sulawesi Barat	7	7	7	9	9	9	4	3	4
31	Maluku	8	8	8	10	10	10	5	5	5
32	Maluku Utara	8	8	8	9	10	10	5	5	5
33	Papua Barat	8	8	8	10	10	10	4	4	4
34	Papua	6	6	6	8	8	8	3	3	3
35	Indonesia	8	8	8	9	9	9	4	4	4

B. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

NO	PROVINSI	ANGKA KESAKITAN PEMUDA			PERSENTASE PEMUDA KORBAN KEJAHATAN			PERSENTASE PEMUDA YANG MEROKOK			PERSENTASE REMAJA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	6	7	7	8	8	8	4	4	4	6	9	9
2	Sumatera Utara	7	7	8	6	6	7	4	4	4	6	6	6
3	Sumatera Barat	6	6	6	5	6	6	3	3	3	2	9	3
4	Riau	7	7	7	5	7	8	4	4	4	6	2	10
5	Jambi	8	8	9	7	8	8	4	4	4	3	4	8
6	Sumatera Selatan	7	7	5	6	5	7	3	3	3	7	3	7
7	Bengkulu	6	6	6	5	5	7	2	2	3	7	4	5
8	Lampung	6	6	7	5	6	7	2	2	2	6	9	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	8	9	8	3	3	4	4	6	6
10	Kepulauan Riau	7	9	9	5	5	5	4	4	5	4	8	10
11	DKI Jakarta	7	6	7	4	5	7	4	4	4	3	5	6
12	Jawa Barat	6	6	5	6	6	7	2	2	3	6	7	7
13	Jawa Tengah	6	5	2	7	7	8	3	3	3	7	7	5
14	DI Yogyakarta	6	6	5	2	3	7	4	5	4	10	10	10
15	Jawa Timur	5	6	4	7	8	8	4	3	4	7	7	9
16	Banten	5	6	5	7	8	9	3	3	3	10	7	6
17	Bali	6	6	6	8	9	10	5	5	6	7	4	8
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	4	5	2	3	2	7	6	5
19	Nusa Tenggara Timur	4	5	6	7	8	8	3	4	4	8	4	3
20	Kalimantan Barat	7	7	8	8	8	9	4	4	4	7	6	8
21	Kalimantan Tengah	7	7	7	8	8	9	3	4	4	7	7	6
22	Kalimantan Selatan	6	6	7	6	8	9	4	5	5	7	7	7
23	Kalimantan Timur	7	8	7	6	5	10	5	5	5	10	5	5
24	Kalimantan Utara	7	7	7	4	5	6	4	5	4	7	9	4
25	Sulawesi Utara	6	7	8	8	8	8	4	4	4	5	6	10
26	Sulawesi Tengah	5	7	7	6	6	7	3	3	4	6	9	7
27	Sulawesi Selatan	6	6	6	6	7	8	4	4	5	8	5	7
28	Sulawesi Tenggara	7	6	6	6	7	6	4	4	5	6	6	7
29	Gorontalo	4	6	5	5	8	9	3	3	4	6	7	7
30	Sulawesi Barat	6	6	6	9	8	9	4	4	4	4	2	6
31	Maluku	7	8	8	5	4	7	4	5	4	4	5	5
32	Maluku Utara	8	8	8	7	7	7	4	4	4	7	8	7
33	Papua Barat	8	8	7	4	5	7	4	5	4	7	6	9
34	Papua	8	8	8	5	6	8	4	4	5	10	9	9
35	Indonesia	6	6	5	6	7	8	3	3	4	7	6	7

C. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

NO	PROVINSI	PEMUDA WIRUSAHA KERAH PUTIH			TPT PEMUDA		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	3	2	2	5	5	5
2	Sumatera Utara	2	3	2	6	6	6
3	Sumatera Barat	2	3	2	5	5	5
4	Riau	3	2	2	6	6	7
5	Jambi	1	1	2	6	6	6
6	Sumatera Selatan	2	3	2	6	6	6
7	Bengkulu	2	2	3	8	7	7
8	Lampung	2	2	3	7	7	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	2	2	2	7	7	7
10	Kepulauan Riau	8	3	4	6	5	5
11	DKI Jakarta	3	2	3	6	3	4
12	Jawa Barat	4	4	3	4	3	3
13	Jawa Tengah	3	3	3	6	5	6
14	DI Yogyakarta	9	6	6	8	7	8
15	Jawa Timur	3	3	3	6	6	6
16	Banten	3	2	2	4	3	3
17	Bali	3	6	4	9	7	7
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	8	7	8
19	Nusa Tenggara Timur	1	2	2	7	7	7
20	Kalimantan Barat	2	2	1	7	6	6
21	Kalimantan Tengah	3	2	2	7	7	6
22	Kalimantan Selatan	2	2	2	7	7	6
23	Kalimantan Timur	3	4	2	6	6	5
24	Kalimantan Utara	1	2	2	7	7	6
25	Sulawesi Utara	2	1	1	4	4	4
26	Sulawesi Tengah	2	2	1	8	7	8
27	Sulawesi Selatan	2	2	2	6	5	5
28	Sulawesi Tenggara	2	1	2	7	7	7
29	Gorontalo	2	1	1	7	7	7
30	Sulawesi Barat	2	2	1	8	8	7
31	Maluku	2	2	2	4	5	4
32	Maluku Utara	1	3	2	6	6	6
33	Papua Barat	3	2	3	5	6	6
34	Papua	1	2	1	8	8	8
35	Indonesia	3	3	3	6	5	5

D. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

NO	PROVINSI	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN			PERSENTASE PEMUDA YANG AKTIF DALAM ORGANISASI			PERSENTASE PEMUDA YANG MEMBERIKAN SARAN/PENDAPAT DALAM RAPAT		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	9	9	9	1	1	1	4	4	6
2	Sumatera Utara	8	8	7	2	2	1	3	3	2
3	Sumatera Barat	7	7	8	2	2	1	4	4	3
4	Riau	8	8	8	2	2	1	3	3	3
5	Jambi	9	9	8	2	2	1	3	3	4
6	Sumatera Selatan	9	9	8	2	2	1	3	3	2
7	Bengkulu	8	8	7	2	2	2	4	4	3
8	Lampung	9	9	8	2	2	1	2	2	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	8	6	2	2	1	2	2	2
10	Kepulauan Riau	8	8	6	2	2	2	4	4	1
11	DKI Jakarta	8	8	4	2	2	1	3	3	1
12	Jawa Barat	9	9	7	2	2	1	3	3	3
13	Jawa Tengah	10	10	8	3	3	2	5	5	3
14	DI Yogyakarta	9	9	8	4	4	3	8	8	5
15	Jawa Timur	9	9	8	2	2	2	3	3	3
16	Banten	8	8	7	1	1	1	2	2	2
17	Bali	8	8	7	4	4	4	3	3	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	3	3	2	5	5	3
19	Nusa Tenggara Timur	9	9	9	2	2	2	4	4	4
20	Kalimantan Barat	8	8	7	1	1	1	2	2	4
21	Kalimantan Tengah	8	8	7	1	1	1	2	2	2
22	Kalimantan Selatan	8	8	7	2	2	1	2	2	2
23	Kalimantan Timur	8	8	6	2	2	1	3	3	2
24	Kalimantan Utara	7	7	5	2	2	1	3	3	3
25	Sulawesi Utara	9	9	9	3	3	3	3	3	2
26	Sulawesi Tengah	8	8	8	2	2	2	2	2	3
27	Sulawesi Selatan	8	8	8	1	1	1	2	2	2
28	Sulawesi Tenggara	7	7	6	1	1	1	2	2	2
29	Gorontalo	8	8	9	2	2	1	3	3	4
30	Sulawesi Barat	8	8	7	2	2	2	2	2	3
31	Maluku	8	8	9	3	3	4	2	2	4
32	Maluku Utara	9	9	8	2	2	3	4	4	5
33	Papua Barat	7	7	8	2	2	2	3	3	4
34	Papua	8	8	9	2	2	1	4	4	6
35	Indonesia	9	9	8	2	2	2	3	3	3

E. Domain Gender dan Diskriminasi

NO	PROVINSI	ANGKA PERKAWINAN USIA ANAK			PERSENTASE PEMUDA PEREMPUAN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI			PERSENTASE PEMUDA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	9	9	9	4	4	4	3	3	3
2	Sumatera Utara	9	9	9	3	3	3	5	4	4
3	Sumatera Barat	9	9	9	4	4	5	4	4	4
4	Riau	8	8	9	3	3	3	4	4	4
5	Jambi	6	6	7	2	2	3	4	4	4
6	Sumatera Selatan	6	6	7	2	2	2	4	4	4
7	Bengkulu	6	7	7	3	3	4	4	4	4
8	Lampung	7	7	8	2	2	2	4	3	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	5	6	2	2	2	5	4	5
10	Kepulauan Riau	9	8	10	2	3	3	7	6	7
11	DKI Jakarta	10	10	9	2	2	2	8	6	6
12	Jawa Barat	7	7	7	2	2	2	5	4	5
13	Jawa Tengah	7	7	8	2	2	2	5	5	5
14	DI Yogyakarta	10	10	9	5	5	5	7	6	7
15	Jawa Timur	7	7	7	2	2	3	5	4	4
16	Banten	9	9	9	2	2	2	6	5	5
17	Bali	7	8	9	3	3	3	8	6	6
18	Nusa Tenggara Barat	6	5	5	2	3	3	3	3	3
19	Nusa Tenggara Timur	8	8	9	3	3	3	3	3	3
20	Kalimantan Barat	5	5	6	2	2	2	4	4	3
21	Kalimantan Tengah	4	6	6	2	2	2	4	4	4
22	Kalimantan Selatan	4	6	6	2	2	2	4	4	4
23	Kalimantan Timur	7	7	8	3	3	3	5	5	5
24	Kalimantan Utara	7	7	7	2	2	3	5	4	5
25	Sulawesi Utara	6	6	6	2	2	3	4	4	4
26	Sulawesi Tengah	6	6	7	3	3	3	4	4	3
27	Sulawesi Selatan	7	7	8	4	3	4	4	3	4
28	Sulawesi Tenggara	5	6	6	3	3	3	4	3	4
29	Gorontalo	7	6	7	3	3	4	4	4	4
30	Sulawesi Barat	5	5	5	2	2	3	3	3	3
31	Maluku	8	8	8	4	4	4	3	3	3
32	Maluku Utara	6	6	7	3	3	3	3	3	3
33	Papua Barat	6	7	7	3	3	3	3	3	3
34	Papua	7	6	6	1	1	1	2	2	2
35	Indonesia	7	7	8	2	2	3	5	4	5

Lampiran 5

Tabel A4. Perkembangan Nilai Indeks Domain 2019-2021

NO	PROVINSI	PENDIDIKAN			KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN			LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA			PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			GENDER DAN DISKRIMINASI		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Aceh	76.67	76.67	76.67	60.00	70.00	70.00	40.00	35.00	35.00	46.67	46.67	53.33	53.33	53.33	53.33
2	Sumatera Utara	73.33	73.33	73.33	57.50	57.50	62.50	40.00	45.00	40.00	43.33	43.33	33.33	56.67	53.33	53.33
3	Sumatera Barat	76.67	76.67	76.67	40.00	60.00	45.00	35.00	40.00	35.00	43.33	43.33	40.00	56.67	56.67	60.00
4	Riau	70.00	70.00	70.00	55.00	50.00	72.50	45.00	40.00	45.00	43.33	43.33	40.00	50.00	50.00	53.33
5	Jambi	70.00	70.00	70.00	55.00	60.00	72.50	35.00	35.00	40.00	46.67	46.67	43.33	40.00	40.00	46.67
6	Sumatera Selatan	63.33	66.67	66.67	57.50	45.00	55.00	40.00	45.00	40.00	46.67	46.67	36.67	40.00	40.00	43.33
7	Bengkulu	73.33	73.33	73.33	50.00	42.50	52.50	50.00	45.00	50.00	46.67	46.67	40.00	43.33	46.67	50.00
8	Lampung	63.33	63.33	70.00	47.50	57.50	42.50	45.00	45.00	45.00	43.33	43.33	36.67	43.33	40.00	43.33
9	Kepulauan Bangka Belitung	60.00	60.00	60.00	55.00	62.50	62.50	45.00	45.00	45.00	40.00	40.00	30.00	43.33	36.67	43.33
10	Kepulauan Riau	66.67	70.00	70.00	50.00	65.00	72.50	70.00	40.00	45.00	46.67	46.67	30.00	60.00	56.67	66.67
11	DKI Jakarta	70.00	76.67	76.67	45.00	50.00	60.00	45.00	25.00	35.00	43.33	43.33	20.00	66.67	60.00	56.67
12	Jawa Barat	66.67	66.67	66.67	50.00	52.50	55.00	40.00	35.00	30.00	46.67	46.67	36.67	46.67	43.33	46.67
13	Jawa Tengah	63.33	66.67	70.00	57.50	55.00	45.00	45.00	40.00	45.00	60.00	60.00	43.33	46.67	46.67	50.00
14	DI Yogyakarta	90.00	90.00	90.00	55.00	60.00	65.00	85.00	65.00	70.00	70.00	70.00	53.33	73.33	70.00	70.00
15	Jawa Timur	66.67	70.00	70.00	57.50	60.00	62.50	45.00	45.00	45.00	46.67	46.67	43.33	46.67	43.33	46.67
16	Banten	70.00	70.00	70.00	62.50	60.00	57.50	35.00	25.00	25.00	36.67	36.67	33.33	56.67	53.33	53.33
17	Bali	73.33	73.33	73.33	65.00	60.00	75.00	60.00	65.00	55.00	50.00	50.00	43.33	60.00	56.67	60.00
18	Nusa Tenggara Barat	73.33	73.33	73.33	37.50	40.00	37.50	50.00	45.00	50.00	60.00	60.00	46.67	36.67	36.67	36.67
19	Nusa Tenggara Timur	66.67	66.67	66.67	55.00	52.50	52.50	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	46.67	46.67	50.00
20	Kalimantan Barat	63.33	63.33	63.33	65.00	62.50	72.50	45.00	40.00	35.00	36.67	36.67	40.00	36.67	36.67	36.67
21	Kalimantan Tengah	63.33	66.67	66.67	62.50	65.00	65.00	50.00	45.00	40.00	36.67	36.67	33.33	33.33	40.00	40.00
22	Kalimantan Selatan	63.33	63.33	63.33	57.50	65.00	70.00	45.00	45.00	40.00	40.00	40.00	33.33	33.33	40.00	40.00
23	Kalimantan Timur	73.33	73.33	76.67	70.00	57.50	67.50	45.00	50.00	35.00	43.33	43.33	30.00	50.00	50.00	53.33
24	Kalimantan Utara	70.00	70.00	70.00	55.00	65.00	52.50	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	30.00	46.67	43.33	50.00
25	Sulawesi Utara	70.00	70.00	70.00	57.50	62.50	75.00	30.00	25.00	25.00	50.00	50.00	46.67	40.00	40.00	43.33
26	Sulawesi Tengah	66.67	70.00	76.67	50.00	62.50	62.50	50.00	45.00	45.00	40.00	40.00	43.33	43.33	43.33	43.33
27	Sulawesi Selatan	73.33	73.33	73.33	60.00	55.00	65.00	40.00	35.00	35.00	36.67	36.67	36.67	50.00	43.33	53.33
28	Sulawesi Tenggara	73.33	73.33	73.33	57.50	57.50	60.00	45.00	40.00	45.00	33.33	33.33	30.00	40.00	40.00	43.33
29	Gorontalo	66.67	66.67	66.67	45.00	60.00	62.50	45.00	40.00	40.00	43.33	43.33	46.67	46.67	43.33	50.00
30	Sulawesi Barat	66.67	63.33	66.67	57.50	50.00	62.50	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	33.33	33.33	36.67
31	Maluku	76.67	76.67	76.67	50.00	55.00	60.00	30.00	35.00	30.00	43.33	43.33	56.67	50.00	50.00	50.00
32	Maluku Utara	73.33	76.67	76.67	65.00	67.50	65.00	35.00	45.00	40.00	50.00	50.00	53.33	40.00	40.00	43.33
33	Papua Barat	73.33	73.33	73.33	57.50	60.00	67.50	40.00	40.00	45.00	40.00	40.00	46.67	40.00	43.33	43.33
34	Papua	56.67	56.67	56.67	67.50	67.50	75.00	45.00	50.00	45.00	46.67	46.67	53.33	33.33	30.00	30.00
35	Indonesia	70.00	70.00	70.00	55.00	55.00	60.00	45.00	40.00	40.00	46.67	46.67	43.33	46.67	43.33	53.33

Lampiran 6

Tabel A5. Perkembangan Nilai IPP periode 2019-2021

PROVINSI	IPP		
	2019	2020	2021
Aceh	55.33	56.33	57.67
Sumatera Utara	54.17	54.50	52.50
Sumatera Barat	50.33	55.33	51.33
Riau	52.67	50.67	56.17
Jambi	49.33	50.33	54.50
Sumatera Selatan	49.50	48.67	48.33
Bengkulu	52.67	50.83	53.17
Lampung	48.50	49.83	47.50
Kepulauan Bangka Belitung	48.67	48.83	48.17
Kepulauan Riau	58.67	55.67	56.83
DKI Jakarta	54.00	51.00	49.67
Jawa Barat	50.00	48.83	47.00
Jawa Tengah	54.50	53.67	50.67
DI Yogyakarta	74.67	71.00	69.67
Jawa Timur	52.50	53.00	53.50
Banten	52.17	49.00	47.83
Bali	61.67	61.00	61.33
Nusa Tenggara Barat	51.50	51.00	48.83
Nusa Tenggara Timur	51.67	52.17	52.83
Kalimantan Barat	49.33	47.83	49.50
Kalimantan Tengah	49.17	50.67	49.00
Kalimantan Selatan	47.83	50.67	49.33
Kalimantan Timur	56.33	54.83	52.50
Kalimantan Utara	50.33	52.67	48.50
Sulawesi Utara	49.50	49.50	52.00
Sulawesi Tengah	50.00	52.17	54.17
Sulawesi Selatan	52.00	48.67	52.67
Sulawesi Tenggara	49.83	48.83	50.33
Gorontalo	49.33	50.67	53.17
Sulawesi Barat	49.50	47.33	49.17
Maluku	50.00	52.00	54.67
Maluku Utara	52.67	55.83	55.67
Papua Barat	50.17	51.33	55.17
Papua	49.83	50.17	52.00
Indonesia	52.67	51.00	53.33



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

 +62 21 3193 6336

 +62 21 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute